

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-3
C. Kondisi Geografis Daerah	I-3
D. Gambaran Umum Demografis.....	I-13
E. Kondisi Ekonomi.....	I-15
a. Potensi Unggulan Daerah.....	I-15
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)	I-20
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	II-1
A. Visi dan Misi	II-1
B. Tujuan dan Sasaran	II-2
C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-5
D. Prioritas Pembangunan Daerah	II-12
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	III-1
A. Urusan Konkuren	III-1
a. Ringkasan Urusan Wajib	III-2
1. Urusan Pendidikan	III-2
2. Urusan Kesehatan	III-15
3. Urusan Lingkungan Hidup	III-24
4. Urusan Pekerjaan Umum	III-26
5. Urusan Penataan Ruang	III-30
6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III-33
7. Urusan Penanaman Modal	III-36
8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	III-39
9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	III-42
10. Urusan Ketenagakerjaan	III-48
11. Urusan Ketahanan Pangan	III-52
12. Urusan Perhubungan	III-54
13. Urusan Komunikasi dan Informatika	III-57
14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	III-239
15. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian ...	III-248
16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-60
17. Urusan Sosial	III-62
18. Urusan Budaya	III-68
19. Urusan Kearsipan	III-71

20. Urusan Perpustakaan	III-71
b. Ringkasan Urusan Pilihan.....	III-75
1. Urusan Kelautan dan Perikanan	III-75
2. Urusan Pertanian	III-78
3. Urusan Kehutanan	III-81
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	III-86
5. Urusan Industri.....	III-89
6. Urusan Perdagangan	III-89
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya).....	III-92
1. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-92
2. Keuangan	III-93
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	III-95
4. Inspektorat.....	III-97
5. Sekretariat Daerah.....	III-98
6. Sekretariat DPRD	III-102
7. Badan Penghubung.....	III-103
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	III-126
Urusan Pemerintahan Umum	III-115
D. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	III-117
1. Tataran Pengambil Kebijakan.....	III-117
2. Tataran Pelaksana Kebijakan	III-124
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017	IV-1
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	V-1
Tugas Pembantuan yang Diterima	V-1
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah	VI-1
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	VI-1
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI-34
D. Pembinaan Batas Wilayah	VI-34
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-44
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	VI-50
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-51
BAB VII PENUTUP	VII-1

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1.1
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1.2
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1.3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 mengacu pada sistematika Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengisian Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/321/SJ tanggal 16 Januari 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Rencana Strategis, serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para koordinator yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

Kami menyadari laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga perlu saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan datang lebih baik karena mengacu kepada prosedur dan mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, dengan rendah hati kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekian dan terima kasih.

Pangkalpinang, Maret 2018

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ERZALDI ROSMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di era reformasi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Pada awal terbentuknya, di provinsi ini terdapat 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten, Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, maka wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Sebagai provinsi yang belum lama berdiri, tentu saja provinsi ini masih dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan "*Bumi Serumpun Sebalai*" ini, mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 26 Seri E).
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan

oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

a. Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

b. Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,69 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.126,36 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,69 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 118,80 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

c. Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

d. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

e. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

f. Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72-73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak dimanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel I.1.
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	21.662	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771
Tegalan	138.246	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376
Ladang	45.984	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147
Perkebunan	331.662	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848
Hutan Rakyat	72.517	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637
Pengembalaan	8.037	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	122.309	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415
Lain-Lain (pekarangan)	435.971	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195
Permukiman	476.857	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan. Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;

- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;

- a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
 - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
 - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap,

pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium. Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan

atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
 - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
 - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas

rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

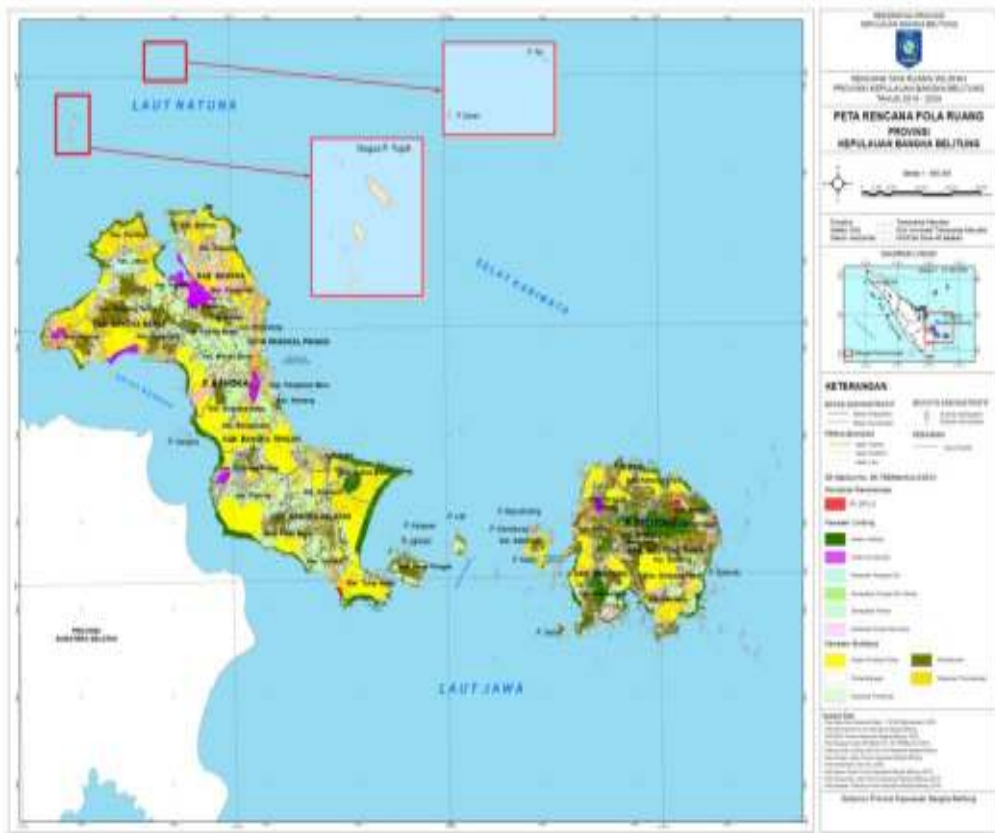
(8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- a. Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- c. Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

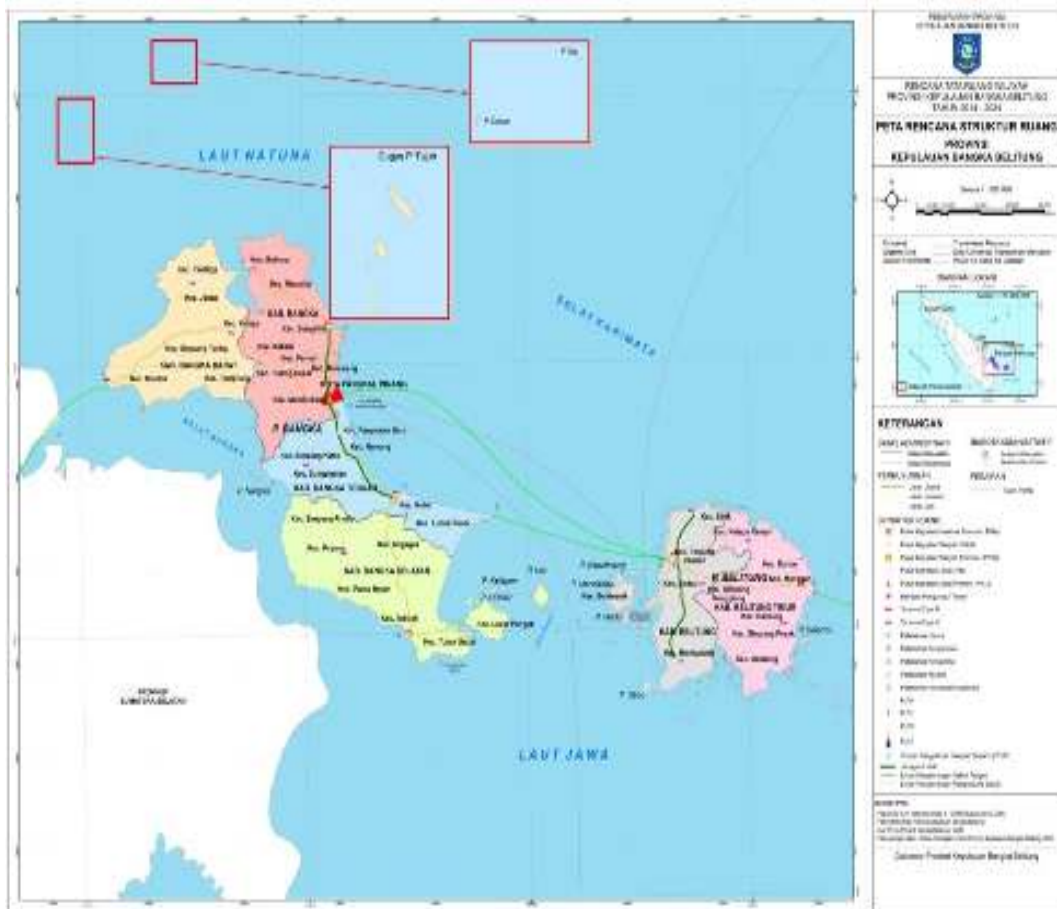
Kesemua peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

Gambar I.1
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar I.2
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

C. Gambaran Umum Demografis

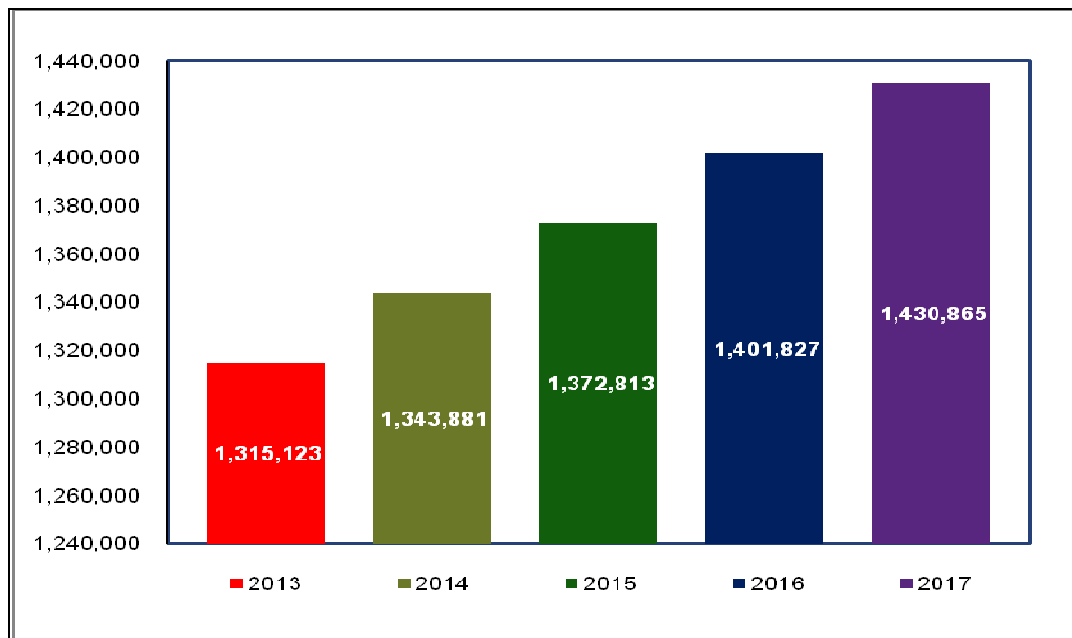
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
Kepulauan Bangka Belitung	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Grafik I.1
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.401.827 pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

Tabel I.3
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	
I.1.	Lahan Sawah	22.771
	a. Irigasi	4.602
	b. Tadah hujan	16.397
	c. Pasang surut	270
	d. Lebak	1.502
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.163.881
	a. Tegal	117.376
	b. Ladang	28.147
	c. Perkebunan	367.848
	d. Hutan rakyat	42.637
	e. Pengembalaan	2.263
	f. Sementara tidak diusahakan	67.415
	g. Lain-lain	538.195
	Jumlah	1.186.652

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4
Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	466.090	432.884	432.882,82	432.883,52	432.883,52
Hutan Lindung	156.730	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34
Hutan Konservasi	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89
Hutan Produksi Konversi	N/A	692	692,59	692,59	692,59
Jumlah	657.510	659.014	659.019,85	659.013,52	654.561,34

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2016

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

Tabel I.5
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	202.565,20	199.241,40	203.284,40	139.542,9	188.672,6
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	8.113,60	2.939,10	4.198,62	4.308,29	4.572,82

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 tercatat sebesar 4.572,82 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.308,29 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 188.672,6 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 49.129,7 Ton dimana jumlah produksinya 139.542,9 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Potensi Pertambangan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

Tabel I.6
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.4 berikut.

Gambar I.3
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya

antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel I.7

Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	191.200	221.747	236.370	369.743	465.554
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.495	1.864	2.035	3.020	4.690
3.	Jumlah	192.695	223.611	238.405	372.763	470.244

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 192.695 orang meningkat di tahun 2012 menjadi 223.611 orang dan pada tahun 2015 sebesar 470.244 orang.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi

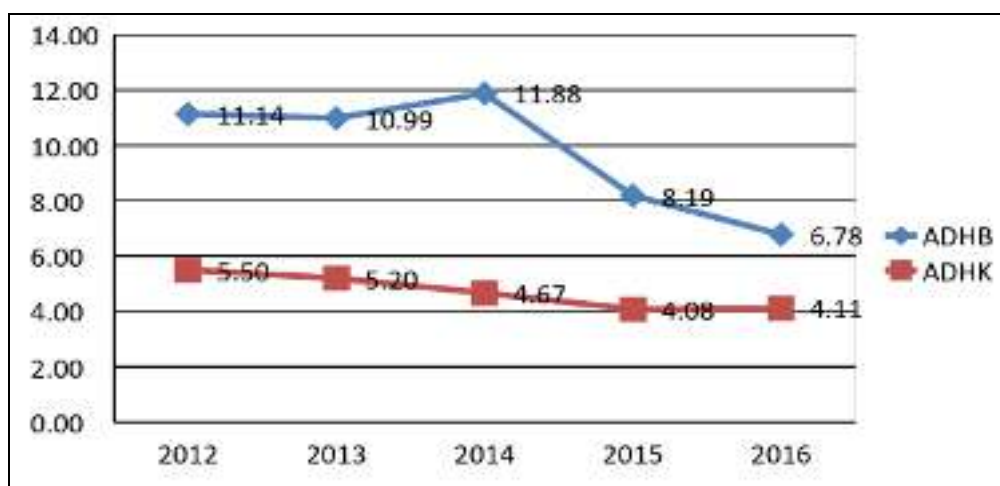
diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Tabel I.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010=100)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (miliar rupiah), 2012-2016

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	45.400,2	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Grafik I.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan di dalam negeri. Pada periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi penyumbang PDRB telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2016 sehingga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

1.) Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas

dasar harga konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.13 dan Tabel II.14. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalian.

Tabel I.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013 –2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.269.6	10.836.6	12.060.4	1.3126.3	13.145.6
Pertambangan dan Penggalian	7.097.6	7.622.7	7.735.4	7.743.3	8.179.2
Industri Pengolahan	12.088.2	12.877.3	12.888.4	13.088.5	14.276.5
Pengadaan Listrik, gas	27.3	42.7	51.1	66.6	79.4
Pengadaan Air	381.24	10.4	12.1	13.2	15.0
Konstruksi	41.39.7	472.4	5.264.2	5.753.9	6.381.4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	.6671.7	7.613.5	8.634.3	9.641.9	10.890.9
Transportasi dan Pergudangan	1.864.6	2.125.6	2.461.8	2.642.1	2.900.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.152.1	1.321.4	1.459.8	1.610.4	1.735.6
Informasi dan Komunikasi	770.2	849.3	941.7	1.034.0	1.135.3
Jasa Keuangan	902.4	998.5	1.095.3	1.198.1	1.280.6
Real Estate	1.602.9	1.823.4	1.964.7	2.106.2	2.284.2
Jasa Perusahaan	134.4	154.0	169.6	176.4	196.8
Administrasi Pemerintahan	2.618.0	3.025.6	3.471.6	3.781.6	4.116.3
Jasa Pendidikan	1.172.2	1.362.8	1.639.7	1.860.0	1.961.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552.7	625.8	710.7	760.1	846.1
Jasa Lainnya	315.9	371.7	426.6	493.1	548.5
Produk Domestik Regional Bruto	50.388.4	56.373.6	60.987.3	65.095.5	69.973.2

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel I.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.7	8.254.3	8.743.5	9.116.9	9.083.8
Pertambangan dan Penggalian	6.230.2	6.354.1	6.458.1	6.491.1	6.633.0
Industri Pengolahan	10.143.3	10.270.4	10.400.6	10.688.4	11.363.1
Pengadaan Listrik, gas	31.5	35.6	38.9	43.7	45.9
Pengadaan Air	7.3	7.7	8.1	8.6	9.4
Konstruksi	3.414.7	3.552.4	3.760.1	4.021.6	4.252.1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	5.846.6	6.139.5	6.402.1	6.727.7	7.259.8
Transportasi dan Pergudangan	1.484.8	1.570.8	1.662.3	1.752.3	1.892.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931.0	1.000.6	1.034.8	1.086.5	1.136.5
Informasi dan Komunikasi	740.2	790.9	849.0	926.9	1.002.8
Jasa Keuangan	728.3	766.6	807.9	860.0	881.3
Real Estate	1.312.6	1.403.9	1.442.0	1.494.8	1.572.5
Jasa Perusahaan	108.1	115.7	120.3	120.4	127.5
Administrasi Pemerintahan	2.014.4	2.149.8	2.337.1	2.478.7	2.604.2
Jasa Pendidikan	903.7	964.9	1.059.1	1.139.3	1.183.3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.3	500.6	533.8	559.6	605.4
Jasa Lainnya	261.0	281.7	304.6	334.4	354.9
Produk Domestik Regional Bruto	42.190.9	44.159.4	45.962.3	47.850.8	50.007.8

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

2.) PDRB Perkapita

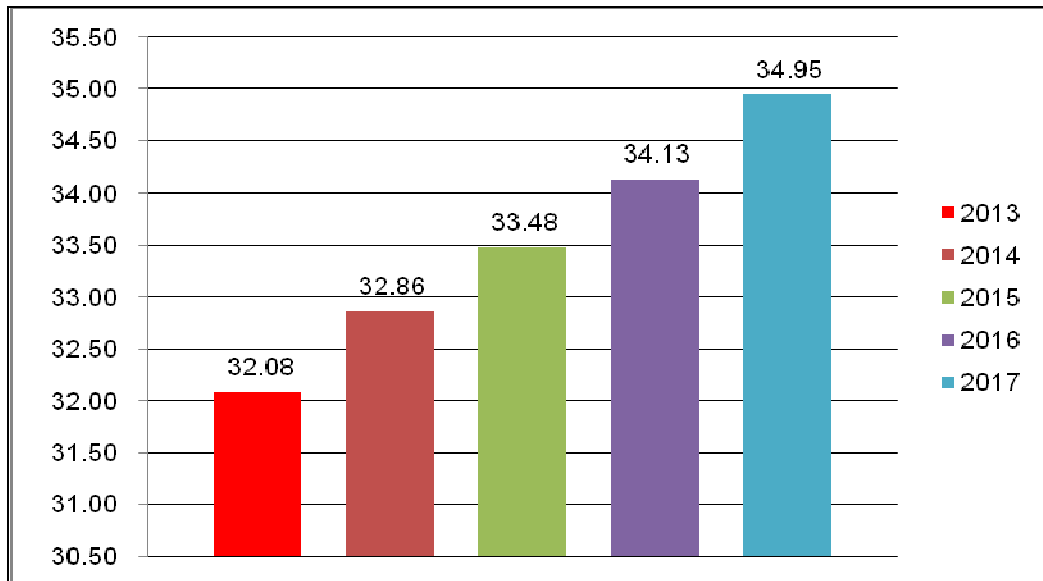
PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan

yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik I.3.

Grafik I.3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. **Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;**
Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. **Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. **Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
 - b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)

- Ketersediaan Air Baku (M3)
- Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
- c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)

- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Air
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

C.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanani;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
 - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

C.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
 - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

C.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
 - b. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
 - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
 - a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

C.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.

- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan

2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
 - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
 - e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city.

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan

Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagai perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahah; pegendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

E. TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tahun 2018, Tema Proritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Proritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Proritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

Tabel. II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatnya produksi sektor pertambangan	4 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		2 Pendapatan perkapita masyarakat	1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran
			2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	3 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas				
3	Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya daerah irigasi (ha)
				2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
				2 Persentase kawasan permukiman yang tertata
				3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
				2 Persentase armada pengangkutan
				3 Persentase jalan kondisi mantap

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
			berkualitas	Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatkan pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil
				1 Skor aspek hak-hak politik
				1 Skor aspek lembaga demokrasi
Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel.II.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan
	2 PEMBANGUNAN BAHARI	2 Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
			5 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
			6 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
			7 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan
3 PENGEMBANGAN PARIWISATA	3 Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata		

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			pariwisata
			8 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
			9 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
	4 PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
		5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
		6 Terwujudnya kemandirian energi	12 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
2 Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	5 PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13 Meningkatkan pendapatan asli daerah
	6 PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8 Menurunnya angka Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
		9 Menurunnya angka kemiskinan	15 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10 Menurunnya angka Inflasi	16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7 PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	12 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			19 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			21 Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			24 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
			25 Meningkatkan aksesibilitas
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal			
4 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	8 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26 Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
			27 Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat			
5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9 PEMBANGUNAN KESEHATAN	16 Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
6 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10 PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
			30 Peningkatan tata kelola pengawasan
			31 Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
			32 Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
			33 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
		18 Birokrasi yang efektif dan efisien	34 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			35 Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
		19 Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
			37 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7 Terwujudnya pembangunan demokrasi	11 PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38 Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
			39 Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
			40 Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
8 Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12 PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21 Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			42 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	13 PENEKNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22 Peningkatan Kualitas Lingkungan	43 Meningkatkan kualitas air
			44 Meningkatkan kualitas Udara
			45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			46 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung organisasi perangkat daerah pelaksana adalah sebagai berikut :

OPD*) PROVINSI	NAMA NOMENKLATUR
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Inspektorat	Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas	1 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	3 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	6 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	8 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	9 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	15 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	18 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

OPD*) PROVINSI	NAMA NOMENKLATUR
	19 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	20 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	24 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Badan	1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	3 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	4 Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	6 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rumah Sakit Daerah	1 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2 Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Ringkasan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pendidikan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan yang melaksanakan Urusan Wajib Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Pangkalpinang
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Barat Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Barat
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Tengah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Tengah
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Selatan Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Selatan
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Belitung
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung Timur Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Belitung Timur
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Penyusunan DED pembangunan gedung kantor
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan
 - Kegiatan Bimtek dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs
 - Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar
- f. Program Pendidikan Non Formal
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - Kegiatan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan
- h. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
 - Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA
 - Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK
 - Kegiatan Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Ke Jenjang Perguruan Tinggi
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas, Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa kampit, Belitung Timur
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah
- Kegiatan Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung

- Pandan, Kabupaten Belitung
- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur
 - Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka
 - Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMK
 - Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMA/MA
- I. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ DAK Non Fisik
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungai Selan
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit Tiga
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air Gegas
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjung Pandan
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjung Pandan
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjung Pandan
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang
 - Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit

- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riausilip
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pudingbesar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pudingbesar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Koba
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpangteritip
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Leparpongok
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Airgegas
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpangrimba
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Lepar Pongok
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjung Pandan
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjung Pandan
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalung
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpangpesak
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Pangkalpinang
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Sungailiat
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Koba
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Muntok
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Toboali
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Tanjung Pandan
- Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Manggar

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel I.1
Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Dasar Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Real. Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd target Akhir Renstra
						Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	APK PAUD	%	37,82	47,31	42,84	50,83	45,13	88,79	50,83	88,79
Layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	APK SD Sederajat	%	114,46	113,87	108,00	116,26	110,40	94,96	116,26	94,96
	APM SD Sederajat	%	92,62	96,83	92,75	97	94,92	97,86	97	97,86
	Angka DO SD/MI	%	0,39	0,25	0,07	0,30	0,12	160,00	0,30	160,00
	Angka Melanjutkan SD/MI	%	94,48	87,17	86,29	100	54,92	54,92	100	54,92
	Rata-rata kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	99,82	99,82	100	99,82
	Angka Mengulang SD/MI.	%	5,77	0,85	2,96	4,00	3,21	119,75	4,00	119,75
	APK SMP Sederajat	%	95,08	94,67	93,55	97,96	94,59	96,56	97,96	96,56
	APM SMP Sederajat	%	63,79	68,92	68,84	84	70,73	84,20	84	84,20
	Angka Drop Out (DO) SMP/MTs	%	0,82	0,28	0,05	0,23	0,47	-4,35	0,23	-4,35
	Persentase kelulusan SMP/MTs	%	99,96	99,97	99,29	99,35	99,91	100,56	99,35	100,56
Angka Mengulang SMP/MTs	%	0,56	0,14	0,42	0,45	0,71	42,22	0,45	42,22	
Jumlah Rata-Rata capaian								86,64%		86,64%

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** sebagaimana tampak tabel I.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata **86,64%** dengan kategori **Berhasil**.

Tabel I.2
Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. 2014	Real. 2015	Real. 2016	2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd target Akhir Renstra
						Target	Real.	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Layanan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Berkualitas Bagi Seluruh Masyarakat	APK Pendidikan Menengah	%	73,28	69,46	79,06	95,95	78,49	81,80	95,95	81,80
	APM Pendidikan Menengah	%	50,81	35,56	56,61	75	58,73	78,31	75	78,31
	Angka DO SMA/MA	%	1,32	2,83	0,09	0,31	1,00	-122,58	0,31	-122,58
	Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA	%	99,93	99,97	99,80	99%	99,99	101,00	99%	101,00
	Angka Mengulang SMA/MA	%	0,83	0,45	0,49	0,46	0,59	71,44	0,46	71,44
	Persentase Kelulusan Siswa SMK	%	99,98	99,98	99,64	99,95	99,91	99,96	99,95	99,96
	Angka Mengulang SMK	%	1,16	0,23	0,09	0,20	0,48	-40,00	0,20	-40,00
	Jumlah Lulusan Pendidikan Menengah yang Tidak Mampu dan Berprestasi yang Melanjutkan ke PT	Orang	12	14	311	100	906	100	100	100
Jumlah Rata-Rata capaian								66,56		66,56

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program pendidikan menengah dan tinggi sebagaimana tampak tabel I.2 diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata **66,56%** dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Tabel I.3
Pencapaian Kinerja Program Pendidikan NonFormal Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Real. Tahun 2016	2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd target Akhir Renstra
						Target	Real.	%		
1	2	3	4	4		5	6	7	8	9
Layanan Pendidikan Nonformal dan Informal yang Berkualitas bagi seluruh masyarakat	Jumlah warga Belajar Paket A, B dan C	orang	7905	8244	77,68	10432	2774	26,59	10432	26,59
	Persentase Kelulusan UNPK Paket A	%	100	86,85	95,97	78	78	100	78	100
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	%	96,23	85,94	95,01	78	78	100	78	100
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	%	91,33	86,06	97,98	78	78	100	78	100
	Angka Buta Aksara penduduk usia 15 keatas	%	3,59	2,66	2,37	2,50	2,21	111,60	2,50	111,60
	Lembaga Kursus terakreditasi minimal B	lembaga	10	18	18	25	18	72,00	25	72,00
Jumlah Rata-Rata capaian								85,03		85,03

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja sasaran **program pendidikan nonformal** dalam kategori **Berhasil** dengan pencapaian rata-rata sebesar **85,03%**.

Table I.4
Pencapaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Real. Tahun 2016	2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd target Akhir Renstra
						Target	Real	%		
1	2	3		4		5	6	7	8	9
Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas	Tersedianya seluruh data pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung	Dokumen	2	2	2	2	2	100	2	100
Jumlah Rata-Rata capaian										100,00

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja **program pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan** sebagaimana tampak tabel I.4 diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata **100%** dengan kategori **berhasil**.

Tabel I.5
Pencapaian Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Real. Tahun 2016	2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd target Akhir Renstra
						Target	Real	%		
1	2	3		4		5	6	7	8	9
Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen	4	3	3	3	3	100	3	100
	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Dokumen	3	3	3	3	3	100	3	100
Jumlah Rata-Rata capaian										100,00

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** sebagaimana tampak tabel I.5 diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata **100%** dengan kategori **berhasil**.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	13		13
		Gol. III	54		54
		Gol. II	17		17
		Gol. I	-		-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		-
		S2	11		11
		S1	62		62
		D. IV	-		-
		D. III	15		15
		D. I	-		-
		SMA/ sederajat	23		23
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	6		6
		Eselon IV	15		15
		Fungsional:			
		Tertentu	6		6
		Umum	56		56
JUMLAH TOTAL			84		84

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Jenjang

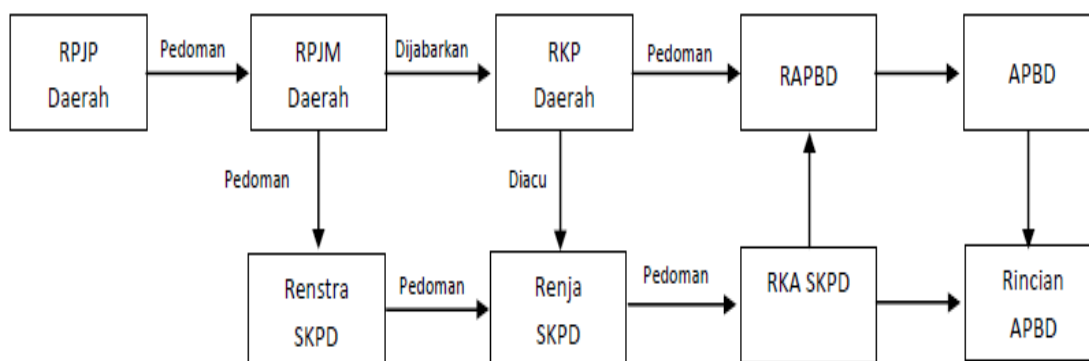
Jenjang Pendidikan	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai								
		PNS			Non PNS			Total		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T
SMA	Guru	34	50	84	32	36	68	67	86	15
		6	3	9	4	3	7	0	6	36
	Tenaga Kependidikan	59	42	10	26	22	49	32	26	59
Total 1		40	54	95	59	58	11	99	11	21
		5	5	0	1	8	79	6	33	29
SMK	Guru	41	40	81	35	37	73	77	77	15
		4	5	9	9	2	1	3	7	50
	Tenaga Kependidikan	32	28	60	26	20	46	29	23	52
Total 2		44	43	87	61	57	11	10	10	20
		6	3	9	9	7	96	65	10	71
SLB	Guru	27	63	90	19	40	59	46	10	14
								3		9

Jenjang Pendidikan	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai								
		PNS			Non PNS			Total		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T
	Tenaga Kependidikan	0	1	1	18	24	42	18	25	43
	Total 3	27	64	91	37	64	101	64	131	195
DPK	Guru	6	12	18	0	0	0	6	12	18
	Tenaga Kependidikan									
	Total 3	6	12	18	0	0	0	6	12	18
Total		88	104	19	12	12	24	21	22	44
		4	52	36	47	29	76	31	81	12

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
237.826.631.204,63	52.704.195.700	138.964.670.938	47.867.891.262	477.363.389.104,63	423.561.349.126	88.73	Dinas Pendidikan

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	✓	-	-

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Sarana prasarana belum semua Sekolah Menengah memenuhi sarana prasarana standar Nasional Pendidikan.
- Masih terdapat kekurangan guru produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Masih tingginya Drop Out (DO) siswa Sekolah Menengah.
- Tenaga kependidikan dan guru PNS yang kurang.

Solusi

- Secara bertahap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- Bea siswa bagi guru lulusan Sekolah Menengah untuk mengikuti pendidikan guru produktif dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru normatif dan adaptif menjadi guru produktif.
- Meningkatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk siswa Sekolah Menengah.
- Penambahan PNS.

Urusan Wajib Kesehatan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kesehatan yang melaksanakan Urusan Wajib Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi
 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan fungsi pelayanan Balai Labkes
 - Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah
 - Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.
 - Peningkatan Promosi Kesehatan
- g. Program Perbaikan Gizi masyarakat
 - Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat
- h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
 - Peningkatan Teknis Laboratorium Klinis dan Kesmas
 - Pengendalian Penyakit Menular
- j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- k. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - Pengembangan Kesehatan Anak
- m. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - Pengawasan dan Pengendalian Hygiene sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan
- n. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - Penurunan AKI dan AKB
- o. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
 - Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- p. Program Sumberdaya Manusia Kesehatan
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan administrasi Laboratorium
- q. Program Pengadaan Peningkatan sarana dan Prasarana Labkesda
 - Peningkatan sarana dan prasarana balai laboratorium Kesehatan.
- r. Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
 - Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan
- s. Program Bencana Bidang Kesehatan
 - Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pengelolaan Website
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan/ Pelatihan Informal
 - Pelaksanaan Kegiatan Personal Development
- e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Penyusunan Formularium Rumah Sakit
 - Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit
- f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
 - Pendataan dan Penagihan Piutang Rumah Sakit
 - Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visit
 - Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
 - Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit
 - Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan

- Pembuatan Master Plan Rumah Sakit dan DED Pengembangan Rumah Sakit
- Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan
- i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
 - Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III
 - Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Padat (Incenerator)
 - Pembangunan Gedung Incenerator
 - Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan
 - Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit
 - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit(Dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dan Lain-lain)
 - Pengadaan Alat Kalibrasi
 - Pembangunan Kamar Jenazah
 - Pengadaan SIM Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat-Alat dan Perlengkapan Psikologi
- j. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
 - Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
- k. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi ,sumber daya&listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan&minuman
 - Koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaaan Peralatan GedungKantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pengadaan TLD RumahSakit

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan teknis pegawai RSUDP
 - Peningkatan kapasitas aparatur tenaga kesehatan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
 - Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan
- h. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyelenggaraan penyebaran informasi melalui pameran dan media cetak
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Persiapan Penilaian akreditasi Rumah Sakit
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway
 - Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD
 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
 - Sister Hospital RSUDP dengan RSCM
 - Studi Evaluasi dan Optimalisasi Rumah Sakit
- j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
 - Pengadaan sarana dan prasarana operasional rumah sakit
 - Pembangunan pos jaga dan portal Rumah Sakit
 - Penyediaan bahan-bahan logistic Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
 - Review DED Gedung B dan Bangunan Pendukung RSUDP
 - Pengadaan linen rumah sakit
- k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
 - Pemeliharaan Instalasi Oksigen Sentral Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Air Minum Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Air Minum Rumah Sakit.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dinas Kesehatan

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	16	-	16
		Gol. III	86	-	86
		Gol. II	20	-	20
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	20	-	20
		S1	70	-	70
		D. IV			-
		D. III	25	-	25
		D. I	1	-	1
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	18	-	18
		Fungsional:			
		Tertentu	33	-	33
		Umum	64	-	64
JUMLAH TOTAL			122		122

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	160	-	160
		Gol. II	42	-	42
		Gol. I	1	-	1
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	11	-	11
		S1	80	-	80
		D IV	1	-	1
		D III	69	-	69
		D II/I	1	-	1
		SMA/ Sederajat	46	-	46
		SMP/ Sederajat	1	-	1
		SD/ Sederajat	2	-	2
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	10	-	10
		Fungsional	196	-	196
JUMLAH TOTAL			211		211

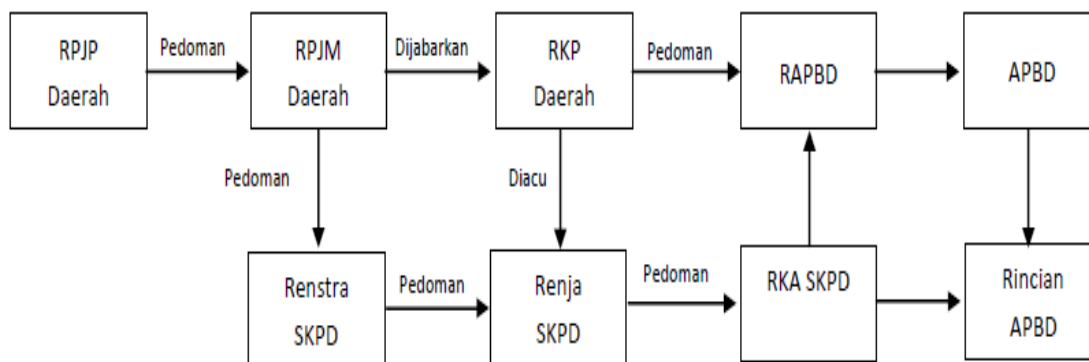
Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	4	-	4
		Gol. III	127	-	127
		Gol. II	117	-	117
		Gol. I		-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	16	-	16
		S1	66	-	66
		D. IV	6	-	6
		D. III	157	-	157
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	3	-	3
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	7	-	7
		Fungsional:			
		Tertentu	201	-	201
		Umum	36	-	36
JUMLAH TOTAL			248		248

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13,080,362,278,00	2.954.570.000,00	31.571.318.337,00	47.867.891.262,00	48,072,364,615,00	43,082,265,105,00	89,62	DINKES
25.604.392.888,90	4.844.735.000,00	16.181.086.350,00	8.558.315.100,00	55.188.529.338,90	49.146.057.388,36	89,05	RSJD
29.436.148.310,00	10.313.030.000,00	20.773.279.999,00	81.077.159.261,00	141.599.617.570,00	130.629.299.801,00	92,25	RSUD
68.120.903.476,90	18.112.335.000,00	68.525.684.686,00	137.503.365.623,00	244.860.511.523,00	222.857.622.294,36	90,31	

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Belum sinkronnya dokumen perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat terhadap program ataupun indikator kinerja yang digunakan sebagai pelaksanaan program kesehatan di masing-masing wilayah kerja dan belum terintegrasinya program-program kesehatan secara internal maupun lintas sektor sehingga pencapaian kinerja kesehatan belum tercapai secara maksimal.
- Penyusunan rencana kebutuhan Obat belum sepenuhnya berdasarkan data-data yang valid antara lain data ketersediaan obat, data pemakaian.
- Kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan Gerakan 3M plus belum berjalan maksimal di seluruh Kabupaten/Kota terkait minimnya penganggaran terutama advokasi dari Puskesmas kepada kepala Desa/Kelurahan dalam gerakan PSN dan 3M plus serta adanya faktor resiko yg tidak dapat/sulit dikendalikan seperti kepadatan penduduk/pemukiman, urbanisasi tidak terkendali, mobilisasi, kondisi lingkungan seperti tempat perindukan nyamuk aedes agypti yang tidak terpantau oleh masyarakat serta faktor perilaku masyarakat.
- Data sampai dengan November 2017 menggambarkan masih sekitar 11,6% anak balita belum mendapatkan pelayanan sesuai standar (belum tercapainya target SPM 100% cakupan pelayanan anak balita (88,84%)
- Angka kematian balita 7,08/100KH
- Belum tercapainya target (100%) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (82,61%).
- Belum tercapainya target (100%) cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes (71,18%).

- Sarana Gedung Pendukung Dan Alat-Alat Kesehatan Belum Memenuhi Standar Rumah Sakit Kelas B Sesuai Permenkes 56 Tahun 2014

Solusi:

- Sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten kota khususnya program kesehatan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi/peran dan kewenangan masing-masing serta pengintegrasian program kegiatan bidang kesehatan secara internal maupun lintas sektor.
- Adanya penyusunan secara berjenjang mulai tingkat puskesmas, tingkat kab/kota dan Provinsi, mengoptimalkan TPOT (tim perencanaan obat terpadu) yang terdiri dari pengelola obat dan pengeloa obat program
- Advokasi dalam menggalakkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 3M plus melalui program 1(satu) rumah 1(satu) jumentik mulai dari level Kabupaten – Kecamatan - Desa/Kelurahan dengan lintas sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pendidikan/Kanwil Depag, dalam membantu penganggaran kegiatan pengendalian penyakit DBD untuk anggaran dana desa (ADD) atau anggaran di Kecamatan/Kelurahan, anggaran kegiatan yang dapat diusulkan sebagai berikut:
 - Gerakan 3 M plus (menguras benda - benda yang bisa menampung air, menutup benda - benda penampung air, plus memanfaatkan barang bekas, menyikat bak-bak mandi di rumah 1 minggu sekali, serta menabur bubuk abate (temephos 1%)
 - Gotong royong Jum'at bersih setiap minggu di semua lingkungan rumah dan tempat-tempat umum: sekolah - sekolah, kantor, tempat ibadah (gereja, masjid dll)
 - Kampanye DBD melalui : penyuluhan DBD, pemasangan baleho DBD, spanduk, dan penyebaran leaflet.
 - Program Bank sampah di daerah endemis DBD
 - Dan kegiatan lainnya yang dapat mencegah masyarakat tertular DBD
- Advokasi ke stakeholder terkait, peningkatan fungsi posyandu terintegrasi, koordinasi lintas program dan lintas sektor pembinaan kader, meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan penguatan kelembagaan dan operasional posyandu.
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes.
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu dan P4K di setiap desa/kelurahan, penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan di fasyankes swasta.
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasyankes perlu ditingkatkan termasuk mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Menyediakan Anggaran Untuk Melengkapi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar Permenkes 56 Tahun 2014.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi dan konsolidasi Ke Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Sumur Bor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)
 - Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
 - Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
 - Rencana Aksi Pengelolaan Sungai Terpadu
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chat
 - Survelian, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium
 - Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022
 - Penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K
- i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standard Pelayanan Minimum yang Dinas Lingkungan Hidup adalah :

a. Kualitas Air

Kualitas air yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan air sungai yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 11 sungai dan yang dipantau sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Batu Rusa, Sungai Buding dan Sungai Rangkui atau sebesar 27,27%.

b. Kualitas udara

Kualitas udara ambien yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) titik di 7 kabupaten/ kota dengan hasil 100%.

c. Penegakan Hukum

Pengaduan yang dilaporkan ke DLH Provinsi sebanyak 12 pengaduan dan yang terverifikasi sebanyak 12 pengaduan atau 100%. Selanjutnya terdapat 4 pengaduan yang merupakan wewenang kabupaten/Kota dan sudah dilakukan koordinasi.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

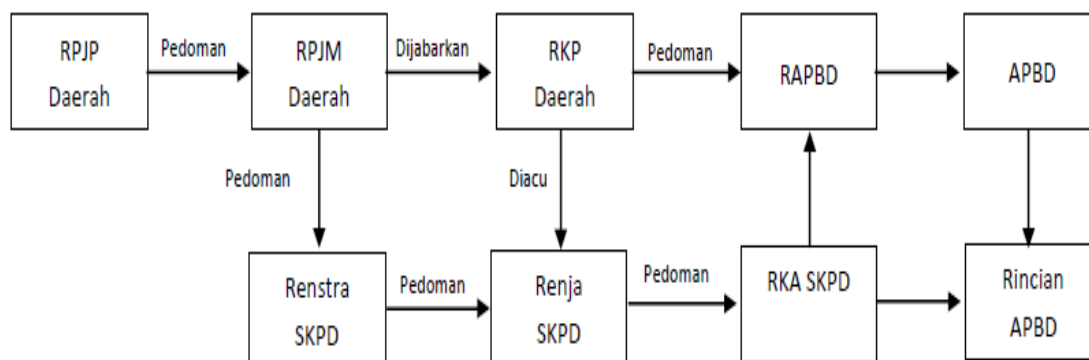
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	50	-	50
		Gol. II	5	-	5
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	11	-	11
		S1	40	-	40
		D. IV	-	-	-
		D. III	9	-	9
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan	Struktural:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total	
	Jabatan	Eselon II	1	-	1	
		Eselon III	5	-	5	
		Eselon IV	12	-	12	
		Fungsional:				
		Tertentu	6	-	6	
		Umum	39	-	39	
JUMLAH TOTAL			63	-	63	

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7,431,859,812.00	1,292,570,000.00	3,859,330,250.00	323,152,000.00	12,906,912,062.00	11,687,787,790.00	90,55	DLH

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Kurang lengkapnya data aktivitas sehingga berpengaruh terhadap hasil inventarisasi GRK. Data aktivitas yang saat ini belum diperoleh sebagai data yang dapat dimasukkan dalam perhitungan emisi GRK
- Masih terbatasnya kemampuan SDM PPNS dan PPLH

- Lemahnya koordinasi antara instansi terkait pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang terjadi baik di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota
- Jadwal pelaksanaan pada triwulan ke III, hal ini dikarenakan padatnya jadwal dari tim ahli PPPE Sumatera khususnya bagian daya dukung, daya tampung (DDDT) yang mencakup di beberapa Wilayah Regional Sumatera lainnya
- Sebagian besar anggota Tim Kelompok Kerja belum terlalu memahami mekanisme dan seluk-beluk pelaksanaan KLHS, karena belum familiar dengan metode pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- Permasalahan yang sering terjadi pada saat dilakukan pemantauan kualitas udara ambient dilapangan lebih kepada aspek non teknis yaitu aspek meteorologis mengingat pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambient tersebut berada pada kecenderungan musim peralihan dari musim panas ke musim hujan sebab peralatan pengambilan sampel udara ambient harus selalu terpasang di Lokasi titik pantau selama 24 jam
- Anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh izin lingkungan yang dikeluarkan oleh provinsi sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Solusi

- Agar sector terkait dapat meningkatkan ketersediaan pemenuhan data yang diperlukan dalam inventarisasi GRK guna meningkatkan hasil estimasi emisi GRK yang lebih akurat.
- Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dan PPLH.
- Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/ota dan instansi teknis terkait
- Percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana awal.
- Perlunya pelatihan atau diklat KLHS bagi beberapa pegawai dari instansi.
- Jika terjadi kondisi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat selama total maksimal 2 jam diantara jam 06.00–18.00 maka pemantauan harus dihentikan dan dilanjutkan kembali setelah hujan berhenti. Jika kondisi hujan lebih dari 2 jam maka pemantauan harus diulang pada hari kerja berikutnya.
- Memaksimalkan pengawasan Self Assesment bagi usaha/kegiatan yang belum terjadwalkan dalam kegiatan pengawasan.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jembatan (DAK)

- Pembangunan Jalan untuk dihibahkan
- b. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk dihibahkan
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
- f. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- h. Program Pengendalian Banjir
 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
 - Perencanaan Pengendalian banjir
- i. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Pengadaan Lahan Jalan Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander
- j. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
 - Pengadaan Alat Survey

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural danFungsional

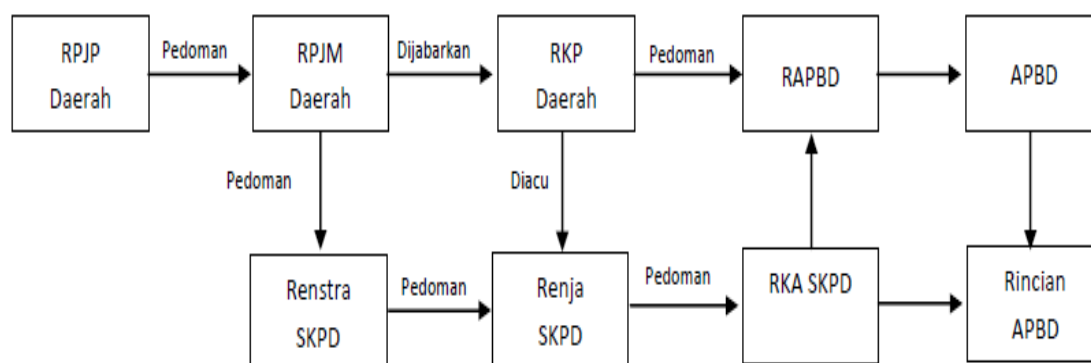
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	3	-	3
		Gol. III	107	-	107
		Gol. II	47	-	47
		Gol. I	3	-	3
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	21	-	21
		S1/D. IV	72	-	72
		D. III	22	-	22
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	43	-	43
		SMP/ sederajat	2	-	2
SD/ sederajat	-	-	-		

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	14	-	14
		Fungsional:			
		Tertentu	8	-	8
		Umum	132	-	132
JUMLAH TOTAL			160	-	160

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.827.663.633,00	6.224.830.000,00	54.152.926.281,00	215.800.726.150,00	293.006.146.064,00	266.763.313.264,00	91,04	Dinas PUPR

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Belum terlaksana proses pembuatan akta hibah sehingga pada tahapan tersebut belum dilakukan proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang.

- Proses konsinyasi di PN Sungailiat tidak berjalan optimal, sehingga proses penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah Jl. Lintas Timur Kab. Bangka tidak bisa terserap.
- Kurangnya Sumber daya Manusia yang berkompeten pada bagian Perencanaan, Penataan Ruang dan Tenaga Teknik.

Solusi

- Agar proses pembuatan akta hibah dalam segera dilakukan sehingga proses pemisahan sertifikat tanah bisa dapat dibuat.
- Menyampaikan ke Pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga proses konsinyasi dapat berjalan optimal, sehingga realisasi uang ganti rugi yang dititipkan pengadilan dapat terserap.
- Mengajukan permintaan Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten pada bagian perencanaan, penataan ruang dan tenaga teknik.

Urusan Wajib Penataan Ruang

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Penataan Ruang yang melaksanakan Urusan Wajib Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Operasional
 - Rehabilitasi Gedung Kantor
 - Pembangunan Saluran Drainase
 - Pembangunan Landscape dan Parkir Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Operasional

- c. Program Peningkatan Displin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- f. Program Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - Survei Identifikasi dan Pendataan Bidang Perumahan Provinsi Kep. Babel
 - Pembuatan Software Aplikasi Database Bidang Permukiman
- g. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- h. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
- i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
 - Penyusunan Baseline Permukiman Kumuh

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural danFungsional

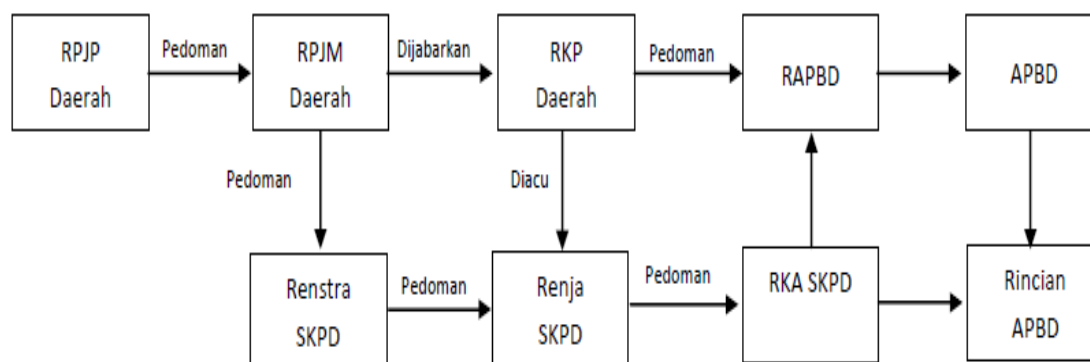
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	30	-	30
		Gol.II	8	-	8
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	6	-	6
		S1/D. IV	27	-	27
		D. III	-	-	-
		D. I	2	-	2
		SMA/ sederajat	-	-	-
		SMP/ sederajat	7	-	7
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	3	-	3
		Eselon IV	6	-	6
		Fungsional:			
Tertentu	-	-	-		

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Umum	33	-	33
JUMLAH TOTAL			43	-	43

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.120.030.554,52	702.630.000,00	4.496.171.000,00	4.940.989.000,00	15.259.820.554,52	13.701.502.877,50	89,79	PERKIM

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Belum optimalnya penyerapan anggaran di beberapa kegiatan baik di Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- Untuk Belanja Tidak Langsung/BTL, terdapat sisa anggaran dikarenakan kelebihan penghitungan gaji pegawai mengingat pada bulan Januari sampai dengan Maret, gaji pegawai masih dibayarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.
- Kegiatan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat sisa anggaran. Dana yang dianggarkan untuk operasional kantor tidak bisa digunakan karena gedung juang yang ditempati oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih merupakan aset Biro Umum.
- Kegiatan RTLBL terdapat sisa anggaran dikarenakan anggaran SPPD Luar daerah tidak digunakan.

- Kegiatan survey RTLH terdapat sisa anggaran dikarenakan kelebihan pada dana perjalanan dinas dalam daerah.

Solusi

- Diperlukan proses perencanaan yang baik, professional sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan schedule dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Perlu adanya pemindahan aset terutama gedung dari Biro Umum ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga yang melaksanakan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - Peningkatan Peran Serta Pemuda
 - Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor
 - Jambore Pemuda Daerah
 - e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- i. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - Peningkatan Peran Serta Pemuda
 - Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor
 - Jambore Pemuda Daerah
- j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda
 - Peningkatan Ekonomi Pemuda
- k. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi, dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Pelajar VIII
 - Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV
 - TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional
 - Training Camp (TC) Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 dan U-16 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD
 - Pengiriman Kontingen Peparpenas/POCANAS
 - Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV
 - Pengiriman Kontingen PEPARPENAS
 - Launching Porprov Tahun 2018
 - Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Tinju
 - Pemberian dan Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi
- l. Program Pembinaan Generasi Muda
 - Seleksi Paskibraka TK. Nasional dan TK. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

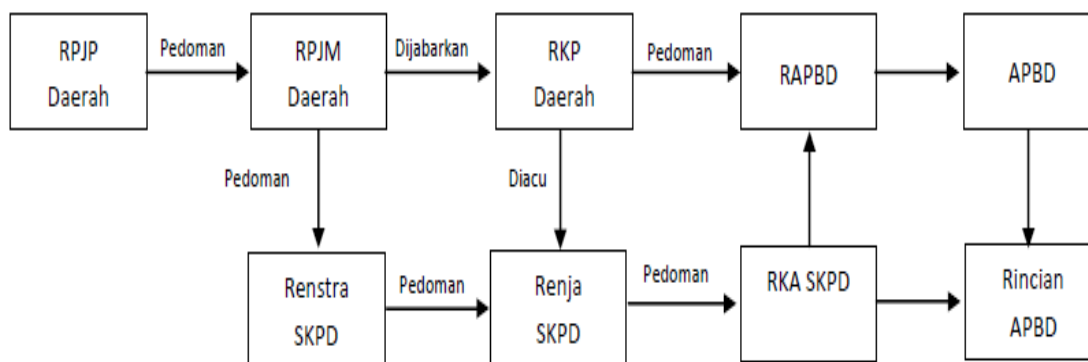
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	32	-	32
		Gol. II	15	-	15
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	6	-	6
		S1/D. IV	30	-	30
		D. III	1	-	1
		D. I	-	-	-

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		SMA/ sederajat	17	-	17
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	9	-	9
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	-
		Umum	40	-	40
JUMLAH TOTAL			54		54

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.048.870.832,69	2.214.720.000,00	9.366.954.027,00	183.142.000,00	17.813.686.859,69	16.435.447.147,00	92,26	DISPORA

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Belum sinerginya gerakan kepemudaan yang tersebar di dalam berbagai organisasi kepemudaan, organisasi kesiswaan dan organisasi kemahasiswaan.
- Belum optimalnya pemberian fasilitas pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan keterampilan.
- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang standar untuk pembinaan dan pelatihan olahraga.
- Belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Solusi

- Perlunya disusun kebijakan dan regulasi tentang kepemudaan sehingga dalam penanganan kepemudaan lebih terarah dan sinergi.
- Perlunya kejelasan organisasi yang menangani kepemudaan.
- Peningkatan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial.
- Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga.
- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang prioritas daerah.
- Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang pelatihan

Urusan Wajib Penanaman Modal

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Penanaman Modal yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah

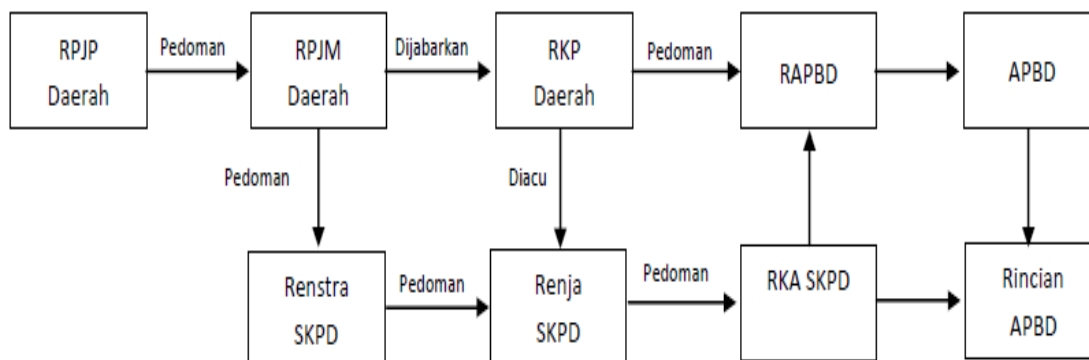
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Peningkatan Gedung/Kantor
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - e. Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah
 - Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah
 - f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - Kegiatan Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2017
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	35	-	35
		Gol. II	7	-	7
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	2	-	2
		S2	6	-	6
		S1	30	-	30
		D. IV	1	-	1
		D. III	4	-	4
		SMA/ sederajat	5	-	5
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	1	-	1
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	12	-	12
		Fungsional:			
		Tertentu	3	-	3
		Umum	28	-	28
TOTAL			49	-	49

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.519.940.959,00	730.090.000,00	2.238.128.950,00	17.571.000,00	8.505.730.909,00	8.308.997.743,00	97.69	DPMPTSP

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang dalam mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan publik sebagai contoh masih kurangnya sarana mobilitasi darat (mobil) dalam mendukung survey perizinan ke lapangan, bangunan gedung mengalami kerusakan berat dan harus dilakukan rehabilitasi berat demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi.
- Masih ada perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal khususnya untuk PMDN disebabkan kurangnya anggaran untuk melaksanakan survey ke perusahaan yang didukung oleh dana APBD.

Solusi

- Perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyajian data terkini (up to date) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi.
- Perlu dukungan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan pengawasan ke perusahaan terkait PMDN.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsolidasi Kedalam Daerah
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan / Pelatihan Informal
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan UMKM
 - g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
 - Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
 - h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan
 - Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online
 - Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Produk Kreatif dan Inovasi Unggulan Daerah (PPUD Expo)
 - Desiminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal

- Kegiatan Explore Bangka Belitung
- Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM
- i. Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
 - Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)
 - Pelatihan Business Plan (DAK)
 - Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)
 - Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)
 - Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK)
 - Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)
 - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
 - Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan (DAK)
 - Pelatihan Achievement Motivation Training (DAK)
- j. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah
 - Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi)
 - Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Koperasi

NO	PROV/KAB/KOTA	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	Bangka	162	45	207
2	Belitung	127	55	182
3	Kota Pangkalpinang	79	40	119
4	Kab. Bangka Barat	100	14	114
5	Kab. Bangka Tengah	81	58	139
6	Kab. Bangka Selatan	77	9	86
7	Kab. Belitung Timur	59	46	105
8	Prov. Kep. Bangka Belitung	29	15	44
	Jumlah	714	282	996

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO	PROV/KAB/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL JUMLAH UMKM
1	Kab. Bangka	33.197	18.741	62	52.000
2	Kab. Belitung	16.559	259	63	16.881
3	Kota Pangkalpinang	15.923	10.864	718	27.505
4	Kab. Bangka Barat	14.511	8.193	27	22.731
5	Kab. Bangka Tengah	20.464	1.037	14	21.515
6	Kab. Bangka Selatan	36.830	10.246	46	47.122
7	Kab. Belitung Timur	9.307	932	21	10.260
	Jumlah	146.791	50.272	951	198.014

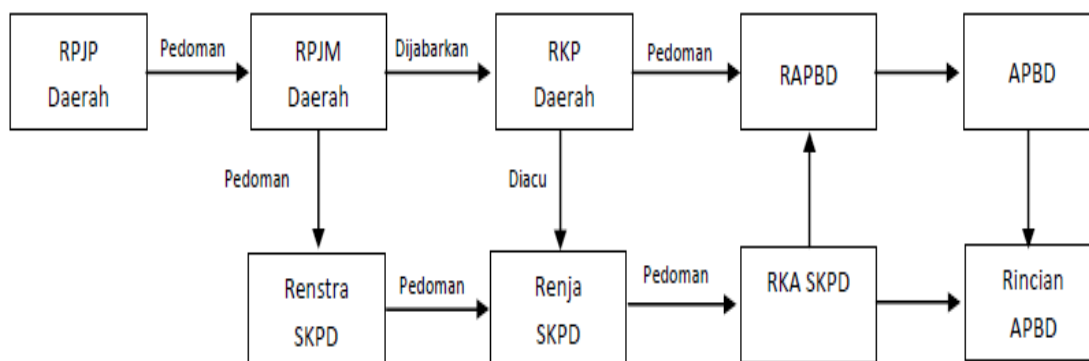
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	34	-	34
		Gol. II	10	-	10
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	6	-	6
		S1	29	-	29
		D. IV	-	-	-
		D. III	8	-	8
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	13	-	13
		Fungsional:			
		Tertentu	1	-	1
		Umum	30	-	30
TOTAL			50	-	50

5. Alokasidan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.748.138.864,00	1.727.170.000,00	6.023.841.600,00	392.073.000,00	13.891.223.464,00	13.199.835.292,00	95,02	DISKOPUKM

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		Bangunan gedung kantor dinas maupun UPTD belum memiliki landscape dan pagar

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan suatu kegiatan terpadu antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ketidaksinkronan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat menyebabkan pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah tidak menunjukkan hasil yang berarti.
- Dukungan pendanaan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usahakecil dan menengah.

Solusi

- Sinkronisasi program kegiatan sesuai kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat merupakan suatu keharusan agar pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat berhasil dengan baik.
- Pemerintah kabupaten/kota seyogyanya mengalokasi dana yang cukup untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro dan koperasi yang menjadi kewenangannya.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang melaksanakan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah
- b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan PD
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan PD
- h. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. Program Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
 - Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap tindak Kekerasan
 - Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak
 - Pembinaan Partisipasi Hak Anak
 - Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak
 - Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
 - Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak
- j. Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga
 - Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana (Fasilitasi KB Muspida)
 - Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga (HARGANAS)
- k. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Rakor Administrasi Kependudukan
 - Pendayagunaan Data Kependudukan
 - Pengembangan Bank Data Kependudukan

- Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Babel
- Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (DAK)
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan (DAK)
- Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-Elektronik di Kab/Kota (DAK)
- Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat 8 indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014.

Indikator yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sampai dengan tahun 2014 sebesar 100%.
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS sebesar 100%.
3. Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%.
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 75%.
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 80%.
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 50%.
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 50%.
8. Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%.

**PENCAPAIAN INDIKATOR SPM
 BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN 2011			PENCAPAIAN 2012			PENCAPAIAN 2013			PENCAPAIAN 2014			PENCAPAIAN 2015		
			X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL	X	Y	HASIL
I	Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	207	207	100%	219	219	100%	87	87	100%	10	10	100%	80	80	100%
II	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT di RumahSakit	5	5	100%	42	42	100%	47	47	100%	51	51	100%	25	25	100%
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	6	6	100%	56	56	100%	209	209	100%	13	13	100%	0	40	0%
		4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	32	32	100%	26	26	100%	0	0	0%	38	38	100%	38	38	100%
IV	Penegakan dan Bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	6	6	100%	4	4	100%	0	0	0%	141	141	100%	107	107	100%

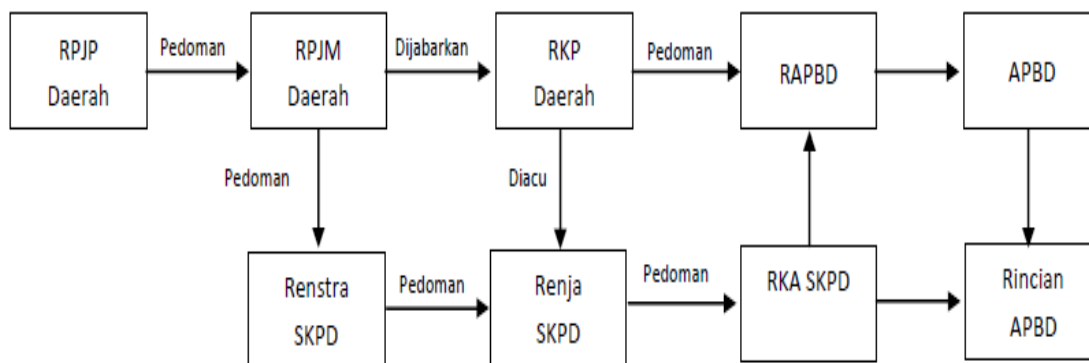
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	6	-	6
		Gol. III	35	-	35
		Gol. II	7	-	7
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	7	-	7
		S1	29	-	29
		D. IV	1	-	1
		D. III	4	-	4
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	15	-	15
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
		Umum	22	-	22
JUMLAH TOTAL			48	-	48

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
515.485.443,00	1.602.425.000,00	4.531.237.400,00	110.621.000,00	11.759.768.843,00	10.715.396.710,00	91,12	DP3ACSKB

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam pelaksanaan rapat koordinasi Pokja PUG, peserta yang seharusnya hadir adalah para eselon II, namun peserta rapat yang hadir diwakili adalah eselon III, eselon IV dan staf.
- Belum optimalnya pemanfaatan data terpilih dalam proses perencanaan dan evaluasi.
- Belum optimalnya peran organisasi sosial politik, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
- Kurang tersedianya data yang siap pakai guna mendukung capaian sasaran strategis “meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan”;
- Kegiatan yang mendukung indikator persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan masih terbatas pada kegiatan yang bersifat nasional yaitu peringatan hari ibu.
- Kebijakan yang dihasilkan baru sebatas MoU, peraturan Gubernur dan kajian akademik, seharusnya kebijakan yang dihasilkan dapat berupa Peraturan Daerah agar adanya payung hukum dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum optimalnya peranan instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- Belum optimalnya peran P2TP2A sebagai ujung tombak yang masih berfokus kepada pusat layanan, belum berperan sebagai pusat informasi dan pemberdayaan.
- Belum optimalnya kebijakan kabupaten/kota yang membentuk kota layak anak.
- Penyediaan alat kontrasepsi dari BKKBN pusat tidak sesuai dengan minat masyarakat, misalnya pil KB yang disediakan: Kimia Farma, Noride, Exultion, sedangkan masyarakat menginginkan merk andalan.
- Belum optimalnya sinkronisasi, koordinasi dan pembagian kewenangan antara DP3ACSKB dengan BKKBN.
- Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

Solusi

- Advokasi mengenai PUG secara intensif kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memperbanyak pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan peran dan fungsi pokja PUG yang sudah ditunjuk;

- Mendata kembali ke 43 SKPD untuk melihat jumlah keseluruhan SKPD yang sudah memiliki data terpilih gender;
- Advokasi secara intensif kepada Orsospol, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar berperan secara optimal dalam pembangunan pemberdayaan perempuan;
- Memberi panduan pada SKPD mengenai penyusunan dan pengumpulan data terpilah agar advokasi-advokasi yang mereka lakukan dapat lebih tajam dan terukur.
- Melakukan pendataan terkait peran perempuan, kelompok ekonomi produktif perempuan dan lainnya guna mencapai sasaran strategis “meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan”;
- Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi sekolah, organisasi profesi dan institusi media massa dalam mencapai meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan.
- Advokasi kepada legislative agar mendapat dukungan dalam menghasilkan Peraturan Daerah tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menyusun standar pelayanan (SP) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pembangian tugas yang jelas pada instansi yang terkait.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat berjalan optimal.
- Peningkatan kapasitas P2TP2A sebagai pusat layanan, pusat informasi dan pemberdayaan.
- Optimalisasi kebijakan dan percepatan pembentukan kabupaten/kota layak anak.
- Usulan kegiatan tahun berikutnya agar lebih prioritas dalam mencapai sasaran berupa kegiatan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang meliputi: sosialisasi, advokasi, rapat koordinasi dan pembinaan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan menyediakan alat kontrasepsi sesuai minat masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat.
- Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang melaksanakan Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Koordinasi, Konsultasi ke dalam Daerah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BLKI
- Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Hyperkes
- Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPPD
- Penyediaan makanan dan minuman Tamu dan Rapat
- Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi
- Pameran Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Rehab gedung kantor UPTD Hyperkes
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Sosialisasi Database Ketenagakerjaan
 - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- e. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek
 - Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan
 - Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat Pembahasan UMP, Survey KHL dan Sosialisasi Upah Minimum
- f. Program Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan
 - Pemeriksaan Cholinestrase pada Tenaga Kerja Penyemprot Pestisida (UPTD Hyperkes)
 - Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS
 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Sektor UMKM (UPTD Hyperkes)
- g. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Sertifikasi Tenaga Kerja
 - Pembinaan Desa Produktif
 - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Kab/Kota
 - Pelatihan Kewirausahaan Produktif
- h. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna

- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi
- j. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi
 - Gema Hari Bhakti Transmigrasi
 - Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Capaian 2017
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70,9%
		2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	61,25%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	8,31%
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	84,06%
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Besaran pemeriksaan perusahaan	64,12%
		2 Besaran pengujian peralatan di perusahaan	51,90%

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

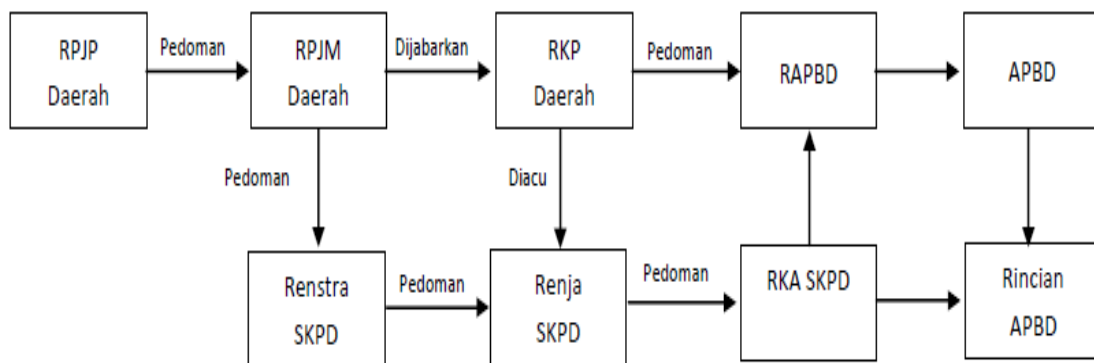
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	95	-	95
		Gol. II	18	-	18
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	6	-	6
		S1	94	-	94
		D. IV	-	-	-
		D. III	9	-	9
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	12	-	12
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan	Struktural:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
	Jabatan	Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	15	-	15
		Fungsional:			
		Tertentu	68	-	68
		Umum	32	-	32
JUMLAH TOTAL			121	-	121

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.788.514.087,00	2.827.130.000,00	6.585.283.300,00	430.635.000,00	23.631.562.387,00	22.367.096.298,00	94,65	DISNAKER

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Kurangnya koordinasi antara bidang- bidang teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Solusi

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang melaksanakan Urusan Wajib Ketahanan Pangan adalah Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat – Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan dan Pelatihan Formal
 - d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
 - Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
 - Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
 - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
 - Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan
 - Operasional Dewan Ketahanan Pangan
 - Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman
 - Operasional OKKPD
 - Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan
 - Pengkajian Makanan Tradisional
 - Pengembangan Pangan Lokal
 - Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani
 - Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan
 - Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

- Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

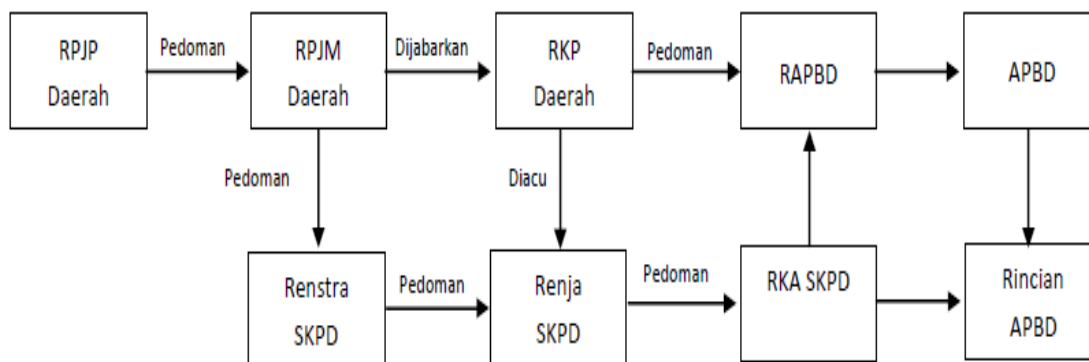
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Urusan Pangan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), tidak ada Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	26	-	26
		Gol. II	4	-	4
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1		1
		S2	7		7
		S1	22		22
		D. IV	1		1
		D. III	4		4
		D. I	-		-
		SMA/ sederajat	3		3
		SMP/ sederajat	-		-
		SD/ sederajat	-		-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	9	-	9
		Fungsional:	-	-	-
		Tertentu	4	-	4
		Umum	20	-	20
JUMLAH TOTAL			38		38

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.480.245.312,14	864.740.000,00	4.903.607.400,00	239.131.000,00	9.622.983.712,14	9.164.107.512,00	95,23	Dinas Pangan

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	✓		Belum memiliki bangunan kantor

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Beberapa kegiatan bantuan sosial yang dianggarkan pada anggaran induk 2017 tidak dilaksanakan karena terkendala aturan pelaksanaan, yaitu bahwa kelompok penerima bantuan sosial harus berbadan hukum, sementara hal tersebut sulit dilaksanakan karena kelompok penerima bantuan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan adalah kelompok yang anggotanya adalah masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, sehingga apabila ada pembiayaan dalam pengurusan badan hukum kelompok penerima bantuan menjadi permasalahan bagi kelompok dan tidak ada penganggangan terkait hal tersebut di penganggangan kegiatan.
- Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena anggaran terbatas.

Solusi

- Perlu evaluasi ulang regulasi terkait kewajiban kelompok penerima bantuan sosial untuk berbadan hukum

Urusan Wajib Perhubungan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Perhubungan yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi
- Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan Partisi Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Pengumpulandan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
 - Rencana Induk Jaringan LaluLintasdanAngkutanJalanProvinsi
 - Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
 - Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung
 - Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung Timur
 - Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan
 - Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan
 - Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut
- g. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ
 - Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi
 - Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/JuruMudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 - Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi
 - Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan
 - Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan
- i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir

- Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S. Hanandjoeddin
- Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dimana target akhir pencapaian SPM adalah sampai dengan tahun 2014. Hingga saat ini belum ada rujukan aturan terbaru mengenai Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan.

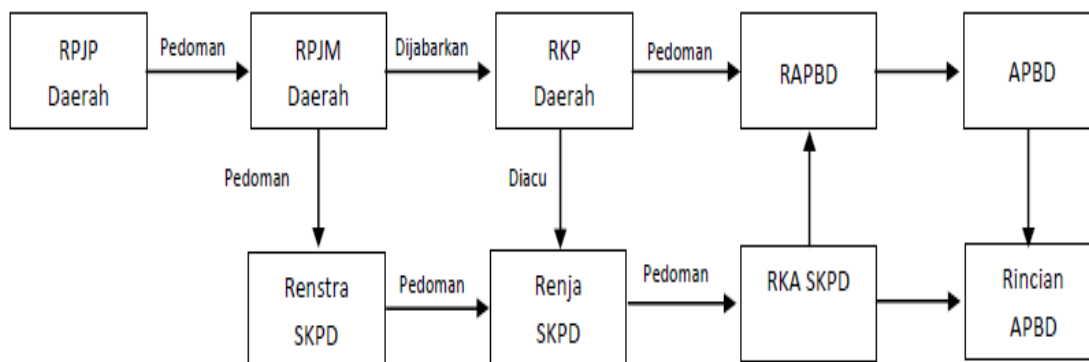
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5		5
		Gol. III	34		34
		Gol. II	15		15
		Gol. I	-		-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		-
		S2	13		13
		S1	23		23
		D. IV	3		3
		D. III	6		6
		D. II	2		2
		D. I	-		-
		SMA/ sederajat	6		6
		SMP/ sederajat	1		1
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	4		4
		Eselon IV	12		12
		Fungsional:			
		Tertentu	-		-
		Umum	37		37
JUMLAH TOTAL			54		55

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.213.740.489,00	874.500.000,00	6.218.292.950,00	17.893.522.413,26	31.200.055.852,26	29.042.908.348,77	93,09	DISHUB

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Kurangnya koordinasi antara bidang- bidang teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Solusi

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa
 - Nama kegiatan Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot
 - Pengelolaandan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-Cap)
 - Pengelolaandan Operasional Media Center ProvinsiKepulauan Bangka Belitung
 - Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio
 - Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Penguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui TVRI
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Seleksi Anggota KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah
- Pembangunan dan Pengembangan Portal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)
- Peningkatan Fungsi Pelayanan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Implementasi Aplikasi Smart Citizen
- b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan
 - Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK
 - Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 - Penilaian Jabatan Fungsional Komputer
 - Jabatan Penilaian Pranata Humas
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak Ada

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

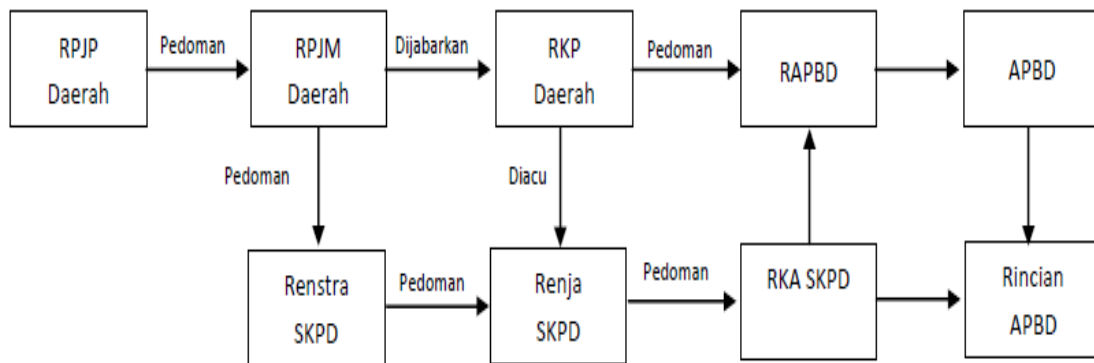
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	31	-	31
		Gol. II	10	-	10
		Gol. I			-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	2	-	2
		S2	6	-	6
		S1	22	-	22
		D. IV	-	-	-
		D. III	15	-	15
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Tertentu	12	-	12
		Umum	20	-	20
JUMLAH TOTAL			48	-	48

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.637.155.057,00	2.143.145.000,00	5.798.379.645,00	1.769.188.150,00	16.347.867.857,00	14.516.115.275,00	88,8	DISKOMINFO

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		☑	
- Adanya penambahan seksi baru dalam SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi.			

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan kurang optimal

Solusi

- Penghematan pada pelaksanaan kegiatan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa yang melaksanakan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kant
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - Survey dan Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan peraturan Perundang-undangan
 - e. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa
 - Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan
 - Rakor BPMPD dan Institusi Desa/ Kelurahan terhadap
 - Pelatihan Bendahara dan Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaksanaan Pemahaman terhadap LKPP Desa
 - Pembinaan, Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan
 - f. Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
 - Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 - Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat

- g. Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
 - Bantuan dan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak
 - Sekolah (PMT-AS) Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu Paud
 - Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUM-DES Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa
 - Pendampingan dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa(CPPD)
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- h. Program Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG
 - Gelar Karya TTG Tingkat Nasional
 - Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir
 - Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi
 - Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyentek
- j. Program Raskintis
 - Rapat Koordinasi evaluasi dan Monev Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin
 - Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tidak Ada

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

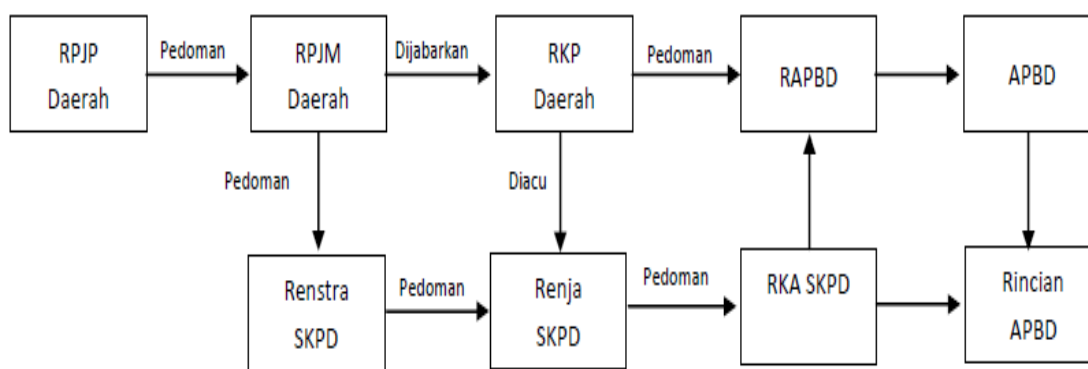
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	35	-	35
		Gol.II	8	-	8
		Gol. I		-	
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	7	-	7
		S1	32	-	32
		D. IV	-	-	-
		D. III	4	-	4
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	8	-	8
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			
		Tertentu	2		2

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Umum	32	-	32
JUMLAH TOTAL			51	-	51

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.440.309.318,00	1.673.200.000,00	19.152.713.100,00	45.571.000,00	26.311.793.418,00	25.808.334.607,00	98,09	DPMPD

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		☑	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Tidak ada permasalahan yang signifikan

Urusan Wajib Sosial

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Sosial yang melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Sosial

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
 - Pengadaan tempat parkir
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinsos
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - Penyuluhan Sosial
 - Pemuktahiran data dan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial
 - Pemetaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (adopsi desa sosial/ADES)
 - Pendampingan dan penyelesaian kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM)
- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Perlindungan sosial korban bencana alam
 - Perlindungan sosial korban bencana sosial
 - Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
 - Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - Pendampingan dan dukungan program keluarga harapan (PKH)
- g. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - Pemberdayaan keluarga
 - Pelestarian dan peningkatan kualitas taman makam pahlawan (TMP)
 - Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
 - Peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSAN)
 - Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

- h. Program Rehabilitasi Sosial
 - Pelayanan sosial lanjut usia
 - Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak
 - Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza
 - Pelayanan psikososial bagi PMKS di panti sosial bina serumpun
 - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - Rehabilitasi sosial tuna sosial
 - Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja bagi warga bina sosial di PSBS
- i. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti
 - Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
 - Pengelolaan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti
 - Penyediaan dan dukungan sarana penunjang panti
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelola panti
 - Pendampingan dan pembinaan lanjutan klien
- h. Program Pembinaan dan Pendampingan
 - Advokasi dan Pemulangan Klien/warga binaan sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi, Sedang /Berat Gedung Kantor
- c. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah
- d. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**
 - Pengembangan jembatan Portable (Bailey)
 - Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- e. **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**
 - Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa
 - Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Database Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung
- f. **Program Penyediaan Logistik / Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**

- Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana
- pemeliharaan/perawatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- Pemeliharaan/Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD
- Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD
- Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat
- Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD
- Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Sosial

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	56	-	56
		Gol.II	25	-	25
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	11	-	11
		S1/D.IV	45	-	45
		D. III	14	-	14
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	19	-	-
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	17	-	17
		Fungsional:			
		Tertentu	18	-	18
		Umum	47	-	47
JUMLAH TOTAL			89	-	89

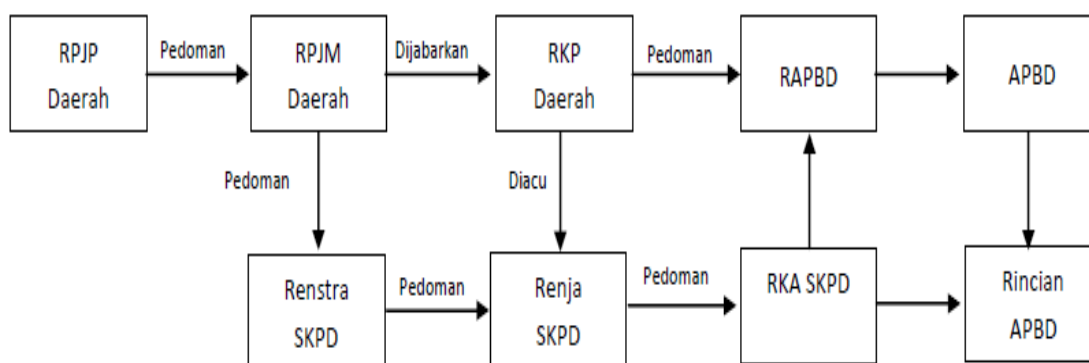
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	4	-	4
		Gol. III	19	-	21
		Gol. II	9	-	9
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	1	-	2
		S1/D.IV	23	-	22
		D. III	6	-	7
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	2	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	3	-	4
		Eselon IV	9	-	9
		Fungsional:			
		Tertentu	6	-	6
		Umum	13	-	13
JUMLAH TOTAL			32	-	32

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG ((Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.399.170.975,00	3.085.780,00	8.370.559.737,00	821.144.000,00	21.676.654.712,00	20.397.452.312,00	94,10	DINSOS
4.203.466.361,00	2.640.540.000,00	4.257.500.798,00	1.497.566.002,00	12.599.073.161,00	11.245.523.682,00	89,26	BPBD
13.602.637.336,00	2.643.625.780,00	12.628.060.535,00	2.318.710.002,00	34.275.727.873,00	31.642.975.994,00	92,32	TOTAL

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang ada pada Dinas Sosial

- Proses Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektro rmaupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
- Tidak tersalurkan secara langsung bantuan kepada keluarga miskin masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena mata pencaharian masyarakat yang bidang usahanya musiman atau bekerja dengan orang lain (sebagai buruh) sehingga tidak memungkinkan untuk dibantu dan kondisi social ekonomi masyarakat di lokasi yang terdata cenderung berubah-ubah sehingga kadang terjadi pergeseran antara data dengan kondisi real di masyarakat;
- Kesulitan dalam pengolahan data penerima manfaat ke dalam RKA dalam bentuk *by name by address by need*. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SKPD karena proses penanganan PMKS harus dilakukan sesuai standar atau petunjuk pelaksanaan;
- Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih banyak kendala yang di hadapi terutama indikator-indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai bukan dalam bentuk orang tetapi jumlah daerah yaitu 7 Kabupaten/kota;
- Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017 tidak mempunyai dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Umum selama tahun 2016

- Koodinasi dalam Lintas sektoral penanggulangan bencana belum sangat optimal baik di tingkat kabupaten dan kota.
- Masih kurangnya Keterbatasan sumber daya manusia seperti halnya pegawai yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam hal kondisi paradok yang di hadapi yang merujuk pada Tugas dan Fungsi yang di

sandang sebagai pengelola masalah kebencanaan serta tugas dan fungsi lainnya belum dapat diandalkan.

- Penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum semuanya teregulasi.
- Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana (APBD).
- Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak optimalnya koordinasi apabila terjadi bencana di daerah tersebut.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan solusi sebagai berikut :

- Perlu diadakannya rapat koordinasi lintas sektoral penguatan kelembagaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana.
- Mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen dan pindahan dari unit kerja lainnya yang memiliki kemampuan memadai yang sesuai dengan kebutuhan serta mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur mealalui latihan dan pendidikan baik di bidang penanggulangan bencana dan bidang teknis lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait secara intensif untuk menimalisasi kesalahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan-peraturan dan perundang-undangan lainnya.
- Mensosialisasikan masalah kebencanaan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota baik di selenggarakan oleh daerah maupun pusat.
- Mensinergikan penanganan masalah penanggulangan bencana melalui program dan anggaran APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/Kota.
- Melakukan sosialisasi secara intens ke Kabupaten/Kota untuk segera membentuk BPBD di kabupaten/kota.

Urusan Wajib Bidang Budaya

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Budaya yang melaksanakan Urusan Wajib Budaya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Koordinasi. Konsolidasi ke Dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Bangka Belitung
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
 - Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata
- f. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal
 - Peningkatan Pelestarian Tradisi
- g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)
 - Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya
- h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumband Serumpun Sebalai)
 - Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya)
- h. Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa
- i. Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Sejarah
 - Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Sejarah
- j. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah
 - Pendukung Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah berubah menjadi Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah
- k. Program Pemasaran Pariwisata
 - Pelaksanaan Expo Pariwisata Dalam Negeri
 - Peningkatan Konvensi, Insentif even dan minat khusus (Dukungan Event Promosi Pariwisata)
 - Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)
 - Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)

- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
 - Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder Pariwisata)
 - Publikasi Tahun 2016
 - Fasilitasi dukungan Even Gerhana Matahari Total berubah menjadi Penyelenggaraan Even Gerhana Matahari Total
- I. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (lomba Pokdarwis dan desa wisata)
 - Pengembangan usaha dan produk pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)
 - Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona)
 - Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
 - Festival Belitung
- m. Program Pengembangan Kemitraan
- Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
 - Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)
- n. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Festival Laskar Pelangi
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak ada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

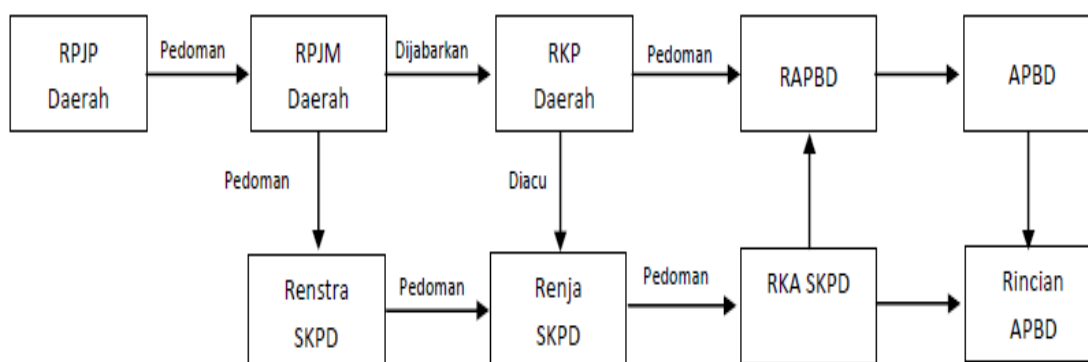
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	5	-	5
		Gol. III	44	-	44
		Gol. II	7	-	7
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	15	-	15
		S1	27	-	27
		D. IV	1	-	1
		D. III	9	-	9
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	4	-	4
		SMP/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	15	-	15
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
Umum	31	-	31		

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
JUMLAH TOTAL			56	-	56

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG ((Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.444.143.859,00	1.332.725.000,00	13.929.966.100,00	421.131.000,00	22.127.965.959,00	17.893.775.710,00	80.86	DISBUDPAR

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Diperlukannya tersedia gedung kantor yang representatif dalam melaksanakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsi dan didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Urusan Wajib Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

- Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan yang melaksanakan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Program dan Kegiatan
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyedia Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Rapat Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
 - Sewa Gedung Kantor
 - Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Penelusuran dan Pendataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota
 - Penelusuran dan Pendataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota
- f. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
- g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip
 - Pameran Arsip Statis Prov. Kep. Bangka Belitung
 - Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
 - Penilaian Angka Kredit Arsiparis
 - Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota
 - Sosialisasi Peraturan Kearsipan
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan
 - Pelaksanaan Penerapan e-Arsip
 - Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
- i. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - Pelayanan Perpustakaan Keliling
 - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
 - Pengembangan Minat dan Budaya Baca

- Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)
- Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung
- Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan
- Penilaian Angka Kredit Pustakawan
- Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka
- Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah
- Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitaan Daerah
- Pengelolaan Layanan Website
- Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak ada Standar Pelayanan Minimal

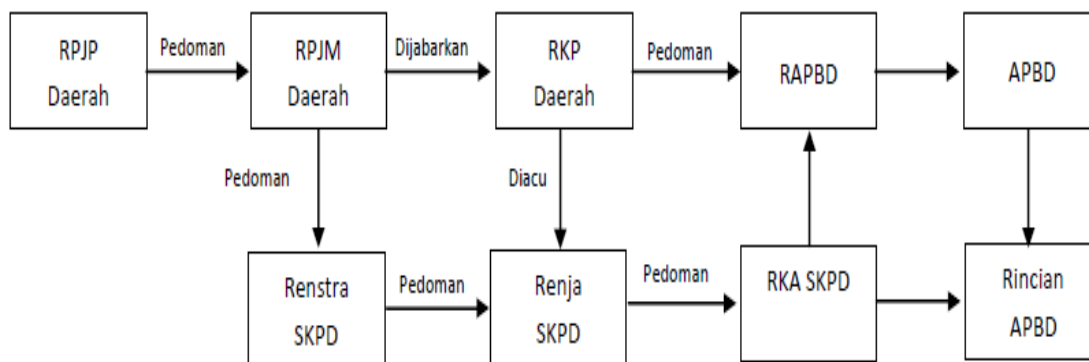
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	38	-	38
		Gol. II	14	-	14
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	8	-	8
		S1	28	-	28
		D. IV	-	-	-
		D. III	15	-	15
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	8	-	8
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			
		Tertentu	23	-	23
		Umum	19	-	19
JUMLAH TOTAL			59	-	56

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG ((Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.511.585.917,42	1.427.530.000,00	4.010.551.650,00	257.646.000,00	12.207.313.567,42	10.677.990.658,00	80.86	DPK

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	√	-	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan sarana dan prasarana yang masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal gedung kantor yang sampai saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum memiliki gedung kantor yang layak.

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Permasalahan

- Belum adanya gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
- Kurangnya Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dari perpustakaan dan sadar arsip.

Solusi

- Mengusulkan untuk membangun gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan DEPO Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
- Mengembangkan Motivasi dan kreativitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola perpustakaan dan arsip melalui lomba-lomba, pembinaan dan bimtek-bimtek.

b. Ringkasan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan makan dan minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
 - Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTDBBIAP Tanjung Krasak
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur
 - Penilaian Angka Kredit
 - d. Program Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK)
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK)
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK)
 - Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali

- Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
 - Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
 - f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
 - Pengolahan data statistik perikanan tangkap
 - Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan
 - Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan
 - Kajian prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk Nelayan 3 GT
 - Pilot project penggunaan energi Bayou untuk Kapal Nelayan
 - g. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Pengembangan dan pembinaan promosi serta kerjasama pemasaran hasil perikanan
 - Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
 - h. Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Perikanan
 - Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Peningkatan Fungsi BOOST Center
 - Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

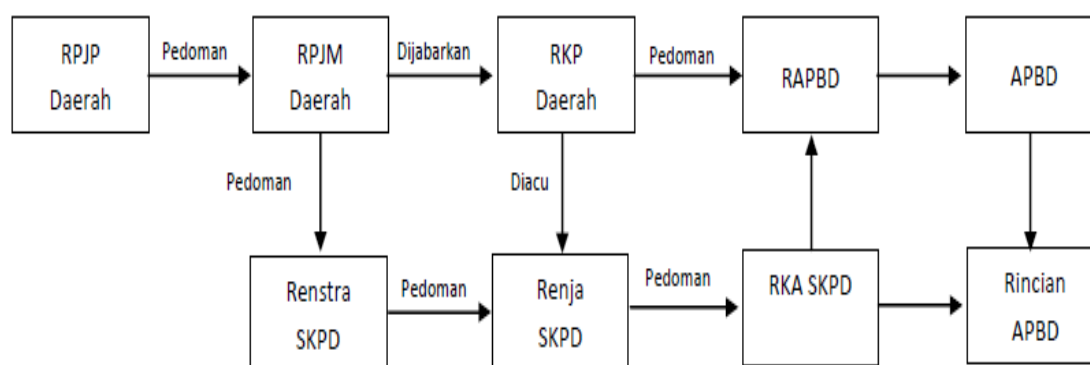
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	12	-	12
		Gol. III	78	-	78
		Gol. II	22	-	22
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	15	-	15
		S1	56	-	56
		D. IV	5	-	5
		D. III	13	-	13
		D. II	2	-	2
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	22	-	22
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	1	-	1
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	8	-	8
		Eselon IV	27	-	27
		Fungsional:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Tertentu	17	-	17
		Umum	60	-	60
JUMLAH TOTAL			113	-	113

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.381.866.651,00	2.751.555.000,00	9.590.094.600,00	3.201.919.000,00	28.925.435.251,00	22.520.492.392,00	77,86	DKP

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Penyerapan kegiatan DAK UPTD Tiga Balai Benih yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pejabat Dinas, bukan pejabat di Balai masing-masing, sehingga terkendala dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan, baik itu penyiapan dokumen lelang maupun teknis pelaksanaan lainnya.
- Selain itu pelaksanaan kegiatan juga terkendala adanya peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK 2017 harus sudah memiliki Kontrak paling lambat 31 Agustus 2017 dan setelah tanggal tersebut menjadi tanggungjawab APBD untuk membayarnya.
- Pembayaran Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termin ke III yang tidak dapat dibayar penuh kepada

pihak ketiga, hal ini disebabkan pekerjaan melewati tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 18 Desember 2017. Sedangkan pada syarat khusus kontrak, pembayaran termin ketiga berupa laporan akhir yang sudah dikonsultasi tekniskan di KKP pada tanggal 21 Desember 2017. Disamping itu pada draft laporan akhir belum ada kesepakatan terhadap alokasi ruang karena konsultasi public baru dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017.

- Terdapat dua kegiatan prioritas pada APBD Perubahan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pilot Project penggunaan mesin tempel alternatif non bbm dan gas ukuran mesin 5 PK untuk kapal nelayan dan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu untuk Kapal Nelayan. Dua kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey di lapangan tidak ada satu pun distributor, supplier, toko atau agen yang menyediakan atau ada persediaannya. Untuk pengadaan barang tersebut harus memesan terlebih dahulu.

Solusi

- Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai di Tahun 2017;
- Menempatkan orang yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik;
- Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembayaran Termin ketiga kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diajukan kembali pembayarannya melalui APBD Perubahan 2018.
- Untuk pengadaan pilot project yang tidak umum (barang – barang) yang sulit dicari di pasaran akan dianggarkan kembali pada APBD Induk agar cukup waktu untuk melaksanakannya.

Urusan Pilihan Pertanian

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian yang melaksanakan Urusan Pilihan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsultasi ke dalam daerah
 - Operasionalisasi Balai Proteksi Tanaman

- Operasionalisasi Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
 - Peningkatan fungsi Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan
 - Operasionalisasi Balai Benih Pertanian
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pembangunan Renovasi UPTD Balai Diklat Pertanian serta sarana pendukung (DAK)
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penilaian Angka Kredit
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Data dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Penyusunan Program Penyuluh Provinsi Kep Babel
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - Keikut sertaan pada Even Penyelenggaraan PENAS
 - Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada
- f. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian/ Perkebunan
- Pengembangan Pamasaran Hasil Perkebunan
 - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak
 - Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada
- h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
- Sertifikasi Bibit Pertanian/ Perkebunan
 - Pengawasan Peredaran Benih
 - Penilaian Kultivar / Varietas Unggul Lokal Daerah Intensifikasi Tanaman Lada
 - Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi
 - Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
- j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Demplot Integrasi Sapi-Jagung
 - Peningkatan Produksi Peternakan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

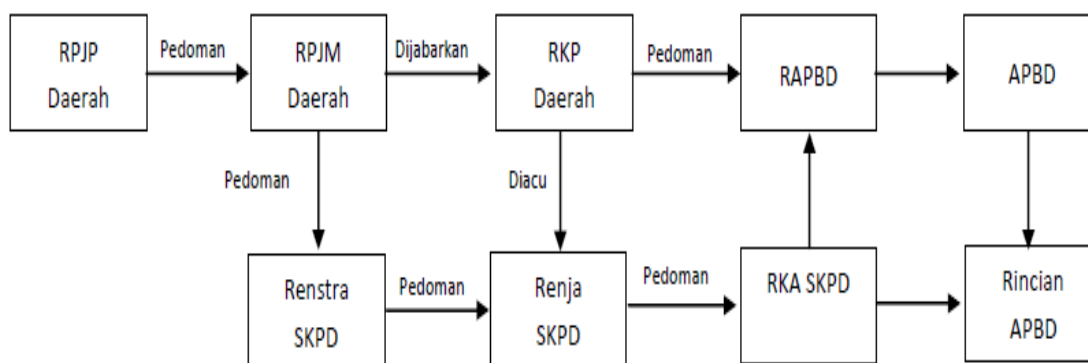
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10	-	10
		Gol. III	95	-	95
		Gol. II	29	-	29
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	14	-	14
		S1	78	-	78
		D. IV	6	-	6
		D. III	17	-	17
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	19	-	19
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	8	-	8
		Eselon IV	24	-	24
		Fungsional:			
		Tertentu	41	-	41
		Umum	61	-	61
JUMLAH TOTAL			135	-	135

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.651.816.398,50	4.762.940.000,00	14.077.754.750,00	3.620.376.000,00	38.112.887.148,00	32.348.305.154,00	77,86	Dinas Pertanian

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peternak dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak adalah pengetahuan tentang aplikasi penggunaan fasilitas pengolahan limbah ternak yang dimiliki oleh peternak yang masih kurang.
- Masih rendahnya sumber pakan ternak sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi.
- Masih terbatasnya petugas medis veteriner dan paramedis veteriner di tingkat kabupaten/kota.
- Kurangnya gudang penampungan alat dan mesin pertanian di setiap kabupaten sehingga banyak alat dan mesin pertanian di letakkan di sawah atau di kebun.
- Musim hujan yang tinggi yang menyebabkan banyak sawah yang terendam dan hama tikus sehingga akan mempengaruhi tingkat produksi.
- Masih banyak petani merendam hasil Ladanya disembarang air sehingga mempengaruhi mutu Lada.

Solusi :

- Diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan peternak agar fasilitas yang sudah ada dapat dipergunakan dengan baik.
- Memformulasikan pakan yang berkualitas gizi yang tinggi dan pencarian pakan alternatif yang ada dilokasi setempat guna menekan biaya produksi.
- Perlu adanya penambahan petugas medis veteriner dan paramedis veteriner di tingkat kabupaten/kota.
- Penyediaan gudang alat dan mesin perlu dibangun untuk penyimpanan alat pertanian.
- Perlu dilakukan perbaikan irigasi untuk mengendalikan air yang tinggi di sawah dan perlu dilakukan pengendalian hama oleh petugas.
- Penyediaan bak perendam yang layak bagi petani

Urusan Pilihan Kehutanan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Kehutanan yang melaksanakan Urusan Pilihan Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Koordinasi, Konsolidasi dalam daerah
- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPT KPH
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- e. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
 - Pengembangan Gaharu
 - Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri
 - Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
 - Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
 - Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan
- f. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD)
 - Penanaman dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
 - Pucak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- g. Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Peningkatan Fungsi Polisi Hutan
 - Penilaian Lomba PKA Wana Lestari
 - Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan
 - Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi
 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Inventarisasi Ekosistem Esensial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- h. Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan
 - Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Monitoring dan Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
 - Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
 - Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan
 - Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan
 - Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan
 - Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH
 - Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia
 - Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)

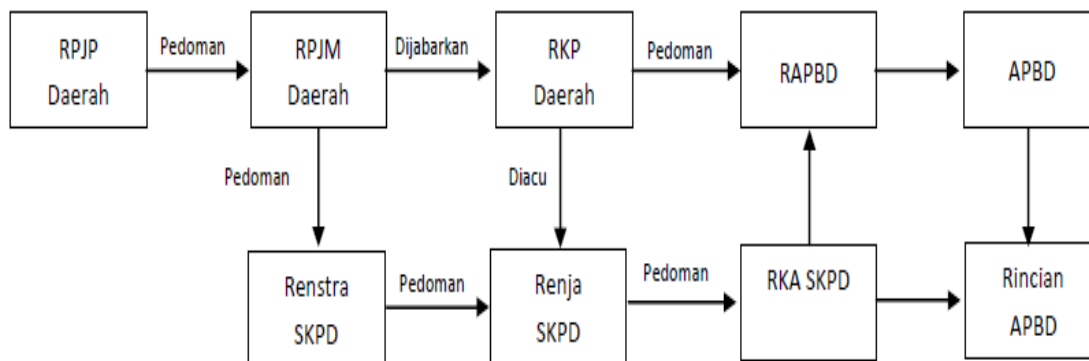
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	15	-	15
		Gol. III	106	-	106
		Gol.II	32	-	32
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	10	-	10
		S1	94	-	94
		D. IV	-	-	-
		D. III	15	-	15
		D.II	2	-	2
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	32	-	32
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	12	-	12
		Fungsional:			
		Tertentu	61	-	61
		Umum	75	-	75
JUMLAH TOTAL			153	-	153

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.655.472.721,00	1.451.880.000,00	7.895.386.000,00	45.000.000,00	27.047.738.721,00	23.871.131.145,00	88,26	DISHUT

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
√			

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang ada menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan kehutanan secara optimal sehingga didapatkan pengaruh semakin membaiknya kualitas sumber daya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumber daya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatnya upaya – upaya rehabilitasi. Indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian daerah berupa Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan kehutanan tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kabupaten/kota tidak menyelenggarakan urusan kehutanan namun

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, yang berakibat pengalihan pegawai, asset dan perlunya dibentuk lembaga di tingkat kabupaten/kota.

- Pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam, karena wisata alam dan jasa lingkungan belum maksimal dijadikan aset dalam *eco tourism* sebagai pendukung destinasi wisata;
- Rehabilitasi hutan dan lahan, dikarenakan cukup luasnya lahan kritis yang ada belum diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai;
- Pengembangan Perhutanan Sosial (PS) dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) terkendala proses perijinan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Provinsi berperan dalam fasilitasi;
- Kurangnya sumber daya manusia untuk tenaga fungsional PPNS, Polisi Hutan dan Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini masing – masing tenaga fungsional tersebut hanya ada 1 (satu) orang pegawai;
- Adanya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan selain kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan dan telah dilaksanakan dalam angka waktu lama, dan merupakan permasalahan social budaya dalam penetapan kawasan hutan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;

Untuk menanggulangi kendala dan permasalahan di atas telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.797/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bentuk UPTD dipilih karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Memberikan dukungan terhadap kegiatan pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan dan mengajukan usulan kegiatan terkait pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan.
- Melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada lokasi pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan dan IPPKH untuk fasilitas umum (jalan).
- Sosialisasi dan pendampingan ke kabupaten dalam rangka Perhutanan Sosial (PS) melalui skema : Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan mendorong pemegang IUIPHHK-HTI untuk melaksanakan Kemitraan Kehutanan (KK).
- Pengusulan penambahan pegawai untuk tenaga fungsional PPNS, Polisi Hutan dan Penyuluh Kehutanan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Sektor Kehutanan yang bertujuan untuk : memberikan **kepastian hukum** atas penguasaan tanah (kepemilikan atau akses legal bukan bentuk kepemilikan) oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan **sengketa dan konflik** dalam kawasan hutan;
- Meminta bantuan sarana dan prasarana pengamanan hutan, serta pelaksanaan penegakan hukum kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

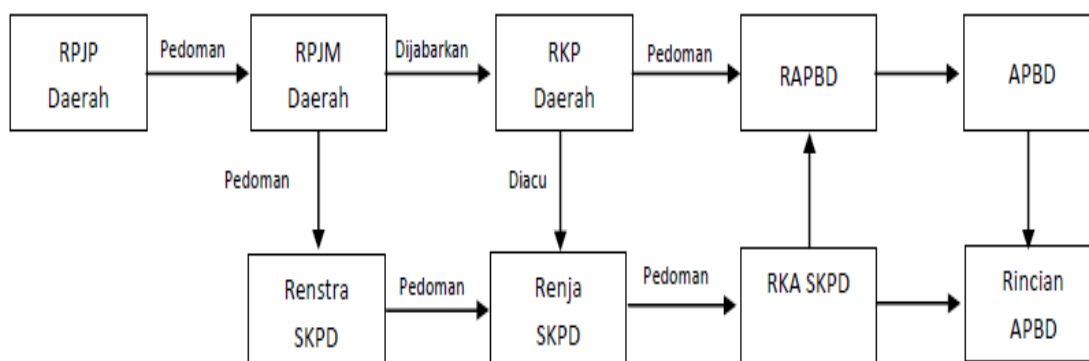
1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPTD
 - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Percetakan Peta
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - Pembangunan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung
 - Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Prov. Kep. Bangka Belitung
 - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)
 - Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar diProv. Kep.Bangka Belitung
 - Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik
 - Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10	-	10
		Gol. III	86	-	86
		Gol. II	12	-	12
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	10	-	10
		S1	76	-	76
		D. IV	-	-	-
		D. III	9	-	9
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	12	-	12
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	3
		Eselon IV	15	-	12
		Fungsional:			
		Tertentu	21	-	55
		Umum	66	-	98
JUMLAH TOTAL			108	-	108

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.200.137.983,00	998.280.000,00	4.679.501.000,00	3.503.910.000,00	21.381.828.983,00	19.243.683.769,00	90,00	ESDM

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- Terbatasnya SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi dan kurangnya fasilitas operasional yang mendukung, yang berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan kekurangan personil semakin banyak.
- Adanya benturan kewenangan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan.
- Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
- Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.
- Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
- Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
- Perusahaan yang menawarkan lelang dalam pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tidak ada yang lolos verifikasi oleh Tim Pokja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit.
- Tidak adanya Tim peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Defisit Anggaran / Rasionalisasi Anggaran pada tahun 2017 sehingga total Alokasi Anggaran yang semula Rp. 23.610.380.769,00 setelah perubahan menjadi Rp. 21.381.828.983,00 atau berkurang Rp. 2.228.551.786,00.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah dan menambah jumlah fasilitas operasional yang dapat mendukung berjalannya program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
- Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.
- Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
- Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
- Perusahaan yang mengikuti penawaran lelang semua harus melengkapi dokumen-dokumen dalam lelang.
- Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Harus adanya Kegiatan Peningkatan pelayanan Perizinan/Rekomendasi di Bidang Usaha Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar adanya Tim
- Aktif berkoordinasi dengan TAPD dan instansi terkait untuk memperkecil dampak dari rasionalisasi / pengurangan anggaran sehingga target capaian kinerja dinas bisa tercapai dengan baik.

Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan yang melaksanakan Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP
 - Sertifikasi Halal, Haki dan Uji Nutrisi dan Penyuluhan keamanan untuk PIRT
 - Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah
 - Promosi Produk IKM di event nasional
 - Sosialisasi e-commerce bagi pelaku industri
 - Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan Terasi
 - Pemberdayaan Klinik Kemasan
 - b. Program Penataan Struktur Industri
 - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi
 - Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung

- Pembinaan Produk OVOP
- c. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
 - Pendataan Industri Besar/IAMT
- d. Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)
 - Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kab. Bangka
 - Pengembangan Industri berbasis gaharu (minyak atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah
- e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan
 - Rumah Rajutan
 - Gelar Produk Kerajinan
 - Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata
 - Sekretariat Dekranasda

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

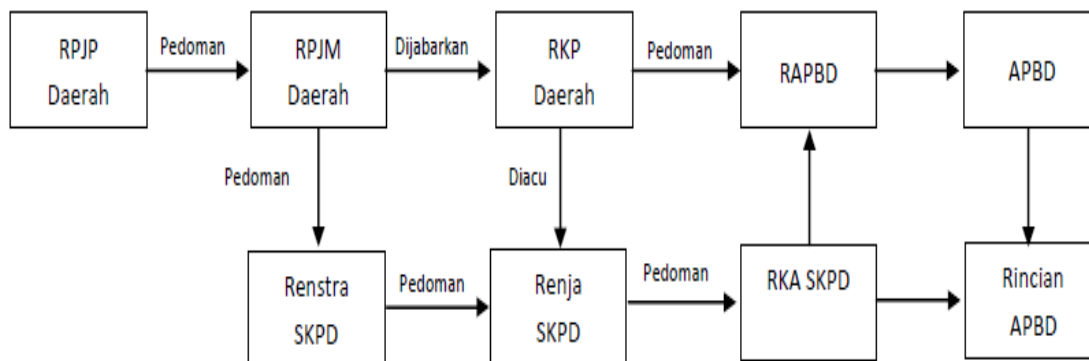
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	9	-	9
		Gol. III	63	-	63
		Gol. II	25	-	25
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	13	-	13
		S1	47	-	47
		D. IV	-	-	-
		D. III	18	-	18
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	19	-	19
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	18	-	18
		Fungsional:			
		Tertentu	15	-	15
		Umum	57	-	57
JUMLAH TOTAL			97	-	97

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.640.113.464,00	1.614.700.000,00	6.408.152.856,00	2.165.413.000,00	20.828.379.320,00	19.653.708.827,00	94,36	DISPERINDAG

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
	√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan Lab belum mencukupi ▪ Kendaraan operasional masih kurang; ▪ Peralatan dan perlengkapan gedung kantor belum mencukupi

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Untuk Urusan Industri. Adanya kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan ketidaksesuaian dengan peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang tata cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Solusi

- Untuk selalu mempedomani Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2016 dalam melakukan Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran yang bersifat pemberian bantuan barang produksi kepada masyarakat dan pelaku industri

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)

Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya)

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya) yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya) adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat-menyurat
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor
 - Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
- d. Program Pengembangan Data/ Informasi

- Penyusunan basis data provinsi Kep. Bangka Belitung
- Instalasi dan implementasi aplikasi geoportal pada simpul jaringan nasional
- Forum data Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
- e. Program Kerjasama Pembangunan
 - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
- f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
- g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencana
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
 - Penyusunan RKPD
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Penyusunan Rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Penyusunan KUA, PPAS
 - Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
 - Penyusunan RPJMD 2017-2022
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
 - Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
- j. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
 - Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan kependudukan
- k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup
- l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Koordinasi Penyelenggaraan tata ruang
- m. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - Perencanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- n. Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah
 - Kajian kebijakan pembangunan daerah penguatan sistem inovasi daerah

Badan Keuangan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- Penyediaan Makanan Dan Minuman;
 - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian Pns Skpd Dilingkungan Prov.Kep.Babel;
 - Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang;
 - Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan /Rutin Berkala Taman,tempat parkir dan halaman kantor.
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Gubernur tentang perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak;
 - Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD;
 - Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2017;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIPKD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
 - Rakor dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA.
- d. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
- Evaluasi Raperda Kab/Kota Tentang APBD dan Perubahan APBD 2017;
 - Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah;
- Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
 - Sosialisasi Permendagri tentang pedoman Barang Milik Daerah;

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
- f. Program Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lain-lain;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan sistem informasi Pajak Daerah;
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling;
 - Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait;
 - Penyusunan Pergub tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB;
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - Rapat Kerja Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pengelolaan Website
 - Koordinasi dan Konsolidasi Ke dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional
 - Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural
 - Kegiatan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Pembuatan Buku Profil Kepegawaian

- Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian
 - Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
 - Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
 - Kegiatan Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian
 - Kegiatan Penerbitan Buletin Kepegawaian
 - Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
 - Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP
 - Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas
 - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran
 - Pembuatan Buku Profil Kepegawaian
- e. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
- Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis
 - Kegiatan Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat
 - Kegiatan Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota
 - Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar
 - Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaswara
 - Kegiatan Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
 - Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017

- Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Inspektorat Provinsi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Makanan dan minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir
- c. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
 - Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR
 - Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online
 - Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)

Sekretariat Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan.
 - Kegiatan rumah dinas Gubernur
 - Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenvil)
 - Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan mobil jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan
 - Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemrov. Kep.Babel
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemerintah Provinsi
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Sosialisasi dan Pengelolaan PPID

- Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
- Pemberdaya Pengguna Jasa Konstruksi
- Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Publikasi dan Siaran
 - Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)
- g. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
 - Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - Rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati Walikota se-Prov. Kep. Bangka Belitung
 - Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Prov. Kepulauan Bangka Belitung
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel
 - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah
- h. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota
 - Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kab/Kota
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Verifikasi dan Validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintahan Daerah Lainnya dan BUMN
 - Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah
 - Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah
 - Appraisal peruntukan museum dan ruang terbuka hijau
- j. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik Rakernas LPSE
 - Sinkronisasi Percepatan Pembangunan
 - Koordinasi Sistem E - Monev
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP
 - Koordinasi Penyusunan RENSTRA/ Revisi RENSTRA, Renja/Revisi Renja dan Penyusunan Anggaran
- k. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- l. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI
 - Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan
 - Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah

- m. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
 - Sosialisasi Perda
 - Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota
 - Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Publikasi Produk Hukum Daerah di Media
- n. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama
 - Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan
 - Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pada Hari Jumat
 - Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
 - Pendampingan Jamaah Haji Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji
 - Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat
- o. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan
 - Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan
 - Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah
 - Kegiatan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
 - Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Kegiatan Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD
 - Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Tepadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (samsat pangkalpinang)
 - Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja
 - Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Verifikasi dan alidasi (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada

- Koordinasi Penyelenggaraan Pilgub 2017
- Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Koordinasi Program CSR
- Koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung
- Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Forum Koordinasi dan Pengaturan Tata kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Koordinasi Monev Bagian Perekonomian dan Koperasi
- Koordinasi Monev Potensi Investasi 7 (tujuh) kab/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Monitoring Evaluasi Serta Koordinasi Bidang Produksi Daerah
- p. Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - Simplikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota
- q. Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
 - Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2016
 - Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017
- r. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
 - Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka
 - Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- s. Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Semula "Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017" menjadi " Kegiatan review Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Pemprop Babel"
 - Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
 - Semula Validasi Analisa Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menjadi Penyusunan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kep. Babel
 - Pembinaan Bidang Analisa Jabatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semula "Validasi dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" menjadi

- Penyusunan Analisis Jabatan PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”
- Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah kab/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Rakornis Biro/Bagian Organisasi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Forum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pengadaan e-SAKIP
- t. Program Bantuan Hukum
- Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Masyarakat secara Litigasi/non Litigasi
 - Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda
 - Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat DPRD

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan jasa Perbaikan peralatan Kerja
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
 - Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - Kegiatan Penyediaan makan dan minum
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - Koordinasi, konsultasi ke dalam daerah
 - Penyediaan belanja operasional rumah tangga rumah dinas jabatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
 - Revitalisasi saluran air dan drainase pagar depan DPRD
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian kerja dan hari-hari tertentu
- d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

- Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah
- e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - Rapat-rapat Paripurna
 - Kegiatan Reses
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia
 - Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademi.
 - Koordinasi dan Konsultasi masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan
 - Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 - Kunjungan kerja Komisi
 - Kunjungan kerja Badan Musyawarah
 - Kunjungan kerja Badan Anggaran
 - Kunjungan kerja Badan Legislasi
 - Kunjungan kerja Badan Kehormatan
 - Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Inisiatif DPRD
 - f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pembahasan Anggaran Pemerintahan Prov.kep.Babel
 - Penilaian Harga Tunjangan Peumahan & transportasi Anggota DPRD Prov. Kep. Babel sisa masa bakti 2017-2019

Badan Penghubung

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
 - Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Kegiatan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pengelolaan Website
 - Koordinasi, Konsolidasi Ke dalam Daerah
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pengadaan Meubelair
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

- Keuangan
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Ajungan Prov.Kep.Babel
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan
 - Kegiatan Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep.Bangka Belitung
 - Kegiatan Parade Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / anggota Organisasi
- g. Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
 - Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokoler di JABOTABEK
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak ada SPM yang dilaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural danFungsional

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10	-	10
		Gol. III	56	-	56
		Gol.II	9	-	9
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	4	-	4
		S2	21	-	21
		S1/D. IV	40	-	40
		D. III	3	-	3
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	7	-	7
		SMP/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	13	-	13
		Fungsional:			
		Tertentu	26	-	26
Umum	29	-	29		
JUMLAH TOTAL			75	-	75

Badan Keuangan Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	19	-	19
		Gol. III	175	-	175
		Gol. II	83	-	83
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	14	-	14
		S1/D. IV	136	-	136
		D. IV	1	-	1
		D. III	58	-	58
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	68	-	68
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	13	-	13
		Eselon IV	42	-	42
		Fungsional:			
		Tertentu	11	-	11
		Umum	212	-	212
JUMLAH TOTAL			278	-	278

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	16	-	10
		Gol. III	70	-	56
		Gol. II	19	-	9
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	21	-	21
		S1	56	-	56
		D. IV	3	-	3
		D. III	11	-	11
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	13	-	13
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			
		Tertentu	40	-	40
		Umum	49	-	49
JUMLAH TOTAL			105	-	105

Inspektorat Provinsi

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	14	-	14
		Gol. III	60	-	60
		Gol. II	4	-	4
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	11	-	11
		S1	59	-	59
		D. IV	2	-	2
		D. III	2	-	2
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	4	-	4
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	4	-	4
		Eselon IV	2	-	2
		Fungsional:			
		Tertentu	52	-	52
		Umum	19	-	19
JUMLAH TOTAL			78	-	78

Sekretariat Daerah

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	67	-	67
		Gol. III	218	-	218
		Gol. II	66	-	66
		Gol. I	2	-	2
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	5	-	5
		S2	48	-	48
		S1	195	-	195
		D. IV	9	-	9
		D. III	37	-	37
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	57	-	57
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	2	-	2
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon I	1	-	1
		Eselon II	15	-	15
		Eselon III	27	-	27
		Eselon IV	80	-	80
		Fungsional:			
		Tertentu	21	-	21
Umum	209	-	209		

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
JUMLAH TOTAL			353	-	353

Sekretariat DPRD

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	2	-	2
		Gol. III	46	-	46
		Gol. II	23	-	23
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	8	-	8
		S1	39	-	39
		D. IV			
		D. III	7	-	7
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	17	-	17
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	1	-	1		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	2	-	2
		Eselon IV	6	-	6
		Fungsional:			
		Tertentu	5	-	5
		Umum	58	-	58
JUMLAH TOTAL			72	-	72

Badan Penghubung

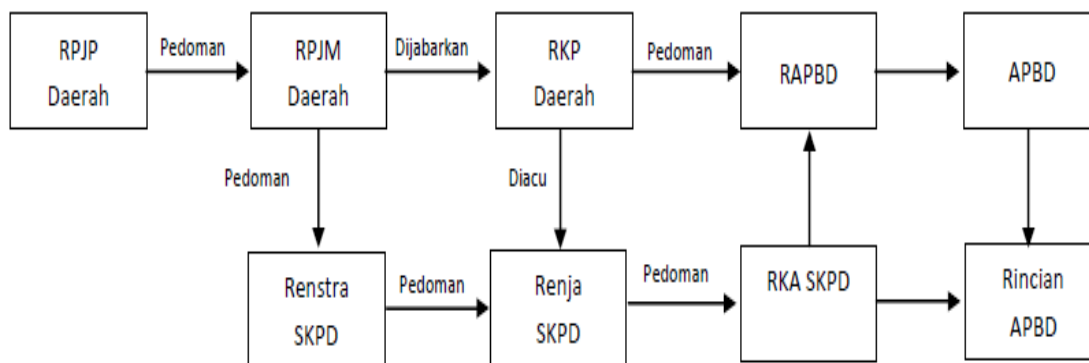
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	2	-	2
		Gol. III	24	-	24
		Gol. II	8	-	8
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	9	-	9
		S1/D. IV	15	-	15
		D. III	4	-	4
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
SD/ sederajat	-	-	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	-	-	-
		Eselon III	2	-	2

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Eselon IV	4	-	4
		Fungsional:			
		Tertentu	-	-	-
		Umum	29	-	29
JUMLAH TOTAL			34	-	34

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.718.665.272,08	3.319.180.000,00	9.045.909.900,00	1.127.992.000,00	22.211.747.172,08	19.230.671.938,65	86,58	Bappedlitbangda
47.620.772.349,45	7.048.145.000,00	13.746.595.000,00	2.208.332.000,00	70.623.844.349,45	63.381.252.604,64	89,74	BAKUDA
12.173.463.253,00	3.638.400.000,00	13.600.150.740,00	774.131.000,00	30.186.144.993,00	28.144.170.156,00	93,26	BKPSDMD
44.824.152.380,00	10.715.537.000,00	68.425.332.762,00	7.576.449.472,00	131.541.471.614,00	121.655.731.537,00	92,48	SETDA
7.879.580.517,00	4.050.605.000,00	81.962.262.370,00	2.379.261.000,00	96.271.708.887,00	77.732.343.133,00	80,74	SETWAN
3.363.699.700,00	1.270.175.000,00	5.578.228.100,00	2.456.053.200,00	12.668.156.000,00	11.715.663.039,00	92,48	Badan Penghubung
124.580.333.471,53	30.042.042.000,00	192.358.478.872,00	16.522.218.672,00	363.503.073.015,53	321.859.832.408,29	89,21	TOTAL

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada BAPELITBANGDA :

- Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
- Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan.
- Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
- Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
- Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.

Solusi

- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data.
- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan dengan melakukan pembinaan terhadap rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, rencana strategis SKPD, rapat koordinasi dan konsultasi, komparasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sosialisasi dokumen perencanaan
- Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan.
- Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Sampai sekarang jumlah pegawai - baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Masih terkendalanya permasalahan asset daerah yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas :

- Telah memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat mengisi kekurangan pegawai terutama di UPTD yang personilnya masih kurang yaitu UPTD DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan UPTD DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat dan juga adanya kekosongan jabatan Kepala UPT DPPKAD wilayah Kabupaten Bangka Barat dan Esselon IV yang ada di UPT DPPKAD wilayah Pangkalpinang.

- Solusi untuk penanggulangan asset sekarang sudah mendekati target yang hendak dicapai dengan terlibatnya Gubernur sebagai kepala daerah dengan memerintahkan setiap kepala perangkat daerah untuk lebih teliti lagi dalam hal inventarisasi asset disetiap perangkat daerah.

Permasalahan dan Solusi pada BKPSDMD

Permasalahan :

- Adanya hasil telaahan BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 800/745/BKD tanggal 29 september 2016, perihal penundaan pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Nota Dinas BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 800/147/BKD tanggal 30 September 2016 tentang pengurangan pagu anggaran dan penundaan kegiatan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara tahun 2016

Solusi

- Dianggarkan kembali tahun 2017 mengingat telah terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Sehingga dengan adanya Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai ASN akan dapat dijadikan acuan dalam menentukan dan menetapkan formasi ASN, melakukan rotasi, mutasi dan redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing unit organisasi

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Belum adanya kesepakatan batas wilayah antara kabupaten/kota khususnya kabupaten/kota yang ada di Pulau Bangka.
- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Rakor Gubernur dikarenakan rasionalisasi anggaran
- Dokumen pendukung terkait capaian kinerja untuk masing-masing urusan dari beberapa SKPD dalam penyampaian LPPD kurang lengkap
- Terdapat beberapa urusan pemerintahan yang belum disajikan capaian kinerjanya dalam LPPD, Simda Keuangan belum dapat menyajikan rincian anggaran dan realisasi SKPD per urusan.
- Adanya perbedaan capaian kinerja antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi.
- Belum diteruskannya asset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) muara Sungai Baturusa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-undang
- Belum dilaksanakannya validasi dan audit terhadap asset, dokumen dan pendanaan (P3D) beberapa urusan yang menjadi kewenangan provinsi.
- Masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat
- Minimnya dana yang tersedia.
- Lambannya hasil evaluasi Raperda tentang Pajak daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses evaluasi Raperda Kabupaten /Kota.
- Terhambatnya proses pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dalam hal ini Perda dan Pergub dikarenakan Perangkat Daerah pemrakarsa tidak menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan proses penyusunan Raperda dan Rapergub sehingga rancangan produk hukum daerah yang masuk ke Biro Hukum masih perlu untuk dilakukan penyusunan ulang.

- Kurangnya tenaga legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.
- Kurangnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah akan proses legal drafting.
- Masih kurangnya kuota Pejabat Fungsional tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Diklat Legal Drafting di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kurangnya SDM yang berkopeten di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani atau menyelesaikan sengketa pemerintah daerah baik sengketa Tata Usaha Negara maupun sengketa perdata.
- Lemahnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan hasil penyelesaian sengketa Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih dalam proses maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhambatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan laporan dan koordinasi kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kurangnya koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasioal Hak Asasi Manusia antar perangkat daerah kabupaten/kota dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sehingga dokumen Rencana Aksi Nasioal Hak Asasi Manusia kurang optimal / kurang lengkap.
- Kurangnya tenaga pranata komputer / arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional umum dalam rangka melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
- Kurangnya kuota diklat jabatan untuk kompetensi tertentu dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas di Biro Hukum.
- Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai.
- Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas.
- Belum selarasnya pelaksanaan program dengan SKPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian.
- Pengendalian, pengawasan dan koordinasi Biro Perekonomian belum optimal.
- Keterlambatan penginputan oleh Perangkat Daerah melalui petugas Admin e-Monev APBD yang melebihi tanggal 15 bulan berikutnya;
- Data realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang diinput masih berdasarkan data pada bulan sebelumnya belum bersifat data *real tim*.
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal dan sulit untuk diprediksi.
- Belum maksimalnya koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lapangan.
- Kurangnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan aparatur dan masyarakat
- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan publikasi dan siaran, sehingga kurang maksimalnya kegiatan publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Terbatasnya anggaran untuk Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID), menyebabkan belum maksimalnya fungsi PPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Solusi

- Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi kesepakatan batas wilayah antara kabupaten/kota khususnya kabupaten/kota yang ada di Pulau Bangka.
- Agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan rasionalisasi anggaran kegiatan yang menjadi prioritas.
- SKPD agar akomodatif dalam penyajian data/dokumen pendukung yang diperlukan penyusunan LPPD.
- Diharapkan perbaikan terhadap Simda Keuangan agar berbasis akrual secara keseluruhan lebih lanjut, Laporan Keuangan pelaksanaan anggaran disampaikan tepat waktu, mengingat keterlambatan Laporan sangat mempengaruhi proses evaluasi diantaranya Opini BPK.
- Agar SKPD dapat meminimalisir perbedaan capaian kinerja antara data yang disajikan dalam LPPD dan hasil evaluasi dengan cara menyajikan data yang lebih valid.
- Mengirimkan surat kepada Walikota Pangkalpinang untuk segera menyerahkan asset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) muara Sungai Baturusa ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke sesuai amanat Undang-undang.
- Mengusulkan kegiatan validasi dan audit terhadap asset, dokumen dan pendanaan (P3D) urusan yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018.
- Adanya upaya penambahan sumber daya manusia
- Adanya penambahan dana.
- Biro Hukum selalu proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh hasil evaluasi Raperda sehingga tidak menghambat pelaksanaan Perda di Kabupaten/Kota
- Biro Hukum terus berupaya melaksanakan peningkatan terhadap proses penyusunan produk hukum daerah kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga legal drafter khususnya tenaga Penyusun Rancangan undang-undang dan Analisis Hukum.
- Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar berperan aktif dalam proses penyusunan produk hukum daerah
- Biro hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penambahan jumlah kuota peserta Diklat Legal Drafting bagi Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai pemangku jabatan fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Biro Hukum terus berkoordinasi agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menambah SDM yang berkompeten dalam menangani penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata.
- Biro Hukum terus meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelesaikan sengketa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan / melalui Bagian Hukum sehingga Bagian Hukum Kabupaten/Kota memiliki dokumen penyelesaian sengketa.

- Biro Hukum terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga komputer / arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional umum untuk melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
- Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Humas dan Protokol dan Dinas Kominfo untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan hukum.
- Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar menyiapkan diklat kompetensi untuk jabatan tertentu dan biaya kontribusinya.
- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana peralatan kerja pada tahun anggaran berikutnya.
- Mengusulkan penambahan SDM
- Melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/kota secara berkala dan proaktif.
- Mengusulkan kembali alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung tupoksi Biro Perekonomian.
- Meningkatkan pengawasan, koordinasi dan pengendalian pada Biro Perekonomian.
- Dilaksanakan Rapat Pimpinan setiap bulan bersama Gubernur/ Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran kepada Pejabat Eselon II Perangkat Daerah agar data e-Monev APBD masing – masing Perangkat Daerah diinput tepat waktu;
- Melakukan koordinasi dengan Instansi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal kerja sama mendapatkan *data base* dari aplikasi SIMDA untuk menarik data secara langsung dan *real time* ke dalam aplikasi e-Monev APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diterapkan pada tahun berikutnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi/pihak penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan anggaran agar dapat mengakomodir keperluan bersifat penting dan mendesak.
- Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang sesuai dengan kondisi dilapangan.
- Melaksanakan pembinaan Internal secara berkala oleh masing-masing atasan langsung.
- Untuk memaksimalkan penyampaian informasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat melalui media massa/cetak elektronik dan IT maka perlu meningkatkan anggaran kegiatan publikasi dan siaran.
- PPID memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi mengenai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk itu perlu diperkuat selain SDMnya, perlu adanya peningkatan untuk anggaran kegiatannya.

Permasalahan pada Sekretariat DPRD:

- Minimnya SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki sertifikat Perancang Undang-undang sehingga yang selama ini selalu menggunakan SDM dari Luar.

Saran :

- Agar pihak terkait bisa menempatkan ASN yg sesuai dengan jenjang pendidikannya dan dapat mengikuti Diklat Perancang Undang-undang.

Permasalahan dan Solusi pada Badan Penghubung

Kendala dan permasalahan yang dihadapi OPD Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Mess Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kurang representatif dimana gedung Kantor dan Mess berada di daerah wilayah pemukiman penduduk dan bukan di daerah wilayah gedung perkantoran hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya peningkatan gedung sehingga menyebabkan luas bangunan yang sangat terbatas tersebut harus dibagi antara ruang Kantor Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ruang Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dari para karyawan kantor maupun dari tamu yang menginap di mess tersebut.
- Masih perlunya ditingkatkan lagi pemahaman dan dukungan bersama dari OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan arti pentingnya peran Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugasnya demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- Masih belum dimaksimalkan pemanfaatan potensi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
- Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Banyaknya SDM tetapi tidak disertai kualitas dan kinerja yang baik dari SDM itu sendiri.
- Banyaknya PNS yang pindah ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dengan berbagai macam alasan kepindahan, sementara di Kantor Badan Penghubung sendiri tenaga PNS dan PHL sudah terlampaui banyak dan ruang kerja yang sudah tidak representatif lagi dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan sementara beban kerja yang tidak terlampaui banyak menyebabkan sedikitnya pekerjaan yang dapat dibagikan kepada PNS yang ada, misalnya 1 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 1 orang dikarenakan banyaknya PNS yang ada jadi harus di bagi dan dikerjakan oleh 2 orang.
- Menurunnya prosentase tamu yang menginap di mess Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah diberlakukannya sistem *at cost* pada perjalanan dinas sehingga target retribusi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya jauh melampaui target dan meningkatnya tamu yang sakit dari daerah yang akan berobat di Jakarta dalam waktu yang cukup lama dengan kemampuan yang kurang untuk membayar sewa, sehingga mempengaruhi target pendapatan sewa.

Untuk mengatasi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Berusaha membenahi sarana dan prasarana gedung Badan Penghubung secara bertahap dan telah adanya wacana untuk pengadaan gedung dan mess Badan Penghubung di Jakarta yang baru dan lebih representatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada tamu mess Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kekayaan daerah yang ada pada Badan Penghubung di Jakarta dan pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dianggarkan untuk pengadaan pembelian lahan Badan Penghubung dan Mess Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung di Jakarta, namun sayang belum dapat terlaksana karena anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran sementara anggaran yang ada tidak mencukupi untuk membeli lahan tersebut untuk penambahan anggaran dalam anggaran perubahan tidak dapat dilakukan sehingga kegiatan pengadaan lahan tersebut dengan terpaksa di tunda terlebih dahulu dan akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

- Mengupayakan langkah-langkah peran aktif dalam membina hubungan baik dalam peningkatan kerjasama yang efektif antara Badan Penghubung dengan OPD lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh instansi dan lembaga terkait.
- Mengupayakan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif untuk pemanfaatan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di TMII antara lain dengan mempromosikan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengadakan acara pameran, pagelaran seni dan budaya daerah dalam rangka mempromosikan pariwisata dan budaya daerah masing-masing juga bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta paguyuban masyarakat daerah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
- Pengiriman SDM untuk mengikuti diklat dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan pada Tahun Anggaran 2017 telah mengganggu kegiatan dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparatur.
- Adapun upaya yang telah dilakukan adalah selain meningkatkan pelayanan, Badan Penghubung berusaha mencari sumber retribusi lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun untuk TA. 2018 karena akan adanya rehabilitasi anjungan TMII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dianggarkan kembali pendapatan atas penginapan dan anjungan.

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Urusan Pemerintahan Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Program dan Kegiatan
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah.
 - Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol.
 - Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.
 - Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara
 - Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan.
 - Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman.
 - Simulasi Penanganan Konflik.
 - Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
 - g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada.
 - Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Bagi Pelajar SLTA.
 - h. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kepercayaan Dan Sosial Budaya
 - Peningkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
 - Forum Dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah.
 - i. Program Kemitraan Kamtibmas
 - Pemetaan Daerah Rawan Konflik.
 - Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - j. Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi
 - Peningkatan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak ada Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pemerintahan Umum.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

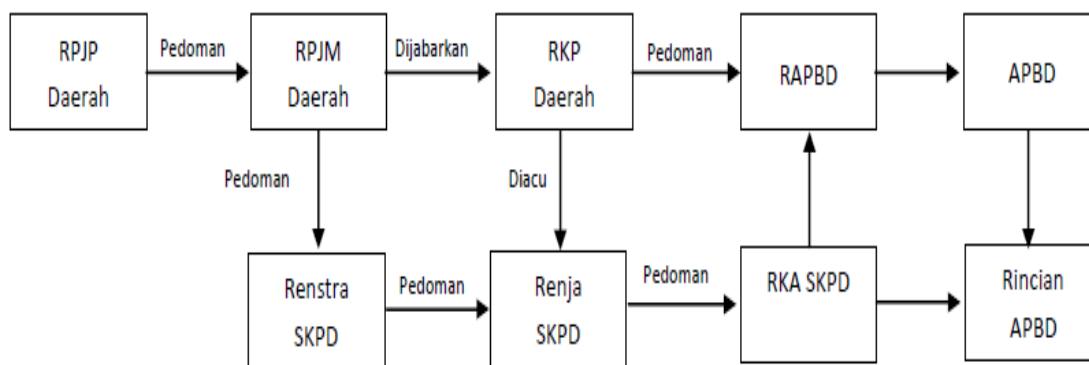
No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	26	-	26
		Gol. II	6	-	6
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	4	-	4
		S1	27	-	27
		D. IV	-	-	-
		D. III	2	-	2
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	6	-	6
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	5	-	5
		Eselon IV	11	-	11
		Fungsional:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
		Tertentu	2	-	2
		Umum	20	-	20
JUMLAH TOTAL			39	-	39

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.036.794.397,11	1.231.530.000,00	3.321.190.630,00	17.571.000,00	9.607.086.027,11	8.875.643.329,00	92,39	KESBANGPOL

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengalami permasalahan/ hambatan dalam hal pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun 2017.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

1. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda IMB.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan semuanya sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang

mengatur tentang IMB yaitu :

- a. Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IMB;
 - b. Perda Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomo 15 Seri D);
 - c. Perda Kabupaten Belitung Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2007 tentang IMB;
 - e. Perda Kabupaten Bangka Selatan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang IMB;
 - f. Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang IMB;
 - g. Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang IMB.
2. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda Kependudukan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kependudukan, dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada, yaitu :
- a. Perda Kota Pangkalpinang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Perda Kabupaten Bangka Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;
 - c. Perda Kabupaten Belitung Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor : 29 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;
 - e. Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - f. Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Retribusi Administrasi Kependudukan.
3. Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantib).
Rasio Personil Satpol PP yang PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berjumlah 83 orang. Dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya sebanyak 1.349.121 orang, maka rasio personil Satpol PP PNS terhadap 50.000 penduduk sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 0,01 orang per 50.000 penduduk.
- b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.
1. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah.
Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 **Tepat Waktu**. Disampaikan pada tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 045.2/192/I 23 Maret 26.
 2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja.
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
Penyampaian Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, baru disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diaudit, sehingga laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2018 **Tidak Tepat Waktu**.
 3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM yang telah

diterapkan oleh Kabupaten/Kota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 42 urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bangka sebanyak 6 urusan;
 - b. Kabupaten Belitung sebanyak 6 urusan;
 - c. Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 6 urusan;
 - d. Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 urusan;
 - e. Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 urusan;
 - f. Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 urusan;
 - g. Kota Pangkalpinang sebanyak 6 urusan;
4. Hubungan Antar Daerah.
Jumlah MOU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain yang masih berlaku pada Tahun 2017 adalah sebanyak 20 MOU.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.

1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional yaitu 2,6%.
Berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 terdapat 206 program prioritas pembangunan daerah, sedangkan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2017 adalah sebanyak 5 program.
2. Kewenangan.
Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota adalah sebanyak 167 urusan wajib sebagaimana yang tercantum dalam PP 38 Tahun 2007.

Keuangan.

1. Waktu penetapan PERDA APBD 2017
Waktu Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah tepat waktu, dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016.
2. Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Ada).
3. Belanja untuk Pelayanan Dasar.
Secara umum besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar, sebagai berikut:
 1. Urusan Pendidikan Rp. 445.047.612.317,00
 2. Urusan Kesehatan Rp. 222.857.622.294,79
 3. Urusan Tata Ruang Rp. 277.146.646.082,49
 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 331.719.369,00
 5. Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 29.193.573.288,00
 6. Urusan Sosial Rp. 42.358.372.704,00

Total realisasi belanja pelayanan dasar Rp. 1.016.935.546.055,28 dari total Belanja APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 atau sebesar 39,12%.

4. Belanja untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan.

Besaran realisasi belanja APBD yang digunakan untuk membiayai urusan pendidikan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 445.047.612.317,00 dan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebesar Rp. 222.857.622.294,79 dari total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 atau sebesar 25,69%.

5. Pelayanan Publik.
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Standar Pelayanan Publik.
 6. Kepegawaian.
 - 1) Ratio PNS terhadap penduduk
Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berjumlah 5.388 orang. Dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya sebanyak 1.349.121 orang, maka rasio personil PNS terhadap penduduk sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 0,40%.
 - 2) Sistem Informasi Kepegawaian.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki Sistem Database Kepegawaian yaitu SIMADIK (Sistem Manajemen Data dan Informasi Kepegawaian).
 7. Kelembagaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 42 unit yang terdiri dari 9 biro, 1 Inspektorat, 1 Sekwan, 23 dinas, 5 badan, 2 unit rumah sakit provinsi dan 2 unit lembaga teknis lainnya.
- d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
1. Produk Peraturan Perundangan.
Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 19 Peraturan Daerah, yang meliputi :
 - a. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyangga Karet;
 - b. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025;
 - d. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
 - e. Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
 - f. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - g. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggung jawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- i. Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- j. Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
- k. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun 2017;
- l. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan;
- m. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- n. Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- o. Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- p. Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- q. Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Kependudukan;
- r. Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan;
- s. Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

2. RAPERDA yang diusulkan dan disetujui DPRD tahun 2017.

Pada Tahun 2017 RAPERDA yang diusulkan sebanyak 19 RAPERDA dan terdapat 19 Raperda yang disetujui oleh DPRD atau sebesar 100%.

- e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.
Pengambilan Keputusan DPRD
Pada tahun 2017 terdapat 20 keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dan semuanya ditindaklanjuti atau sebesar 100%.
- f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.
 1. Tindaklanjuti Keputusan Gubernur (Kepgub).
Keputusan Gubernur yang ada di Tahun 2017 adalah sebanyak 1.802 keputusan dan semua keputusan tersebut ditindak lanjuti atau sebesar 100%
 2. Tindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub).
Peraturan Gubernur yang ada di Tahun 2017 adalah sebanyak 114 dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebanyak 93, sehingga Peraturan Gubernur yang tidak ditindaklanjuti sebanyak 21 atau sebesar 81,57%
- g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang - Undangan.
Jumlah PERDA yang dibatalkan tidak ada, dari PERDA yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi 0 PERDA tidak ada Peraturan Daerah yang dibatalkan (0 %).
- h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan

Relevan untuk Daerah.

1. PERDA tentang konsultasi publik.

Keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik belum mempunyai Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Konsultasi Publik.

2. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik.

Secara umum terdapat media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik meliputi www.babelprov.go.id, yang dibentuk berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 480/696/DISKOMINFO/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Pendaftaran Nama Domain.

i. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.

Dana Perimbangan.

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum;
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan penerimaannya sebesar Rp. 1.619.104.922.550,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.539.888.325954,00 atau 95,10% dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 175.828.126.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 120.836.218.678,00 atau 69%.
3. Alokasi Belanja APBD dari Dana Alokasi Umum
Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.179.885.725.235,26 dengan realisasi sebesar Rp. 1.029.003.980.350,20 atau 87,21%, dari Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 987.556.919.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 980.297.314.000,00 atau 99%, sehingga perbandingannya sebesar 9,07%
4. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 455.719.877.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 438.754.793.276,00 atau 96%.
5. Alokasi belanja pada APBD.
Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.179.885.725.235,26 dengan realisasi sebesar Rp. 1.029.003.980.350,20 atau 87,21% berbanding terhadap total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 dengan realisasi sebesar Rp 2.359.064.209.991,46 atau 90,77%, sehingga perbandingannya sebesar 3,56%

j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah.
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 dari total realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar Rp. 2.251.160.506.508,48 atau sebesar 28,36%.

- k. Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD.
 1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu).

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 BPK RI memberikan pendapat **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, sedangkan Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2017 BPK RI belum memberikan opini karena masih dalam proses audit.
 2. Besaran SILPA.

Rasio SILPA terhadap total pendapatan, besaran SILPA APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 217.692.026.730,06 dari total pendapatan sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16 atau sebesar 9,12%.
 3. Realisasi Pendapatan.

Rasio Realisasi Pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan Tahun 2017 jika dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan PAD sebesar Rp. 710.039.712.454,48 dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16 atau sebesar 29,75%.
 4. Realisasi Belanja.

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.359.064.209.991,46 total anggaran belanja sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 adalah 91,81%.
 5. Pengawasan Inspektorat Provinsi.

Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti berdasarkan hasil inventarisasi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2017, jumlah temuan BPK sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 930 temuan sedangkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 566 temuan atau sebesar 60,86%.
- l. Pengelolaan Potensi Daerah.
 1. Peta Potensi Daerah
Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD yaitu jumlah realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 710.039.712.454,48 dibagi dengan potensi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 539.995.060.971,20 atau sebesar 131,49%.
 2. Peningkatan PAD.
Total PAD tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 sedangkan PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebesar Rp. 574.456.474.397,80 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 162.735.618.537,36 atau sebesar 22,08% dari Tahun Anggaran 2016.
- m. Terobosan Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 1. Penghargaan.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tahun 2017 adalah sebanyak 4 penghargaan, yaitu:

- a. Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Energi
 - b. Halal Award 2017
 - c. Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - d. Piagam Penghargaan atas Seleksi CPNS menggunakan metode CAT BKN secara Cepat, Akuntabel dan Transparan
2. Pengadaan Barang dan Jasa.
Keberadaan E-procurement di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah diterapkan melalui media elektronik (e-procurement) melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui Biro Pembangunan.
3. Daya saing Daerah.
Jumlah realisasi izin Investasi dalam tahun 2017, ada 6 izin persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai investasi Rp. 170.710.000.000,-.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Administrasi Umum

Pengisian IKK pada Aspek Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran (I.2) dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan urusan kewenangan yang dilaksanakan.

Adapun Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada table III.1.

TABEL III.1
Pemetaan Urusan Dengan OPD
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URUSAN	OPD YANG MELAKSANAKAN
A	Urusan Wajib	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJ)
3	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda dan Statistik
7	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
12	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
13	Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
16	Perhubungan	Dinas Perhubungan
17	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Pertanahan	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP
20	Otonomi Daerah, PUM, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Bakuda, Badan Penghubung
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
22	Sosial	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Statistik	Bappelitbangda
25	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
B	Urusan Pilihan	
1	Kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pertanian	Dinas Pertanian
3	Kehutanan	Dinas Kehutanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Jumlah Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (Permen).
- Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah telah memiliki perda tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yaitu:
1. Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

a. Penataan Kelembagaan Daerah.

Kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, dimana penataan kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi. Dari 801 formasi jabatan struktural di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, telah terisi sebanyak 801 jabatan atau 100%.
2. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Organisasi Perangkat Daerah Menunjukkan bahwa jabatan fungsional pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi dan realisasi anggaran, belanja modal dan belanja barang dan jasa pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel III.2.

TABEL III.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN, BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG/JASA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)			%	OPD PELAKSANA
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
Urusan Wajib							
1	Pendidikan	477.363.389.104,63	222.931.741.420	200.629.607.706	423.561.349.126	88,73	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	48.072.364.615	12.546.794.895	30.535.470.210	43.082.265.105	89,62	Dinas Kesehatan
		141.599.617.570	28.427.123.209	102.206.941.594,43	130.634.064.803,43	92,26	Rumah Sakit Umum Provinsi
		55.188.529.338,90	24.103.035.871	25.043.021.517,36	49.146.057.388,36	89,05	Rumah Sakit Jiwa
3	Lingkungan Hidup	12.906.912.062,00	6.801.415.495,00	4.866.372.295,00	11.687.787.790,00	90,55	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pekerjaan Umum	293.006.146.064,00	15.776.825.503,00	250.986.487.761,00	266.763.313.264,00	91,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tata Ruang						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Perencanaan Pembangunan	22.211.747.172,08	7.747.886.488,00	11.482.785.450,65	19.230.671.938,65	86,58	Bappelitbangda
7	Perumahan						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Kepemudaan dan Olahraga	17.813.686.859	5.854.700.467	10.580.746.680	16.435.447.147	92,26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Penanaman Modal	8.505.730.909	5.468.459.363	2.840.538.380	8.308.997.743	97,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Koperasi dan UKM	13.891.223.464	5.611.855.786	7.587.979.506	13.199.835.292	95,02	Dinas Koperasi UKM
11	Kependudukan dan Catatan Sipil						Dinas PPPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB
12	Ketenagakerjaan	23.631.562.387	13.134.542.952	9.232.553.346	22.367.096.298	94,65	Dinas Tenaga Kerja
13	Ketahanan Pangan	9.622.983.712,14	4.412.034.613,00	4.752.072.899,00	9.164.107.512,00	95,23	Dinas Pangan

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)			%	OPD PELAKSANA
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.759.768.843,00	5.409.360.648,00	5.306.036.062,00	10.715.396.710,00	91,12	Dinas PPPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB
15	KB dan KS						Dinas PPPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB
16	Perhubungan	31.200.055.852,26	5.860.604.878	23.182.303.470,77	29.042.908.348,77	93,09	Dinas Perhubungan
17	Komunikasi dan Informatika	16.347.867.857	5.669.387.974	8.846.727.301	14.516.115.275	88,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Pertanahan	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan (Setda)
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.607.086.027,11	4.676.962.116	4.198.681.213	8.875.643.329	92,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		21.560.297.604	9.081.598.378	11.236.331.581	20.317.929.959	94,24	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	131.541.471.614	42.866.053.716	78.789.677.821	121.655.731.537	92,48	Sekretariat Daerah
		1.215.730.722,00	-	-	1.215.730.722,00	100	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		18.638.444.218,57	-	-	18.638.444.218,57	100	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		96.271.708.887	7.526.676.342	70.205.666.791	77.732.343.133	80,74	Sekretariat DPRD
		70.623.844.349,45	63.381.252.604,64	20.985.984.662	63.381.252.604,64	90,13	Badan Keuangan Daerah
		30.186.144.993	11.846.114.951	16.299.051.172	28.145.166.123	91,89	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		19.073.289.944	10.641.372.148	7.218.477.510	17.859.849.658	93,64	Inspektorat Daerah
		12.668.156.000	3.087.286.451	8.628.376.588	11.715.66.039,50	95,23	Badan Penghubung
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.311.793.418	5.401.989.970	20.406.344.637	25.808.334.607	98,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
22	Sosial	21.6767.654.711,92	9.176.260.713	11.221.191.599	20.397.452.312	94,10	Dinas Sosial

		12.599.073.161	3.879.543.614	7.365.980.068	11.245.523.682	89,26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Budaya	14.811.838.859			12.235.490.144	87,70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Statistik						Bappelitbangda
25	Kearsipan	12.207.313.567,42	6.401.600.458,00	4.276.390.200,00	10.677.990.658,00	87,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Perpustakaan						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB		2.455.376.645.690,70	1.276.209.559.020,26	1.011.959.973.004,21	2.244.036.589,185,47	23,35	
Urusan Pilihan							
1	Kelautan	28.925.435.252	12.638.522.562	9.881.969.830	22.520.492.392	77,86	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pertanian	38.112.887.148,50	14.538.053.247	17.810.251.907	32.348.305.154	84,87	Dinas Pertanian
3	Kehutanan	27.047.738.721	15.358.547.500	8.512.583.645	23.871.131.145	88,26	Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	21.381.828.983	11.315.547.312	7.928.137.457	19.243.684.769	90,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pariwisata	7.316.127.100			5.658.285.566	77,34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Industri	17.362.142.764			16.490.497.686	94,98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perdagangan	3.466.236.556			3.163.211.141	91,26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN		143.612.396.524,50	53.850.670.621	44.132.942.839	97.983.613.460	68,22	

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2107

IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Prioritas pembangunan sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, yang memuat ringkasan pelaksanaan program, sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan masyarakat

a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas :

• Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut.

Upaya penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan RPJMD dan RPJMN. Berdasarkan jabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah :

1. Ekonomi;
2. Sosial, Politik, dan Sumber Daya Manusia;
3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Sarana dan Prasarana; serta
5. Pemerintahan.

b. Kesehatan dengan program prioritas

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel IV.1, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel IV.1
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	62,99	68,01	30,55	83,3	81,39	87,7	73.82
2	Belitung	52,33	11,84	48,15	15,5	78,44	75,6	73.73
3	Bangka Tengah	80,70	17,74	62,21	60,8	78,87	48,2	38.68
4	Bangka Barat	69,77	85,24	70,86	78,5	54,66	87,4	77.58
5	Bangka Selatan	96,76	11,94	13,41	62,7	73,80	76,4	75.18
6	Belitung Timur	42,72	2,42	25,49	48,6	72,39	100	73.82
7	Kota Pangkalpinang	11,42	5,37	13,29	50,6	91,84	92,0	86.72
	Kepulauan Bangka Belitung	58,28	28,29	36,69	60,00	76,38	80,2	71.24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	9,47	4,05	1,71	1,77	1,67	0,97	0.63
2	Belitung	6,31	3,20	2,72	2,61	1,97	0,66	0.24
3	Bangka Tengah	5,06	6,81	5,91	8,27	4,28	2,13	0.39
4	Bangka Barat	18,50	16,58	14,10	8,62	4,52	4,23	1.98
5	Bangka Selatan	8,87	14,83	4,93	5,64	2,08	0,66	0.66
6	Belitung Timur	6,61	9,62	5,03	0,95	1,58	0,57	0.25
7	Kota Pangkalpinang	10,43	7,35	1,48	1,02	0,67	0,39	0.17
	Kepulauan Bangka Belitung	9,47	8,46	4,82	4,10	2,36	1,39	0.68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasi berisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah dengan epidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disajikan dalam Tabel IV.3 berikut:

Tabel IV.3
Perkembangan Prevelensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	0,99	0	0	8,33	3,94	3,94	53,00
2	Belitung	4,67	4,67	0,56	2,70	1,80	0	34,00
3	Bangka Tengah	14,58	0	8,11	2,50	0,01	0	14,00
4	Bangka Barat	9,09	2,37	4,94	0	0	0	19,00
5	Bangka Selatan	0,00	2,27	0	3,17	9,84	1,08	15,00
6	Belitung Timur	2,04	2,84	3,85	0,20	0,02	2,17	3,00
7	Kota Pangkalpinang	10,99	0	1,96	6,98	10,33	6,67	67,00
	Kepulauan Bangka Belitung	5,53	3,0	8,11	8,33	10,33	13,86	205,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwapeningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang dilaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

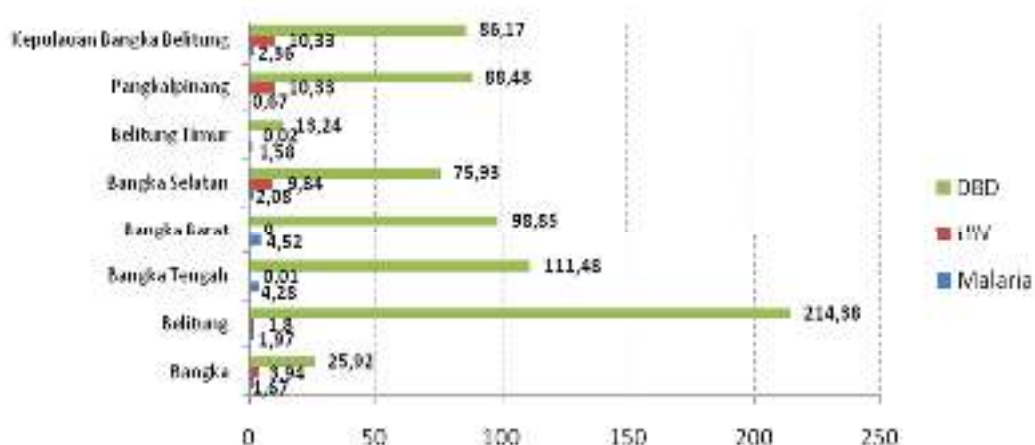
Tabel IV.4
Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	4,13	20,82	8,08	5,60	25,92	43,15	94
2	Belitung	38,04	15,02	56,94	19,88	214,38	111,81	24
3	Bangka Tengah	2,13	51,04	38,22	3,33	111,48	87,21	46
4	Bangka Barat	14,30	27,78	40,12	49,10	98,85	66,72	95
5	Bangka Selatan	3,17	9,44	4,15	46,95	75,93	26,47	40
6	Belitung Timur	12,46	56,42	21,16	22,66	13,24	7,72	8
7	Kota Pangkalpinang	11,86	55,07	49,89	29,17	88,48	27,68	17
	Kepulauan Bangka Belitung	11,25	31,43	29,37	27,93	86,17	53,4	324

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2008-2014 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya, meskipun di beberapa daerah kabupaten/kota mengalami penurunan. Pada tahun 2014, kenaikan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Adapun daerah yang mengalami penurunan terdapat di Kabupaten Belitung. Secara umum, perkembangan angka penyakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008–2014, ditampilkan pada Gambar IV.1

Gambar IV.1
Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2014
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel IV.5 dan Tabel IV.6.

Tabel IV.5
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	11	11	11	11	11	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	7	7	7	7	7	7	8
4	Bangka Barat	6	6	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	6	7	8	8	9	9	9
6	Belitung Timur	6	6	6	6	6	6	6
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9	9	9
Kepulauan Bangka Belitung		54	55	58	58	59	60	61

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel IV.6
Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/ Kota	2010		2011		2012		2013		2014	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	35	11	37	11	36	12	36	12	36
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	31	9	31
3	Bangka Tengah	7	17	7	21	7	18	7	18	8	18
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	19	8	19
5	Bangka Selatan	8	28	8	28	9	29	9	29	9	29
6	Belitung Timur	6	18	6	17	6	18	6	18	6	18
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	7	9	19	9	19	9	19
	Prov. Kep. Bangka Belitung	58	167	58	160	59	169	60	169	61	169

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel IV.7
Perkembangan Jumlah Dokter di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

Wilayah	2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	G	U	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Prov. Kep. Babel	4	2	0	6	1	0	10	0	1				3	1	0
Bangka	63	11	17	60	13	17	60	11	22	9	61	16	67	5	33
Belitung	36	8	3	40	10	2	41	10	4	10	40	6	42	11	14
Bangka Tengah	30	5	0	39	7	2	42	7	4	7	44	5	42	5	7
Bangka Barat	31	6	2	38	5	2	54	5	4	7	36	3	52	11	5
Bangka Selatan	24	4	0	27	5	0	27	6	0	7	23	3	27	7	4
Belitung Timur	14	1	0	34	5	0	34	8	2	10	32	4	39	9	4
Pangkalpinang	59	17	30	61	17	41	61	21	51	19	56	42	69	25	49
Jumlah	261	54	52	305	63	64	329	68	88	69	292	79	341	74	116

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

Keterangan :

U : Dokter Umum

G : Dokter gigi

Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel IV.7 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

c. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan bahwa *stakeholder* pendidikan menganggap pendidikan adalah kebutuhan hidup yang penting. Hal ini dipertegas lagi melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan data, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua jenjang pendidikan yang ada. Perkembangan APS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010/2011 – 2014/2015, sebagaimana yang tercantum pada Tabel IV.8 dan Gambar IV.2.

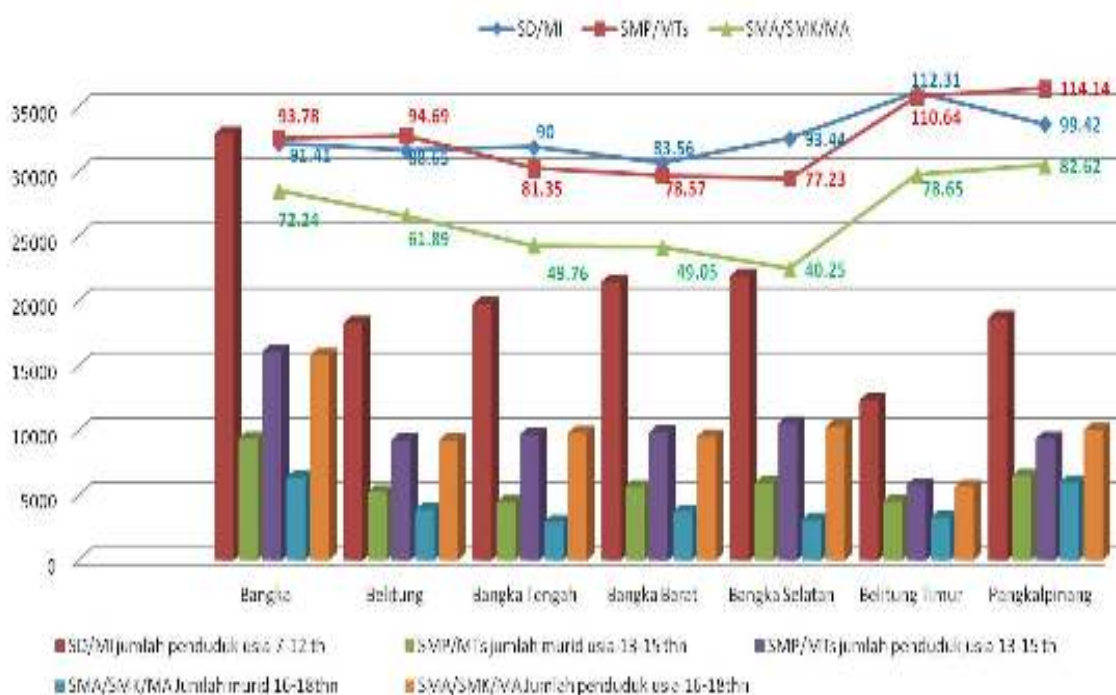
Tabel IV.8

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d.2014/2015

No	Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	126.973	131.465	153.832	149.999	135.712
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	135.784	138.919	141.915	146.526	146.526
1.3.	APS SD/MI	93,51	94,63	108,40	102,37	102,59
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	37.859	40.859	57.500	59.893	41.875
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	57.742	62.001	62.850	65.640	65.640
2.3.	APS SMP/MTs	65,56	65,90	91,49	91,24	91,24
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	29.380	25.430	36.420	37.878	31.945
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	56.592	54.729	61.593	60.657	60.657
3.3.	APS SMA/SMK/MA	51,91	46,46	59,13	62,45	62,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Gambar IV.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Tahun 2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APS pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota tahun 2015 ditampilkan pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No	Kabupaten /Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah murid usia 7- 12 thn	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah murid usia 13-15 thn	Jumlah penduduk usia 13- 15 th	APS	Jumlah murid 16- 18thn	Jumlah penduduk usia 16- 18thn	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	30.754	32940	91,41	9.391	16.098	93,78	6.389	15.809	72,24
2	Belitung	15.918	18306	88,65	5.241	9.286	94,69	3.896	9.265	61,89
3	Bangka Tengah	17.293	19741	90,00	4.490	9.702	81,35	2.952	9.826	49,76
4	Bangka Barat	20.152	21494	83,56	5.644	9.889	78,57	3.754	9.543	49,05
5	Bangka Selatan	20.455	21958	93,44	5.927	10.553	77,23	3.114	10.296	40,25
6	Belitung Timur	11.475	12333	112,31	4.550	5.823	110,64	3.302	5.652	78,65
7	Pangkalpinang	18.804	18697	99,42	6.498	9.389	114,14	6.003	10.047	82,62
	Jumlah	134.851	145.469	92,62	41.741	70.740	91,24	29.410	70.438	62,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan data pada Tabel IV.8, Tabel IV.9 dan Gambar IV.2, maka pada jenjang pendidikan SD/MI, Kabupaten yang memiliki APS terendah adalah Kabupaten Bangka Barat dan yang tertinggi adalah Kabupaten Belitung Timur, sementara itu pada jenjang SMP/MTS, Kabupaten dengan nilai APS terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dan yang tertinggi adalah Kota Pangkalpinang, sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten dengan nilai APS terendah adalah Kabupaten dan yang tertinggi adalah Kota Pangkalpinang.

2. Angka Partisipasi Murni

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakatakan pendidikan tersebut. Dukungan di dalam pendidikan diwujudkan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengindikasikan daya serapan sekolah berbanding dengan peserta didik sebagaimana tertera pada Tabel IV.10.

Tabel IV.10

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk 16-18 tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	183	35.949	50,91	51	13.352	38,20	32	16.354	19,57
2	Belitung	126	18.748	67,21	29	8.513	34,07	16	8.275	19,34
3	Bangka Tengah	95	20.582	46,16	23	7.993	28,78	14	9.123	15,35
4	Bangka Barat	136	21.769	62,47	48	8.785	54,64	20	8.729	22,91
5	Bangka Selatan	88	24.684	35,65	31	9.839	31,51	17	8.395	20,25
6	Belitung Timur	105	14.463	72,60	22	5.944	37,01	12	4.413	27,19
7	Pangkalpinang	85	19.966	42,57	26	8.424	30,86	22	8.974	24,52
Prov. Kep. Bangka Belitung		818	156.161	52,38	230	62.850	36,60	133	64.263	20,70

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

b. Rasio Murid dan Guru

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel IV.11
 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan
 Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD/MI							
1.1.	Jumlah Guru	8.255	9.356	9.561	9.687	9.905	9.843	9.767
1.2.	Jumlah Murid	148.494	151.827	155.774	159.256	161.533	163.325	161.932
1.3.	Rasio	17,99	16,23	16,29	16,44	16,31	17	
2	SMP/MTs							
2.1.	Jumlah Guru	3.295	3.571	3.790	3.753	3.934	4.063	4.005
2.2.	Jumlah Murid	48.550	49.158	51.101	53.538	58.517	62.411	60.101
2.3.	Rasio	14,73	13,77	13,48	14,27	14,87	15	
3	SMA/SMK/MA							
3.1	Jumlah Guru	2.977	3.124	3.290	3.306	3.458	3.407	3.444
3.2.	Jumlah Murid	34.938	34.072	27.213	38.356	41.999	45.330	42.930
3.3.	Rasio	11,73	10,90	8,27	11,60	12,15	13	12,86

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014

d. Perumahan dan Permukiman

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi masalah perumahan berupa tersedianya Rumah Sederhana, Layak Huni dan Sehat. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 13.016 rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2015 masih terdapat 1,38 persen rumah penduduk di Kepulauan Bangka Belitung yang masih menggunakan atap ijuk. Hal tersebut sebagaimana yang digambarkan pada table IV.12 berikut.

Tabel IV.12
 Persentase Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Atap Terluas Bukan Ijuk per Kabupaten / Kota
 Tahun 20011 – 2015

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	98.72	95.13	97.24	98.68	99.09
Belitung	97.83	96.93	98.14	98.31	98.92
Bangka Barat	96.02	94.82	97.14	98.79	98.77
Bangka Tengah	97.61	94.82	97.14	98.79	98.37
Bangka Selatan	95.77	92.99	93.04	97.3	95.98
Belitung Timur	96.52	97.52	99.69	98.43	99.72
Kota Pangkalpinang	98.54	99.48	100.00	100.00	99.64
Kepulauan Bangka Belitung	97.21	95.83	95.83	98.67	98.62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui kegiatan Bedah Rumah Program SATAM EMAS.

2. Pembangunan sektor unggulan

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

a. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung, sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

b. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk;

- Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.
- c. Pengembangan Pariwisata
Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.
 - d. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.
 - e. Peningkatan Pendapatan Pemerintah
Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
 - f. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir
 - g. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status Bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor

swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

h. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

i. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

j. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

k. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

l. Kawasan Ekonomi Khusus

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh

swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah.

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

Tema Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1) Tahun 2018, Tema Proritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
- 2) Tahun 2019, Tema Proritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
- 3) Tahun 2020, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
- 4) Tahun 2021, Tema Proritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
- 5) Tahun 2022, Tema Proritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

Untuk melihat keselarasan dan keterkaitan antara strategis dengan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam Tabel IV.12.

Tabel IV.12
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi : *"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"*

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah							
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan
						2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
						3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan peternakan
		2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
						5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
						6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
		3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata
						8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
						9	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
				5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis daerah
				6	Terwujudnya kemandirian energi	12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	5	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	13	Meningkatkan pendapatan asli daerah
		6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8	Menurunnya angka Pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
				9	Menurunnya angka kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
				10	Menurunnya angka Inflasi	16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
				11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas							
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	7	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	12	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
						19	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
				13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
						21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman
						22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
				14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
						24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
						25	Meningkatkan aksesibilitas
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal							
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
						27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat							
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	PEMBANGUNAN KESEHATAN	16	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi							
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
						30	Peningkatan tata kelola pengawasan
						31	Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
						32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
						33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
				18	Birokrasi yang efektif dan efisien	34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi
						35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
				19	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
						37	Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	11	PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
						39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
						40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup							
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21	Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
						42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	13	PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22	Peningkatan Kualitas Lingkungan	43	Meningkatkan kualitas air
						44	Meningkatkan kualitas Udara
						45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
						46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

Tabel IV.13
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
6	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian
8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
9	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
10	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
11	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian
12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
14	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
19	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
20	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
21	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar
22	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
23	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
24	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
25	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
26	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
27	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
28	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
29	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
30	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang

Arah Kebijakan

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
31	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
32	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
33	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
34	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
35	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
36	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
37	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
38	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
39	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
40	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
41	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
42	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral
43	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
44	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
45	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
46	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
47	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
48	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
49	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
50	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
51	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
52	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
53	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
55	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
56	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
57	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
58	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
60	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
61	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
62	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
63	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
64	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
65	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
66	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan
67	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan	peningkatan akses pelayanan pendidikan
68	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.	peningkatan mutu layanan pendidikan.
69	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
70	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
71	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
72	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
73	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
74	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
75	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
76	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
77	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
78	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
79	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
80	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
81	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
82	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
83	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur
84	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
85	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
86	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
87	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
88	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
89	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
90	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan	Menjamin hak anak dalam pembangunan
91	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
92	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
93	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
94	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
95	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Arah Kebijakan					
No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
96	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
97	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
98	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air	Pengendalian kualitas air
99	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara	pengendalian kualitas udara
100	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan	Peningkatan tutupan lahan
101	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial
102	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
103	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional	Pengembangan TPA Regional

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang juga sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.3
Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Pengembangan potensi unggulan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari potensi sumberdaya yang ada.

Gambar IV.4
Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012/2013



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Berdasarkan Gambar IV.3 dan Gambar IV.4, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 diarahkan pada:

1. Kota Pangkalpinang

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2017 diarahkan pada penguatan pertumbuhan investasi melalui promosi dan regulasi investasi, pemantapan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan fasilitas umum.

2. Kabupaten Bangka

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertanian tangguh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan perhubungan yaitu pengadaan kendaraan angkutan desa dan urusan pekerjaan umum yaitu peningkatan jalan kabupaten.

3. Kabupaten Bangka Barat

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh, peningkatan daya saing dan kualitas masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan

pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan energi dan sumber daya mineral yaitu pemasangan jaringan instalasi listrik, urusan kelautan dan perikanan yaitu pengembangan perikanan tangkap.

4. Kabupaten Bangka Tengah

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan urusan pemuda dan olahraga yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

5. Kabupaten Bangka Selatan

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah berbasis kawasan menuju Bangka Selatan mandiri, maju, sejahtera dan berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan jalan, urusan tenaga kerja yaitu pelatihan pengembangan dan produktivitas tenaga kerja, dan urusan perdagangan yaitu pembangunan pasar rakyat.

6. Kabupaten Belitung

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2017 diarahkan pada percepatan pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan kawasan industri prioritas / kawasan ekonomi khusus Belitung, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan koperasi, usaha mikro kecil menengah yaitu pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dan urusan komunikasi dan informatika yaitu pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

7. Kabupaten Belitung Timur

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan kesehatan yaitu pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit, urusan komunikasi dan informatika yaitu pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan peningkatan pengembangan sistem informasi.

Gambar IV.5

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Terhadap Fokus dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

a) Reformasi Regulasi, Kepastian dan Penegakkan Hukum

- Penataan ruang

Permasalahan pekerjaan umum diantaranya adalah masih kurangnya sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antara wilayah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan provinsi tetangga yang berdekatan. Permasalahan yang secara langsung dirasakan terutama pasca banjir besar yang melanda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan beberapa ruas jalan baik Nasional dan Provinsi mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun ringan. Pendangkalan atau sedimentasi pada sungai-sungai pasca banjir menyebabkan sistem drainase menjadi buruk, terutama yang berada di area perkotaan. Permasalahan lain adalah masih adanya rumah belum layak huni dan belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi.

Strategi yang dapat dilakukan adalah segera melakukan pendataan secara komprehensif terhadap sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir, dan melakukan perbaikan sesuai dengan skala prioritas, melakukan pengerukan pada sungai, dan melakukan reboisasi pada bagian hilir sungai. Meningkatkan pembangunan perumahan sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan kawasan permukiman, serta meningkatkan rasio jaringan irigasi yang selama ini terpusat di Kabupaten Bangka Selatan.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang mencakup wilayah administratif dan wilayah fungsional yang tercermin dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan daerah seyogyanya dilakukan melalui penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam penataan

ruang disebabkan karena RTRW belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan belum adanya SOP pengendalian pemanfaatan ruang.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra ruang yang tertata secara baik. Untuk itu dibutuhkan penataan ruang, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara terpadu, sinergi serta berkelanjutan. Selain itu, dokumen perencanaan spasial juga harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

b) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Permasalahan yang ada dalam urusan ini adalah terjadinya tindakan kriminalitas (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan) dan rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pemilukada serta adanya ormas yang melanggar undang-undang ormas terutama pelanggaran terhadap asas Pancasila (Gafatar dan HTI). Strategi yang dilaksanakan berupa koordinasi dengan jajaran Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) yang dituangkan dalam rapat bulanan jajaran pengurus Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) agar melakukan penggalangan/sosialisasi ke masyarakat terkait tindakan yang melanggar Ketentraman, ketertiban masyarakat, dan melaksanakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), melakukan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam proses demokrasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan melekat.

c) Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

d) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut.

Upaya penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan RPJMD dan RPJMN. Berdasarkan jabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah :

6. Ekonomi;
7. Sosial, Politik, dan Sumber Daya Manusia;
8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Sarana dan Prasarana; serta
10. Pemerintahan.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2013 yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Tumpang tindih Tugas dan Fungsi di Kelembagaan serta distribusi beban kerja yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga terdapat beban yang berlebihan pada sebuah SKPD begitu juga sebaliknya;
2. Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya Aparatur yang profesional. Pembenahan SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten;
3. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai "C"; dan
4. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Untuk menjembatani persoalan-persoalan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan maksud untuk mendapatkan instrumen yang digunakan dalam memandu, mempersatukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, dan petunjuk untuk tercapainya perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Permen PAN dan RB nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *online*. Implementasi pelaksanaan delapan area perubahan dengan menargetkan delapan program *quick wins* perlu dilakukan penyelarasan pencapaian sasaran dan strategi, komponen penilaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PMPRB terhadap pelaksanaan *Road Map* pada tahun 2014. Capaian hasil pelaksanaan delapan area perubahan berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 39,41 kategori C dengan nilai angka > 30-50 dengan interpretasi kurang sehingga dirasa masih perlu banyak perubahan yang mendasar.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit (*enablers*)** dan **Hasil (*Result*)**. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. PMPRB ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hasil evaluasi dan perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2014 dan 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hasil pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, merupakan kelanjutan pelaksanaan *road map* Reformasi Birokrasi dengan delapan

program *quick wins* tahun 2014. Hasil pelaksanaannya secara bertahap dapat diwujudkan dalam reformasi birokrasi tahun 2015 dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar **60.36 (kategori B)** dengan interpretasi baik, jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk pelaksanaan, secara rinci fluktuatif perubahan hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel IV.14 di bawah ini.

Tabel IV.14
Tabel Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015

No	Komponen	Keterangan	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Persentase	Nilai	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Komponen Pengungkit (<i>Enablers</i>)	a. Manajemen Perubahan	3.21	64.23%	3.7	74.1%
		b. Penataan Peraturan Perundangan	2.71	54.25%	2.71	54.25%
		c. Penataan dan Penguatan Organisasi	4.33	72.22%	5.33	88.89%
		d. Penataan Tata Laksana	2.80	55.93%	3.05	60.93%
		e. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.52	43.45%	13.08	87.19%
		f. Penguatan Akuntabilitas	3.04	50.73%	3.58	56.67%
		g. Penguatan Pengawasan	4.24	35.31%	6.65	55.39%
		h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.86	47.62%	4.23	70.24%
JUMLAH			29.71		42.33	70.55%
2.	Komponen Hasil (<i>Result</i>)	a. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi	7.70	0.38%	8.53	42.67%
		b. Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	2	20%	2	20%
		c. Kualitas Pelayanan Publik	0	0.0%	7.5	75% ^o
JUMLAH			9.7084		18.03	60.11%
JUMLAH TOTAL			39.4178			60.36%

Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Biro Organisasi Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2015

Untuk mempertahankan pencapaian yang sudah diperoleh melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendorong dan lebih melakukan fokus pada komitmen, peran dan tanggungjawab yang kuat dalam melaksanakan tugas, baik Tim Pokja Pelaksana maupun Pimpinan OPD agar hasil Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih optimal dan perubahan mendasar terutama pada area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016 program *quick wins* absensi pegawai terintegrasi agar dapat terlaksana di tahun ini, diperlukan juga pembangunan e-government secara terintegrasi dan tidak secara parsial. Dalam penyelarasan *road map* reformasi birokrasi dan program *quick wins* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *road map*

reformasi birokrasi 2015-2019 yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pembangunan Ekonomi

a. Perbaikan Iklim Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2015 realisasi jumlah dan nilai proyek asing lebih tinggi dibandingkan dengan dalam negeri.

Tabel IV.15
Perkembangan Nilai Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015

Investasi		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
PMA	Jumlah Proyek	19	30	26	35	56	76
	Nilai (juta rupiah)	303.090	146.050	59.183,38	112.392,59	105.043,80	1.033.250
PMDN	Jumlah Proyek	8	9	3	8	8	28
	Nilai (juta rupiah)	812.760,50	836.731,14	533.460,80	608.204,40	615.407,90	1.023.730

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013 & 2015*BP2TPM 2015

Urusan Penanaman Modal Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: "Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional". Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menyajikan data terkini (up to date) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, Terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, Tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

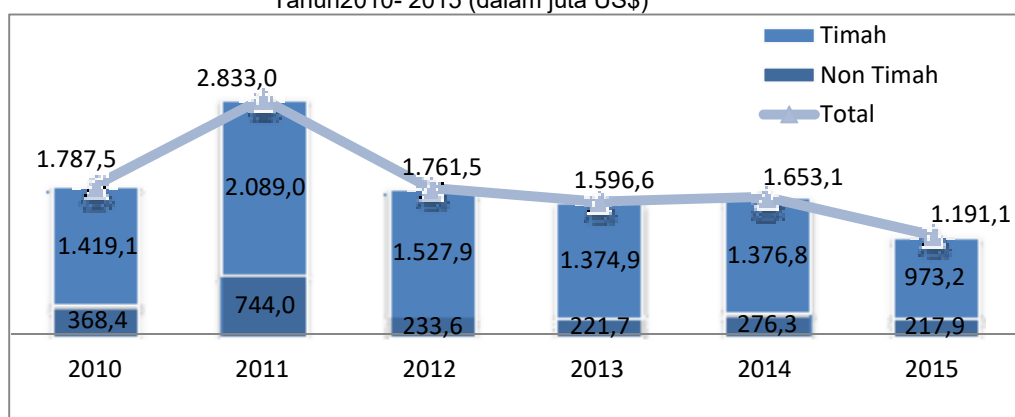
1. Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Total ekspor tertinggi sebesar US\$ 2.833,0 Juta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2011 baik dari ekspor logam timah yang sebesar US\$ 2.089,0 Juta maupun ekspor non logam timah yang sebesar US\$ 744,0. Pada tahun 2015 total ekspor bulan Januari s.d. Desember 2015 sebesar US\$

1.191,1 Juta mengalami penurunan sebesar 27,95 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 sebesar US\$ 1.653,12 juta. Penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya ekspor timah hingga 29,31 persen dari US\$ 1.376,78 Juta menjadi US\$ 973,19 Juta dan ekspor non timah sebesar 21,16 persen dari US\$ 276,34 Juta menjadi US\$ 217,87 juta.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 s.d. 2015, sebagaimana tersaji pada gambar IV.6 dan gambar IV.7 berikut:

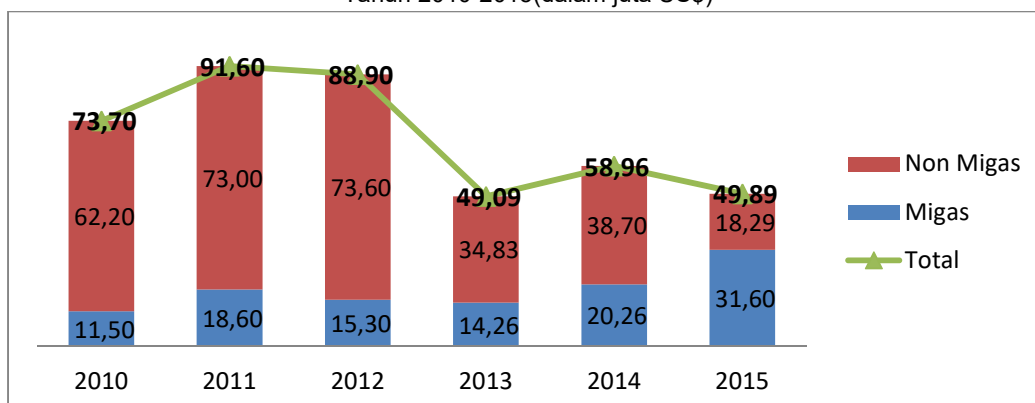
Gambar IV.6
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010- 2015 (dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar US\$ 91,60 Juta dimana impor non migas sebesar US\$ 73,00 Juta dan impor Migas sebesar US\$ 18,60 Juta. Pada tahun 2015 total impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga bulan Desember 2015 sebesar US\$ 49,89 juta turun 15,38 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 yang sudah mencapai US\$ 58,96 juta. Penurunan nilai impor tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor non migas hingga mencapai 52,75 persen yaitu US\$ 38,70 juta menjadi sebesar US\$ 18,29 juta dan impor migas mengalami peningkatan sebesar 56,01 persen yaitu US\$ 20,26 juta menjadi sebesar US\$ 31,60 juta.

Gambar IV.7
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2015(dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan potensidaerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- c) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
- e) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- f) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- g) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- a) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan SamsatOutlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian

Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalandengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
 - c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas

pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
 - g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel IV.16.

Tabel IV.16
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Proyeksi / Target 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.305.793.509.996,34	1.307.498.009.163,85	1.075.475.361.976,13
2.1.1	Belanja pegawai	329.023.179.838,35	406.293.417.508,42	648.517.515.180,72	454.906.815.993,00
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	3.000.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	284.091.950.000,00	278.268.677.250,00	288.066.600.000,00	258.498.752.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	280.474.272.314,38	245.671.793.237,92	256.069.793.983,13	256.069.793.983,13
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	256.078.694.72,00	369.559.622.000,00	103.836.100.000,00	100.000.000.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.305.793.509.996,34	1.307.498.009.163,85	1.075.475.361.976,13
2.2	Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.133.389.648.682,00	1.219.092.879.892,00	1.151.518.637.490,00
2.2.1	Belanja pegawai	91.216.604.900,00	111.621.354.600,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	575.987.487.344,50	680.980.654.172,00		
2.2.3	Belanja modal	310.690.288.316,00	340.787.639.910,00		
C	Jumlah Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.133.389.648.682,00	1.219.092.879.892,00	1.105.790.768.400,00
D	Total Jumlah Belanja	2.130.562.476.885,23	2.439.183.158.678,34	2.526.590.889.055,85	2.181.266.130.376,13

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2017 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan: "Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD,
 - d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2012-2017, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara,

pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel IV.17, diarahkan pada:

- a) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017;
- b) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- c) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel IV.17

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	5.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Pembiayaan Netto	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	367.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala (SiLPA)	227.501.516.638,72	-	-	-

BAB V TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Menurut pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan yang diterima merupakan tugas pemerintahan yang didanai dengan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga kepada pemerintah daerah (provinsi).

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Untuk tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima tugas pembantuan dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementeria Tenaga Kerja. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp.126.598.954.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.888.735.155,00,- atau sebesar 82,85%. Instansi pelaksana Tugas Pembantuan lingkup Provinsi adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rinciannya disajikan pada Tabel V.1

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan instansi pemberi dan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Tahun 2017 rinciannya disajikan pada Tabel V.2

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (terlampir di Tabel V.2)

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan (terlampir di Tabel V.2)

6. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan (terlampir di Tabel V.2)

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	37
		Gol. III	373
		Gol. II	108
		Gol. I	3
		Jumlah	521
II.	Kualifikasi Pendidikan	S3	
		S2	57
		S1	193
		D. IV	11

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	37
		Gol. III	373
		Gol. II	108
		Gol. I	3
		Jumlah	521
		D. III	61
		D. II	2
		D. I	1
		SMA/ sederajat	102
		SMP/ sederajat	3
		SD/ sederajat	1
		Jumlah	431
		III.	Pangkat dan Golongan
Gol. III	373		
Gol. II	108		
Gol. I	3		
Jumlah	521		
JUMLAH TOTAL			521

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
Lengkap	-	-	-

Tabel V.1
Instansi Pemberi dan OPD Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Lingkup Provinsi Tahun 2017

No.	Kementerian/Lembaga	SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pagu Dana Kegiatan (Rp)	DJA Realisasi	
				s/d Desember 2017	
				Realisasi	(%)
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian Provinsi Kep. Babel	2.908.000.000	2.906.561.506	99,95
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	2.700.000.000	2.699.167.506	99,97
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	25.120.000	24.514.000	97,59

		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	182.880.000	182.880.000	100,00
		Dinas Pertanian Provinsi Kep. Babel	5.711.005.000	5.164.961.400	90,44
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	2.425.710.000	2.419.460.000	99,74
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	1.138.950.000	706.946.000	62,07
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	1.061.000.000	1.021.866.000	96,31
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	341.605.000	305.805.000	89,52
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	743.740.000	710.884.400	95,58
		Dinas Pertanian Provinsi Kep. Babel	18.036.042.000	16.088.196.208	89,20
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	3.473.500.000	3.429.146.000	98,72
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	33.000.000	33.000.000	100,00
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	258.950.000	256.896.688	99,21
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	1.678.000.000	1.647.164.000	98,16
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	7.816.000.000	6.037.925.000	77,25
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	2.098.375.000	2.081.233.000	99,18
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	734.241.000	715.003.890	97,38
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	460.000.000	444.934.500	96,72
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	200.500.000	197.217.030	98,36
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	910.586.000	890.758.500	97,82
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	372.890.000	354.917.600	95,18
		Dinas Pertanian Provinsi Kep. Babel	3.023.292.000	2.891.800.831	95,65
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	180.000.000	179.793.800	99,89
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	31.060.000	23.975.100	77,19
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	885.000.000	883.354.000	99,81
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	1.577.232.000	1.456.311.737	92,33
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	100.000.000	99.884.100	99,88
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	250.000.000	248.482.094	99,39
		Dinas Pertanian Provinsi Kep.	64.169.145.000	61.749.287.911	96,23

		Babel			
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	720.000.000	712.800.000	99,00
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	160.000.000	160.000.000	100,00
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	7.500.000.000	7.323.000.000	97,64
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	41.163.340.000	40.568.311.650	98,55
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	320.000.000	300.645.000	93,95
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	8.848.500.000	7.588.350.000	85,76
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	3.636.625.000	3.389.214.240	93,20
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	1.128.080.000	1.051.854.136	93,24
		Dinas Pertanian, Provinsi Kep. Babel	692.600.000	655.112.885	94,59
2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel	450.000.000	437.493.600	97,22
		Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel	324.000.000	316.525.000	97,69
		Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel	126.000.000	120.968.600	96,01
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	13.286.172.000	13.242.295.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	2.497.950.000	7.104.571.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	9.821.170.000	9.821.170.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	160.268.000	160.108.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	806.784.000	806.640.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	2.207.100.000	1.949.183.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Babel	1.787.126.000	1.543.112.000	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	419.974.000	406.072.000	100,00

		Provinsi Kep. Babel			
4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Babel	302.458.000	298.604.700	98,73
		Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Babel	163.135.000	160.087.700	98,13
		Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Babel	85.875.000	85.500.000	99,56
			53.448.000	53.017.000	99,19
TOTAL			110.093.214.000	104.728.734.156	95,13

Sumber : Laporan Triwulan OPD Pelaksana Tugas Pembantuan dengan Kanwil DJA Tahun 2017

Tabel V.2
Dana Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Oleh OPD Provinsi

NO.	NO. DIPA / KODE KEGIATAN SATKER	KEMENTERIAN / SATKER PELAKSANA	P R O G R A M	PAGU PROGRAM (Rp)	K E G I A T A N	PAGU KEGIATAN (Rp)	REALISASI		REVISI- REVISI /KENDA LA & PERMA SALAHAN
							JUMLAH (Rp)	%	
I. PROVINSI									
1.	309901	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura	2.908.000.000	-	2.908.000.000	2.906.561.506	99,95	-
-	1771	-	-	-	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Kawasan aneka cabai)	2.700.000.000	2.699.167.506	99,97	-
-	1774	-	-	-	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	25.120.000	24.514.000	97,59	-
-	5886	-	-	-	Layanan Perkantoran	182.880.000	182.880.000	100,00	-
-	309164	-	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Perkebunan	5.711.005.000	-	5.711.005.000	5.164.961.400	90,44	-
-	1762	-	-	-	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi (Hektar)	2.425.710.000	2.419.460.000	99,74	-
-	-	-	-	-	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung (Hektar)	1.138.950.000	706.946.000	62,07	-

-	1763	-		-	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1.061.000.000	1.021.866.000	96,31	-
-	1766	-		-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	341.605.000	305.805.000	89,52	-
-	5885	-		-	Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	743.740.000	710.884.400	95,58	-
-	309165	-	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	18.036.042.000	-	18.036.042.000	16.088.196.208	89,20	-
-	1775	-	-	-	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	3.473.500.000	3.429.146.000	98,72	-
-	1779	-	-	-	Dukungan Perlindungan Perkebunan	33.000.000	33.000.000	100,00	-
-	1780	-	-	-	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	258.950.000	256.896.688	99,21	-
-	5888	-	-	-	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1.678.000.000	1.647.164.000	98,16	-
-	5889	-	-	-	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	7.816.000.000	6.037.925.000	77,25	-

-	5890	-	-	-	Fasilitasi Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	2.098.375.000	2.081.233.000	99,18	-
					Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan (Kelompok Tani)	734.241.000	715.003.890	97,38	
					Pengembangan pengolahan hasil perkebunan	460.000.000	444.934.500	96,72	
					Pengembangan penerapan standarisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan	200.500.000	197.217.030	98,36	
					Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	910.586.000	890.758.500	97,82	
					Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	372.890.000	354.917.600	95,18	
-	309166	-	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	3.023.292.000	-	3.023.292.000	2.891.800.831	95,65	-
-	1783	-	-	-	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	180.000.000	179.793.800	99,89	-
-	1785	-	-	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	31.060.000	23.975.100	77,19	-

					Pengembangan Populasi Sapi Potong	885.000.000	883.354.000	99,81	
					Optimalisasi Reproduksi	1.577.232.000	1.456.311.737	92,33	
					Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100.000.000	99.884.100	99,88	
					Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	250.000.000	248.482.094	99,39	
-	309168	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	64.169.145.000	-	64.169.145.000	61.749.287.911	96,23	-
-	1794	-	-	-	Jaringan Irigasi Tertier (Ha)	720.000.000	712.800.000	99,00	-
-	1795	-	-	-	Irigasi Air Permukaan (Unit)	160.000.000	160.000.000	100,00	-
					Irigasi Rawa (Ha)	7.500.000.000	7.323.000.000	97,64	
					Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95	
					Optimasi Lahan (Ha)	8.848.500.000	7.588.350.000	85,76	
					Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.636.625.000	3.389.214.240	93,20	

					Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.128.080.000	1.051.854.136	93,24	
					Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	692.600.000	655.112.885	94,59	
					Prasertifikasi Lahan Pertanian (Bidang)	320.000.000	300.645.000	93,95	
2	309171	Dinas Kelautan & Perikanan	Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya	450.000.000	-	450.000.000	437.493.600	97,22	-
-	2,344,002	-	-	-	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	324.000.000	316.525.000	97,69	-
-	2,344,004	-	-	-	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Perikanan Budidaya	126.000.000	120.968.600	96,01	-
3	309036	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	13.286.172.000	-	13.286.172.000	13.242.295.000	100,00	-
	309036				Pemeliharaan Rutin Jalan	2.497.950.000	7.104.571.000	100,00	-
-	309214				Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan	9.821.170.000	9.821.170.000	100,00	
					Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan	160.268.000	160.108.000	100,00	

					Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional				
					Layanan Internal (Overhead)	806.784.000	806.640.000	100,00	
	309214		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.207.100.000		2.207.100.000	1.949.183.000	100,00	
					Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang Dioperasikan dan dipelihara	1.787.126.000	1.543.112.000	100,00	
					Layanan Perkantoran (Overhead)	419.974.000	406.072.000	100,00	
4	350408	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	302.458.000	-	302.458.000	298.604.700	98,73	
-	5505	-	-	-	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	163.135.000	160.087.700	98,13	
					Pengembangan Usaha Transmigrasi	85.875.000	85.500.000	99,56	
					Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	53.448.000	53.017.000	99,19	
TOTAL				110.093.214.000		110.093.214.000	104.728.734.156	95,13	

Tabel V.3
DATA REALISASI DANA DEKONSENTRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KODE BA OPD		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	Dinas Pendidikan	023	580808	1,472,100,000	1,472,100,000	100.00%
2	Dinas Pertanian	018	309034	4,987,010,000	4,984,207,178	99.94%
3	Dinas Sosial	027	418981	3,688,450,000	3,680,484,000	99.78%
4	Dinas Tenaga Kerja	026	309207	1,248,991,000	1,245,715,000	99.74%
5	Dinas Pendidikan	023	300002	335,575,000	333,868,000	99.49%
6	Sekretariat Daerah	010	309148	274,818,000	273,196,200	99.41%
7	Dinas Pendidikan	023	309139	3,871,849,000	3,841,906,000	99.23%
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	092	300051	2,033,937,000	2,009,539,387	98.80%
9	Dinas Pendidikan	023	361197	975,985,000	960,269,000	98.39%
10	Dinas Tenaga Kerja	026	309020	875,603,000	860,530,000	98.28%
11	Dinas Pangan	018	309208	2,037,700,000	1,995,690,000	97.94%
12	DP3ACSKB	047	305145	1,280,000,000	1,251,528,513	97.78%
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	032	300078	622,875,000	607,225,000	97.49%
14	Dinas Sosial	027	300022	215,937,000	210,463,760	97.47%
15	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	029	400549	550,000,000	531,975,900	96.72%
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	040	400621	1,739,200,000	1,669,859,450	96.01%
17	Dinas Pertanian	018	309032	652,191,000	623,536,401	95.61%
18	Dinas Pertanian	018	309033	284,110,000	269,731,372	94.94%
19	Dinas Sosial	027	309018	3,497,787,000	3,319,269,500	94.90%
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	032	309038	353,130,000	335,039,400	94.88%
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	057	300085	878,119,000	832,887,052	94.85%
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	065	300015	475,000,000	450,302,000	94.80%

23	Dinas Kesehatan	024	309008	4,104,043,000	3,872,748,148	94.36%
24	Dinas Kehutanan	029	300036	777,880,000	733,203,885	94.26%
25	Dinas Tenaga Kerja	026	309024	1,297,635,000	1,222,499,000	94.21%
26	Dinas Koperasi dan UKM	044	300053	2,368,854,000	2,231,359,600	94.20%
27	Dinas Sosial	027	309016	1,655,425,000	1,559,215,000	94.19%
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	087	300065	229,004,000	214,235,000	93.55%
29	Dinas Kesehatan	024	309009	1,318,700,000	1,230,512,252	93.31%
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	032	309041	157,084,000	145,129,900	92.39%
31	Dinas Pertanian	018	305143	2,766,380,000	2,555,039,671	92.36%
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	090	309025	504,024,000	450,614,644	89.40%
33	Dinas Kesehatan	024	309007	2,432,715,000	2,119,430,702	87.12%
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	067	350410	12,713,567,000	11,039,725,257	86.83%
35	Dinas Sosial	027	309017	1,782,166,000	1,547,517,170	86.83%
36	Dinas Kesehatan	024	309006	7,390,764,000	6,369,490,664	86.18%
37	Dinas Pertanian	018	309147	3,053,109,000	2,606,085,856	85.36%
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	032	309040	233,150,000	195,752,400	83.96%
39	Dinas Kesehatan	024	309010	2,838,625,000	2,359,268,000	83.11%
40	Bappelitbangda	055	300092	645,977,000	506,304,313	78.38%
41	Dinas Kesehatan	024	300005	1,082,448,000	840,165,052	77.62%
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	019	309028	2,290,000,000	1,770,215,874	77.30%
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	090	309144	771,343,000	537,358,801	69.67%
44	Dinas Kelautan dan Perikanan	032	309037	564,106,000	372,665,420	66.06%
TOTAL				83,327,366,000	76,237,859,722	91.49%

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.. Adapun rincian kerja sama daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.1

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan pihak ketiga dan luar negeri. Beberapa kerja sama tersebut antara lain tertuang pada Tabel 6.2 dan 6.3

Tabel 6.1

Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Dirapatkan di TKKSD tanggal 3 April 2017	POL PP Prov. Kep. Babel	Pol PP Kabupaten/Kota	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1. Melakukan pembinaan pengawasan serta tindak kepomongprajaan berdasarkan Perda Prov.Kep.Babel No.17/2016. 2. Mengembangkan dan memperluas jaringan kerjasama antara Prov. Kep.Babel dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	1 Tahun		
2.	Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (ditandatangani rabu tgl 12-6-2017 di ruang Tanjung Pendam) Dirapat di TKKSD tanggal 7 Juni 2017	POL PP Prov. Kep.Babel	Pol PP Kab/Kota	Perjanjian Kerja Sama antara Kasat POL PP Prov.Kep.Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov.Kep.Babel	Kesepakatan Bersama antara Kasat POL PP Prov.Kep.Babel dengan Kasat POL PP Kab/Kota se Prov.Kep.Babel	Untuk efektivitas dan optimalisasi tugas SatPOL PP guna terciptanya situasi tertib, aman dan tentram.	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling menguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
4.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemroses Akhir (TPA) Sampah Regional Dirapatkan di TKKSD	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep.Babel	Pemkab Bateng dan Pemkot Pk.Pinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kbaupaten Bateng dan Pemkot Pk.Pinang		1. Meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kesepakatan antar Pemda 2. Melaksanakan kesepakatan yg didasarkan atas azaz kepentingan bersama yg saling menguntungkan dlm hal penyediaan dan pengelolaan tempat pemroses akhir sampah regional.	1 Tahun		
5.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang	Nomor : 415.4/022/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kerja Sama Pembangunan Daerah		Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
6.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/023/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/BAPPEDA/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
7.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA		Kesepakatan Bersama antara Pem. Kep. Babel dengan Pemkab tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/025/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
8.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Bangka Barat	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Bangka Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/026/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		
9.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/027/BAPPEDA/2017 Nomor :	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kesejahteraan masyarakat.			
10.	Kerja Sama Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Pemkab Belitung Timur	Kesepakatan Bersama antara Pem.Kep.Babel dengan Pemkab Belitung Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 415.4/028/BAPPEDA/2017 Nomor :050/1106/I/2017	1. Untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Pemerintah prov. Kep.Babel dengan Pemkab/Pemkot di Prov.Kep.Babel. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pengembangan Bidang Perdagangan	Disperindag	Dinas Perdagangan Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 19/PKS-Perdagangan/I/2017 Nomor : 415.4/030.a/Disperindag/2017	1. Mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep.Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri.	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Pengembangan Bidang Perindustrian	Disperindag	Dinas Perindustrian Sumsel	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan Prov. Sumsel dengan Disperindag Prov.Kep.Babel	Nomor : 20/PKS-Perindustrian/2017 Nomor : 415.4/030.b/Disperindag/2017	1. Mewujudkan pengembangan industri untuk mendukung penguatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan daya saing. 2. Meningkatkan perekonomian regional Kep. Babel dan Sumsel sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengusaha induatri dan menengah kedua wilayah dan pengembangan kawasan strategis induatri.	5 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.	Perjanjian Nomor: 359 1492-II B/PKHPP,119/03/BPPKBPA/2010 dan Nomor: 119/03/BPPKBPA/2010.	Dalam rangka penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDART) dan trafficking.	5 Tahun (2010-2015)	Kurangnya pemahaman kasus kekerasan dari tindak pidana perdagangan orang.	Agar lembaga yang menangani kasus tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.
14	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.	Perjanjian Nomor: 119/2192/BP3AKB/XII/2015 dan 120.2/359/BPKBPA/XII/2015 .	Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang .	5 Tahun (2015-2020)	Kurangnya pemahaman kasus kekerasan dari tindak pidana perdagangan orang.	Agar lembaga yang menangani kasus tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Bidang Kelautan dan perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau	Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Kawasan Selat Karimata.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 35/PK.BAPPEDA/2011. Nomor: 120.1/015/V/2011. Nomor: 68/MoU/X/2011. Tanggal 13 Oktober 2011.	a. Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya lainnya yang saling terkait. b. Memberikan keuntungan, manfaat dan saling mempengaruhi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.	5 Tahun (2011-2016)	-	-
16	a. Infrastruktur b. Perhubungan c. Pariwisata d. Energi dan SDA e. Perindustrian dan Perdagangan f. Kelautan dan Perikanan g. Pendidikan	Bappeda Provinsi	Seluruh provinsi di daratan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau serta Kepulauan Bangka Belitung	Kerjasama RAKORGUB Se-Sumatera	Kesepakatan para Gubernur se-wilayah Sumatera di Provinsi Riau pada tanggal 27 September 2000.	Meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain infrastruktur, perhubungan, pariwisata, energi dan SDA, perindustrian dan perdagangan, kelautan dan perikanan serta pendidikan	Tidak dibatasi waktu	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bappeda Provinsi	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kawasan Selat Karimata	Perjanjian Kerjasama Nomor: 35/PK-BAPPEDA/2011; Nomor: 39/NPK.Gub/Bappeda/2011; Nomor: 120.1/015/V/2011; dan Nomor: 68/MoU/X/2011	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta sumberdaya lainnya yang saling terkait dan Memberikan keuntungan, manfaat dan saling mempengaruhi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama. 	5 Tahun (2011-2016)	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Penyelenggaraan Pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan bidang kelautan dan perikanan.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi.	Provinsi: Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku.	Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan	Kesepakatan Bersama para Gubernur Provinsi Kepulauan dalam Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan bersama yang disebut Deklarasi Kupang pada tanggal 12 November 2009 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Mingkatkan koordinasi antar Provinsi Kepulauan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.	Tidak dibatasi waktu	-	-
19	Investasi dan Penyertaan Modal	Bappeda Provinsi	Wilayah Provinsi se-Sumatera.	Kerjasama Shipping Lines	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C - 13127 HT.01.01. TH. 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Dalam rangka memberikan informasi perkembangan investasi, memberikan rekomendasi dan kemudahan, menjadi fasilitator dengan pihak lain, melakukan promosi serta hal lainnya sehingga tercapai tujuan dari pembentukan PT. SSL itu sendiri.	Tidak dibatasi waktu	-	-

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan dan Pariwisata - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Koperasi dan UKM - Perindag - Pertanian - Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) 	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemkab dan Pemkot se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pertumbuhan, pengembangan dan peningkatan kualitas BUMDes - Percepatan penyusunan Perda (RZWP-3-K) - Membentuk koperasi primer komoditas lada - Membentuk PT. Jamkrida babel sebagai perusahaan daerah - Pengembangan integrasi sapid an sawit - Mempersiapkan menjadi tuan rumah pertemuan kontak Tani Nasional - Program bantuan desa berbentuk bibit lada dan sawit - Even – even pariwisata - Pengembangan resi gudang dalam rangka stabilitas harga lada 			Membentuk Tim Kreatif Digital

Tabel 6.2
Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Ketiga

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Pemeliharaan Aset (Tidak melalui TKKSD, diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Biro Umum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung	P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan P.T. CITAS OTIS ELEVATOR	Perjajanjian kerja sama No:011/01.b/VIII /2017 dan No:C3NEL486-2017	Pemeliharaan Sarana Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			
2.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Keuangan	BAKUDA Prov. Kep.Babel	Bank Sumsel Babel	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perjajanjian kerja sama No:900/006/BAKUDA /2017 dan No:15.1/DIR/P/2017	Untuk mempermudah pelayanan perbankan dalam kas daerah Pemprov Kep. Bangka Belitung dan sebagai kesepakatan Para Pihak dalam meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perbankan kas daerah Pemprov. Kep. Bangka Belitung.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Perjanjian Kerja Sama Bidang Kesehatan (Tidak melalui TKKSD)	Dinas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama No:440/536/Dinkes/2017 dan No:106/KTR/III-02/2017	Sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kep. Babel dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.	1 Tahun		
4.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tidak dirapat di TKKSD diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)	Dinas Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Peningkatan Kompetensi SDM Pemprov Kep. Babel Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Kesepakatan bersama No:421.4/004/Disdik/2017 dan No.: 44/UN39/KS/ 2017	1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pd masyarakat dalam meningkatkan kemampuan profesional pegawai pemerintah di lingkungan Pemprov. Kep. Babel 2. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM di lingkungan	5 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemprov.Kep. Babel khususnya tenaga pendidik/guru			
5.	Perjanjian Kerja Sama di bidang Investasi Produk Unggulan	Dinas PMPTSP	UGM	Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah	Perjanjian Kerja Sama No.: 120.22/171/DPMPTS P/2017	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.	Maret s/d September 2017		
6.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	RSCM	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Dr. (Hc) Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	Nota Kesepahaman No.:440/007.b/RSUD/2017	1. Mesinergikan sumber daya Para Pihak untuk peningkatan dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan 2. Mendorong kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	1 Tahun		
7.	Nota Kesepakatan bidang Pendidikan. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, RSUD Dr. Ir Soekarno, Bappelit banda	Universitas Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.4/030.d/ DISDIK/2017 dan No.: 88/NKB/R/UI/ 2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai kewenangan yang dimiliki	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Kesepakatan Bersama bidang Pendidikan, Pelatihan, Litbang Aparatur Pemerintah	Dinas Pendidikan, Bappelit bangda dan BKPSDM	Universitas Pertahanan	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/038.a/BKPSDM /2017 dan No.: 150/KB/XII/UNHAN/2017	Peningkatan aspek pendidikan, pelatihan dan litbang Aparatur Pemerintah serta pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Bulan		
9.	Kesepakatan Bersama bidang Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Melalui Subsidi Margin/Baghas Pembiayaan Modal Kerja	Kesepakatan Bersama No.: 415.4/033.G/KUMKM/2017 dan No.: 500/BSB/DIR/XII/2017	Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		
10.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama bidang SDM Perhubungan Darat. (Tidak Melalui TTKSD)	Dinas Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia bi Bidang Perhubungan Darat	Perpanjangan PKS No.: 188.44/016.C/ DISHUB/2017	Mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat yang berkompeten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Nota Kesepahaman bidang Ekonomi, Keuangan dan UMKM	Bakuda dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan BI Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Pemprov. Babel	Nota Kesepahaman No.: 19/4/NK/PkP/2017 dan No.: 415.4/017//2017	Mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak dalam mendukung dan mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian Pembangunan	12 Bulan		
12.	Kesepakatan Bersama bidang Litbang dan Pengembangan SDM	BKPSDM dan Bappelit bangsa	Universitas Djuanda Bogor	Kerja Sama dib Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pembangunan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama No. 415.42/019//2017 dan No.: 556/01/NK-K/VIII/2017	Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Kegiatan di Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai kontribusi bagi Pembangunan di Bangka Belitung	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Perjanjian Kerja Sama bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	PKS No.: HK.05.01/XI.3/2537/2017 dan No.: 120.23/009/RSUDP/2017	Mensinergikan Sumber Daya Para Pihak dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Ir. Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Tahun		
14.	Nota Kesepahaman Bidang Kesehatan	RSUD Dr. Ir Soekarno	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun kusumo	Pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Ir. Soekarno	PKS No.: HK.05.01/XI.3/16744/2017 dan No.: 440/007.b/RSUD/2017	Peningkatan Akses dan Kesadaran Masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung untuk hidup sehat.	12 Bulan		
15.	Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Bappelit bangsa	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA	Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pendampingan Pendirian Bank Umum Syariah	Kesepakatan Bersama No.: 420/013/I/2017 dan No.: 010/KB/STEI TAZKIA/VIII/2017	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Nota Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan, Penelitian, Koperasi, UMKM dan Pemberdayaan BUMDes	Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, Dinas KUKM dan Dinas PMD	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba	Pendidikan, Penelitian, Fasilitator UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan BUMDes	Nota Kesepakatan Bersama No.: 415.42/018/I/2017 dan No.: 340/II-4/IE/VIII/2017	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.	12 Bulan		
17.	Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Biro Pemerintahan	POLDA Babel	Perjanjian Kerja Sama Pem. prov. Kep. Babel dengan POLDA Kep. Babel	Nomor: 415.4/035/I/2017 Nomor : B/3955/XI/2017	1. Sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan Dana Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel. 2. Untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa di Wilayah Prov. Kep. Babel yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pembangunan desa di Daerah			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Prov. Kep. Babel.			
18	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	KUKM	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI	Kesepakatan Bersama antara Kanwil Prov. Kep. Babel Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan Pemerintah Prov. Kep. Babel	Nota Kesepakatan bersama Nomor : 017/WPB/130.03/2017 120/002.a/KUKM/2017	1. Sebagai landasan kerja sama para pihak dalam menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk penatausahaan dan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Untuk kelancaran, optimalisasi dan implementasi SIKP dalam rangka mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dlm rangka monev, pembiayaan dan pemberdayaa	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						n pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah.			
19	Program Penyiapan Potensi Produk Unggulan Tidak melalui rapat TKKSD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120.22/125/DPMPTS/2017	Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada	Perjanjian Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada tentang Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Tahun Anggaran 2017	Nota Kesepahaman Bersama No:180/09/BAPPEDA/2016 No:2573/P/Dir-KA/2016	Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Bulan		
20	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sektor kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pembangunan kepariwisataan nasional.			
21	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	POL PP Prov. Kep. Babel	Kepolisian Daerah Prov. Kep. Babel	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		POL PP Prov. Kep. Babel			
22	Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TKKSD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 556/007/DISBUDPAR/2017 Tanggal 18 Mei 2017		Mengembangkan sector kepariwisataan terutama dalam bidang homestay desa wisata yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.			
23	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov. Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemkot Pk. Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian,			

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para pihak.</p> <p>2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan</p>			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kehutanan.			
24	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov. Kep. Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
25	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor: 415.43/020/I/2017	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerinta Daerah Bidang Jasa Konstruksi di Prov.Kep.Babel	Dinas PU dan penataan Ruang Prov.Kep. Babel	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaa n Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan Kepala Dinas PU dan PR Prov.Kep.Babel		<p>1. Terjalin kerja sama dan alih informasi antara PARA PIHAK dlm rangka pengembangan bidang jasa konstruksi di Prov.Kep.Babel</p> <p>2. Meningkatkan peran serta pemerintah dalam pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia bidang konstruksi di Prov.Kep.Babel.</p> <p>3. Menjamin terwujudnya mutu konstruksi yang berdaya saing di Prov.Kep.Babel</p>		Dirapatkan di TKKSD tanggal	Belum ditindaklanjuti krn blm ada MoU

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan dan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BAPPEDA Prov.Kep. Babel	Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Pemkot Pk.Pinang	Nomor : 707/010/BAPPEDA/2017 Nomor : PKS.9/LITBANG/SET/KUM.3/7/2017	1. Untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara lestari melalui kerja sama penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan di lingkungan hidup dan kehutanan yang bermanfaat bagi para pihak. 2. Untuk mendukung tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang			

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						mendukung pencapaian program rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
28.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Pemerintah dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	BNN Prov. Kep. Babel	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 730/009/III/2017 Nomor : KB/001/VII/BNNP/2017		Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnnya kerja sama dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Optimalisasi Pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPMPD Prov.Kep.Babel	IPDN Jatinangor	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri		Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggungjawaban.	1 Tahun		
30	Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah	Inspektorat	BPKP	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		Mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman Republik Indonesia	Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun		
32	Penelurusan dan Pembinaan Talent Scouting Penerimaan Calon Anggota POLRI (Tidak melalui TKKSD)	PEMPROV	POLDA BABEL	Kesepakatan Bersama antara POLDA BABEL dengan Pemprov Kep. Babel	Nomor :B/MoU-25/IX/2017 Nomor : 415.4/016/PEMPROV/2017	1. Untuk menetapkan langkah awal dalam menjalin kerjasama dalam rangka penelurusan pembinaan dan pemanfaatan jalur Talent anggota Polri sehingga mampu mendapat calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakan dengan prinsip clean dan clear serta humanis. 2. Sebagai dasar dan pedoman	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						bagi kegiatan penelurusan, pembinaan dan pemanfaatan jalur talent scouting penerapan talent scouting dalam rekrutmen anggota Polri. 3. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polda Kep. Babel untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip clean and clear serta humanis.			
33	Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dirapatkan di TKKSD senin, 28-8-2017)	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nota Kesepahaman	Nomor: / /PERTANIAN/IX/2017 Nomor:415.43/020/I/2017	Saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak	1 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJASAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA	HASIL/TUJUAN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DP3ACSKB	Kanwil Kemenag	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. Kep.Babel dengan Kanwil Kemenag Prov.Kep.Babel	Nomor : 463/499/DP3ACSKB/2017 Nomor : 599/2017	1. Untuk membangun komitmen seluruh Kab/Kota se Prov.Kep.Babel dalam menurunkan angka pernikahan usia anak (usia dini). 2. Untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini di Prov. Kep. Babel.	1 Tahun		

Tabel VI .3
Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Luar Negeri

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Momorandum Saling Pengertian Bidang Pertambangan (dibuat oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM)	Bappelit bangda dan Dinas ESDM	Institut Federal Geosain dan Sumber Daya Alam Republik Federal Jerman	Pertukaran Kerjasama Percontohan Menyangkut Kesenambungan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (MOU Antara Republik Indonesia dengan Negara Jerman)	MOU	Mendukung pengembangan pengetahuan dan jaringan untuk bisa menerapkan teknik terbaik di lokasi reklamasi tambang timah antara para pemangku kepentingan Indonesia yang cakap.	2 (dua) Tahun		
2.	MOU Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM	HongFu International Technology, CO, Ltd, Taiwan	International Internship Partnerhsip And Starta-1 Education In Taiwan	MOU No.424/008/DISDIK/2017	Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Srata-1	5 (lima) Tahun		
3.	LOI bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	DPMPPTSP	GlobalPorts Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pariwisata, SDM dan Perhubungan	-		
4.	LOI bidang Penelitian dan Pembengembangan Restorasi Ekologi dan Lingkungan	DPMPPTSP	M Grass Internationak Pte Ltd	Letter Of Intent For Cooperation	LOI	Melakukan Survei untuk mendukung Penelitian dan Pengembangan dalam restorasi ekologi dan lingkungan	-		
5.	LOI bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM	Bappelit bangda	Universitas Kebangsaan Malaysia	Letter Of Internt For Collaboration	LOI	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan SDM dan memperkuat hubungan internasional	-		

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi khususnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain, koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor DJPb) dalam hal koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program/kegiatan bersumber dari dana APBN di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Forum Komunikasi dalam hal Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Analisis/Kajian Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama dengan Kantor DJPb juga dalam hal penyerahan DIPA untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pembentukan Forum Koordinasi Instansi Vertikal.

Kerjasama dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban serta diadakannya Rapat Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah, kabupaten/kota, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana-dana APBN yang ada di wilayah Provinsi, dengan koordinasi dengan pejabat pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di instansi vertikal se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka percepatan pembangunan, Instansi Vertikal serta Forkopimda telah melakukan sinergitas melalui dana hibah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, dalam hal pembinaan batas wilayah berusaha semaksimal mungkin dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antara provinsi dengan provinsi dan antar kabupaten/kota dengan menggunakan berbagai alternatif cara-cara yang prosedural normatif, kondusif dan konstruktif. Hal-hal ini dilakukan agar batas wilayah yang diperselisihkan tidak menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk menghindari konflik batas wilayah antar kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya penyelesaian batas wilayah antar kabupaten/kota secara intensif dan persuasif. Pembinaan batas wilayah dilaksanakan melalui program pendataan kembali terhadap batas wilayah administrasi antar kabupaten/kota yang mengalami konflik perbatasan. Penyelesaian konflik perbatasan antar kabupaten/kota dilakukan dengan melakukan pendataan ulang dan survei ke lapangan dan menggunakan data dan

informasi dari instansi pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan camat, lurah/kades serta tokoh masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional di berbagai aspek khususnya pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Pada Tahun 2017, dengan memperhatikan rencana strategis dan kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan menganggarkan dua kegiatan yang berkenaan dengan program pengembangan wilayah perbatasan, dua kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota. Salah tujuan pelaksanaan kegiatan diatas adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah bagi aparat pemerintah terkait dalam penentuan penetapan dan penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dan antar provinsi dan juga menetapkan batas pasti di lapangan melalui pilar batas yang akan dipasang.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota dengan hasil berupa rekomendasi dan kesepakatan .

Dalam hal pembinaan batas wilayah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antara provinsi dengan provinsi dan antar kabupaten/kota dengan mengedepankan cara-cara yang kondusif dan konstruktif, agar batas wilayah yang diperselisihkan tidak menimbulkan “friksi dan gejolak” di masyarakat dengan tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan mempedomani aturan yang berlaku. Kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan batas wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diupayakan untuk mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun fisik dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Langkah awal pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dengan melaksanakan kegiatan rapat penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Juni 2015 bertempat di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara nomor 253.1/VI/I/2015 dan/atau 390/966.4/I/2015, kemudian dilanjutkan dengan turun ke lapangan. Pada tanggal 6 Januari 2016 di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diadakan Rapat Perubahan Peta Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian dari kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur tahun anggaran 2016. Hasil rapat tersebut adalah usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 136/47/I tanggal 19 Januari 2016. Adapun kegiatan telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu : Penelitian Dokumen Batas; Pelacakan Batas; Pembuatan Pilar Batas Permanent; Pengukuran Koordinat Pilar dan Pembuatan Peta Batas Daerah. Pada kegiatan tersebut dipasang 7 (tujuh) Pilar Batas Antara (PBA) dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 136/47/I perihal usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 (batas daerah antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur).

Pada tahun anggaran 2016, dengan berpedoman pada Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan penetapan batas wilayah antara Provinsi Sumatera dengan Provinsi Selatan Kepulauan Bangka Belitung nomor 136/779/I tanggal 14 Agustus 2015, melalui

kegiatan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Antar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemasangan 8 (delapan) Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Berita Acara Penyiapan Dokumen Batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan nomor 126/601.a//2013, nomor 136/133//2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Pengajuan Usulan Permendagri tentang Batas Wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan Kesepakatan nomor 136/041//2015, nomor 136/110.a//2015 dan Berita Acara Kesepakatan Dokumen Penegasan Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan nomor 020/BA//2015, nomor 136/13//2015 dimulai dari Tanjung Genting Kabupaten Bangka Barat, Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat, Pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Tanjung Bedaun/Permis, Tanjung Panggung, Batu Bedaun, Tanjung Labun dan Pulau Dapur Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dimulai sejak tahun 2015, pada prinsipnya kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan sudah tidak ada permasalahan dan sudah diusulkan untuk diterbitkan segera Permendagri kepada Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016. Untuk batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka sudah dilaksanakan pertukaran dokumen, namun belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah antara kedua Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Pemerintah Kota Pangkalpinang berpedoman ke Peta Kesepakatan Tahun 1992, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangka berpedoman pada nilai sejarah atau historis wilayah yang berbatasan tersebut, sehingga belum dapat diusulkan atau direkomendasikan untuk diterbitkan Permendagri tentang batas wilayah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Proses penyelesaian sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gugusan Pulau 7) dengan Provinsi Kepulauan Riau sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal menunggu keputusan dari kementerian itu sendiri untuk ditetapkan. Sedangkan sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan sudah dianggap tidak bermasalah dan telah dilakukan pemasangan pilar batas antara 2 provinsi tersebut.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 (empat) segmen yang sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri akan tetapi sengketa masih saja terjadi dikarenakan ada kabupaten yang menganggap bahwa keberadaan garis imajiner yang menghubungkan antar PBU belum sesuai dengan fakta di lapangan yaitu 2 segmen batas yang belum ditetapkan permendagri antara lain segmen batas

Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang dan segmen batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang serta 1 segmen batas yang sudah disepakati draft revisi permendagrinya yaitu segmen batas Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur

➤ **Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- l. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/505/I/2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota;
- m. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/001.a/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

➤ **Maksud, Tujuan, dan Sasaran.**

Maksud, tujuan dan sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan.

b. Tujuan

1. Untuk menciptakan tertib Administrasi Kewilayahan antar level Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Untuk menghindari konflik didaerah perbatasan;
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban didaerah perbatasan khususnya diwilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi;

c. Sasaran

Terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

➤ **Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar kabupaten/kota dan provinsi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan kegiatan rapat koordinasi penyelesaian penegasan batar daerah antar Kabupaten/Kota antara lain:

1. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
2. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
4. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten/kota yang berselisih, dan untuk mengetahui potensi apa yang terkandung di dalamnya, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
5. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten/kota serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
6. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten/kota serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
7. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta petunjuk dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Koordinasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

➤ **Hasil Kegiatan**

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota ini adalah :

1. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 23 Maret 2017 tentang penentuan lokasi pemasangan pilar batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang;
2. Telah dilaksanakan survey dilapangan terkait kegiatan topomoni yaitu pendampingan survey pendahuluan pada tanggal 13 April 2017 di Bangka Tengah, tanggal 18 s/d 19 April 2017 di Bangka Selatan serta tanggal 17 s/d 19 April 2017 di Belitung;
3. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penentuan titik lokasi pemasangan pilar pada kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/Kota ke Bangka Tengah pada tanggal 4 April 2017;
4. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2017 terkait koordinasi fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang;
5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2017 guna merumuskan sejumlah opsi sebagai bahan kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang;
6. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 14 September 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
7. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah di PBU 21 (Gapura Jalan Selan) pada tanggal 25 September 2017;
8. Telah dilaksanakan survey dilapangan pada titik lokasi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 27 s/d 29 September 2017;
9. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 September 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
10. Telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Belitung dalam rangka mengikuti rapat koordinasi sebagai tindak lanjut penyusunan Draft Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017;
11. Telah dilaksanakan survey di lapangan terkait pelacakan pilar batas serta pelurusan dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang mulai dari PBU 23 sampai dengan PBU 30 pada tanggal 17 Oktober 2017;
12. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka fasilitasi penarikan garis imajiner batas antar Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

Tengah mulai dari PBU 21 sampai dengan PBU 30 pada tanggal 23 Oktober 2017;

13. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ;
14. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka pelacakan dan penelusuran usulan penarikan garis batas imajiner antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017;
15. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 31 Oktober 2017 tentang penarikan usulan garis imajiner dari PBU 21 sampai dengan PBU 30;
16. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 7 November 2017 dalam rangka menindaklanjuti sejumlah fakta dan data yang ditemukan saat survey lapangan pada tanggal 26 dan 27 November 2017;
17. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penelusuran dan penarikan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah dari PBU 21 sampai dengan PBU 30 dan berakhir pada batas laut pada tanggal 8 November 2017;
18. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penelusuran dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dari PBU 20 sampai dengan PBU 21 pada tanggal 15 November 2017;
19. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 20 November 2017 terkait percepatan pelaksanaan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
20. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah tahap akhir antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 November 2017 guna mempercepat tercapainya kesepakatan terkait batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah

➤ **Mekanisme Pelaksana**

Mekanisme pelaksana pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim dan Panitia
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/505/I/2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/001.a/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

2. Rapat Pembinaan dan Penyelesaian dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten/Kota;
3. Penyampaian rencana fasilitasi dan tata cara penyusunan usulan garis batas;
4. Peninjauan ke lapangan atas batas daerah yang belum di sepakati;
5. Koordinasi, konsultasi dan penyampaian progress kegiatan ke Kementerian Dalam Negeri;
6. Koordinasi dan konsultasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG);
7. Koordinasi ke Kabupaten/Kota.

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

- a. Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka.
Batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka belum ditetapkan dengan Permendagri. Oleh karena itu, Tim PBD Kabupaten Bangka dengan Tim PBD Kota Pangkalpinang sudah melaksanakan pelacakan dan penegasan Pilar Batas Utama (PBU) yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta kesepakatan tentang garis-garis imajiner batas daerah antara kedua kabupaten/kota tersebut.

Sesuai dengan berita acara rapat nomor: 02/PPBD/IX/2017 pada Hari Kamis tanggal 14 September 2017, bertempat di Ruang Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu untuk penyelesaian batas administrasi antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan dokumen usulan dari kedua belah pihak dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempercepat penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat akhir tahun 2017.

- b. Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.
Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan pelacakan dan penarikan garis imajiner serta rapat untuk menyepakati opsi-opsi penarikan garis batas imajiner. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga tercapai. Akhirnya, berdasarkan berita acara rapat nomor: 07/PPBD/XII/2017 pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu penarikan garis imajiner antar PBU yang menjadi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan dikaji Tim PBD Provinsi berdasarkan opsi-opsi yang telah disampaikan oleh masing-masing dengan mempedomani Peta Kesepakatan 1992, hasil keputusan Gubernur tersebut akan disampaikan ke Pimpinan Daerah masing-masing untuk ditanggapi dalam batas waktu

yang ditentukan, tanggapan dari Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah akan dirumuskan serta dikaji ulang oleh Tim PBD Provinsi dan hasil rumusan garis imajiner tersebut bersifat mutlak menjadi Keputusan Gubernur dan Tim PBD Provinsi akan menjadwalkan Rapat Penandatanganan Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah terkait penarikan garis imajiner definitif yang menjadi bahan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

c. Batas Daerah Antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Pimpinan dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di tahun 2016. Pada tahun 2017, dalam rangka finalisasi rancangan permendagri batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengundang 2 kabupaten tersebut yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan rapat.

Pada saat rapat, terdapat temuan. Salah satunya yaitu nama Rupa Bumi sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, sehingga tercapai kesepakatan saat rapat untuk dilakukan survey ulang ke lapangan antara tim PBD Kabupaten Belitung dan tim PBD Kabupaten Belitung Timur yang difasilitasi Tim PBD Povinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan pihak Kementerian Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setelah peninjauan ke lapangan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor 01/BAD I/X/2017 pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 disepakati bersama yaitu nama sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah Sungai Aik Keladi bukan Sungai Aik Langau dan peserta rapat sepakat untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Permndagri dan Peta Kesepakatan Batas Daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Bantan 1 Hotel Grand Hatika Tanjung Pandan Belitung.

2. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dan provinsi adalah

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan draft kesepakatan batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Menteri Dalam Negeri sebagai revisi terakhir Permendagri RI No.16 Tahun 2008 yang berupa Berita Acara Rapat Nomor: 01/BAD I/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan lampiran peta batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur .
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten /Kota, sehingga semua daerah tidak ada lagi permasalahan.

3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasal 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan Biro Pemerintahan. Mengacu dari pergub tersebut organisasi perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Biro Pemerintahan.
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	1
		Gol. III	3
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	4
II.	Pangkat dan Golongan	Gol. IV	1
		Gol. III	3
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	4
III.	Kualifikasi Pendidikan	S3	
		S2	1
		S1	3
		D. IV	-
		D. III	-
		D. II	-
		D. I	-
		SMA/ sederajat	-
		SMP/ sederajat	-
		SD/ sederajat	-
Jumlah	4		
IV.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural (eselon):	
		Eselon I.b	-
		Eselon II.a	-
		Eselon II.b	-
		Eselon III.a	1
		Eselon III.b	-
		Eselon IV.a	1
		Eselon IV.b	-
		Eselon V.a	-
		Jumlah	2
		Fungsional:	
Tertentu	-		

No.	Kriteria	Golongan Ruang	Total
I.	Jumlah Pegawai	Gol. IV	1
		Gol. III	3
		Gol. II	-
		Gol. I	-
		Jumlah	4
		Umum	2
		Jumlah	2
JUMLAH TOTAL			4

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai Ancaman bencana alam yang sering terjadi seperti bencana Bencana Kebakaran, Bencana Banjir, Bencana Puting beliung, Bencana Kekeringan, Bencana Tanah Longsor, Bencana Konflik, Bencana Kegagalan Teknologi, Bencana Kebakaran, Bencana Pasang Air Laut, Bencana Epidem/Kejadian Luar Biasa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah bergerak mengikuti penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditingkat masyarakat juga sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok siaga bencana, dari kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2012 s.d. 2017, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia yang dipadukan dengan data dari catatan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data DIBI, BNPB tahun 2011, dan BPBD Bangka Belitung, 2011), terdapat 10 jenis bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ancaman bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, konflik sosial serta gagal

teknologi. Penentuan tingkat ancaman bencana menggunakan matriks tingkat ancaman, dengan memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam tiga kategori yaitu : rendah (0,0 –0,3), sedang (> 0,3 – 0,6), dan tinggi (> 0,6 –1,0).

Skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam tigakategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut :

- a) Rendah : 0,0 - 0,3, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/ Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20 persen
- b) Sedang: >0,3 - 0,6, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500 – 1000 jiwa/Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan 20 persen –40 persen
- c) Tinggi : >0,6 – 1,0, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km² , dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40 persen.

Tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar IV.1
Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Multi Bencana
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAPAR (JIWA/KM ²)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH			 1. EPIDEMI dan WABAH PENYAKIT 2. GEMPA BUMI
	SEDANG			1. CUACA EKSTREM 2. KONFLIK SOSIAL 3. TANAH LONGSOR 4. GELOMBANG EKSTREM & ABRASI
	TINGGI	 BANJIR		1. KEBAKARAN HUTAN dan LAHAN 2. GAGAL TEKNOLOGI 3. KEKERINGAN

	Tingkat Ancaman Rendah
	Tingkat Ancaman Sedang
	Tingkat Ancaman Tinggi

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar rendah adalah banjir.
- Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman rendah dan indeks penduduk terpapar tinggi adalah epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain : cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, konflik sosial dan tanah longsor.
- Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain: Kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, dan kekeringan.

Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Beberapa jenis ancaman (peta ancaman) telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, Jenis ancaman yang telah memilikistandar SNI tersebut meliputi :Gempa bumi (tim sembilan revisi gempa), Longsor (ES DM), Gunung api (PVMBG), Banjir (PU).

Sedangkan ancaman non SNI merupakan peta ancaman yang belum diperoleh dari Kementerian/Lembaga terkait. Zonasi ancaman ini harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Jenis ancaman non SNI meliputi: Tsunami, Konflik Sosial, Kegagalan teknologi, Pandemi dan Wabah Penyakit, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi. Dari kejadian bencana yang tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana antara lain:

- a. Dilakukan penyeleksian terhadap korban yang terkena bencana.
- b. Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban bencana yang telah diseleksi.
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap bantuan yang diberikan.
- d. Menyusun peta rawan bencana untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Turun langsung kelapangan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana saat tanggap darurat
- g. Melakukan rekonstruksi terhadap semua sektor pasca bencana

2. Status Bencana

Kejadian-kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dikategorikan dalam status bencana yang sifatnya regional ataupun lokal. Ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat ditentukan statusnya dalam kategori Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal (Kabupaten/Kota) tergantung dari besar skala kejadiannya, antara lain :

- a) Banjir
Dari hasil kajian risiko maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman banjir tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar rendah. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir sedang.
- b) Cuaca Ekstrem
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman cuaca ekstrem sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- c) Tanah Longsor
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman tanah longsor sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- d) Gempa Bumi
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gempa bumi rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang.
- e) Pandemi dan Wabah Penyakit
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman pandemi dan wabah penyakit rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman epidemi dan wabah penyakit sedang.

- f) Kebakaran Lahan dan Hutan
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi.
- g) Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gelombang ekstrim dan abrasi sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tinggi.
- h) Kekeringan
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kekeringan tinggikan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kekeringan tinggi.
- i) Konflik Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman konflik sosial sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Maka tingkat ancaman konflik sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tinggi.
- j) Gagal Teknologi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gagal teknologi tinggi.

Selama ini dalam praktek penanggulangan bencana masih ditekankan pada “saat” serta “setelah (pasca)” terjadinya bencana. Sementara itu pada tahap “sebelum (pra)” terjadinya bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang “rawan bencana” untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Setiap ancaman atau bahaya yang terdapat di suatu daerah memiliki risiko yang berbeda dari masing-masing jenis bencana. Tetapi pada umumnya ancaman ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah dan diatasi, misalnya “daerah gunung api, daerah gempa, daerah longsor dan sebagainya. Sedangkan yang masih mungkin untuk dilakukan perubahan dan perbaikan adalah kerentanan. Untuk meningkatkan kapasitas, harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat di suatu daerah dengan misalnya tidak berdiam pada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tersebut.

3. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Urusan Wajib Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2017 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Anggaran di APBD Induk sebesar Rp 15.822.560.173,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.585.514.373,-, sedangkan belanja langsung sebesar Rp 11.237.045.800,-.

Pada tahun 2017 urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 32 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.599.073.161,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp11.245.523.682,- atau 90,01%, dengan sisa anggaran sebesar Rp813.424.681,- atau 9,90%, dengan komposisi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.879.543.614,- atau 92,29% dengan sisa anggaran Rp323.922.747,- atau 7,71% dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.365.980.068,- atau 87,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.029.626.732,- atau 12,26% dari total Pagu anggaran.

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Keterbatasan kewenangan provinsi sebagai koordinator, motivator dan katalisator percepatan upaya pengurangan risiko bencana dikabupaten/kota membutuhkan kebijakan dan strategi khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah provinsi terbatas hanya pada aset provinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah provinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam mengantisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Penguatan kelembagaan dan partisipasi segala pihak dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya menjadi salah satu fokus pencapaian yang perlu diperhitungkan. Selain itu mekanisme dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan darurat bencana pada status darurat bencana provinsi juga perlu diperkuat. Keseluruhan komponen ini perlu ditunjang dengan strategi signifikan untuk pengurangan risiko bencana dalam wilayah kewenangan provinsi. Oleh karenanya kegiatan bencana dan daerah yang berpotensi menjadi kewenangan provinsi perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Proses identifikasi ini telah melahirkan zona prioritas penanggulangan bencana provinsi. Secara umum Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana adalah :

- a. Mengsiagakan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
- b. Mengadakan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- c. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana
- d. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu
- e. Penelitian, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana
- f. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- g. Perlindungan masyarakat dari bencana
- h. Sarana dan Prasarana antara lain Peralatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berupa peralatan penyelamatan (perahu dolpin, Kapal LCT, Alat komunikasi, tenda darurat, kendaraan untuk penanggulangan bencana.
- i. Bantuan untuk masyarakat terdiri dari :
 1. Tanggap darurat bencana yang meliputi bahan pangan, bahan sandang, peralatan dapur keluarga, peralatan dapur umum.
 2. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya.

- a. Bencana Angin Puting beliung
- b. Bencana Banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut
- c. Bencana Kebakaran.
- d. Bencana Tanah Longsor (kecelakaan kerja penambang TI)
- e. Bencana Tersambar petir

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Ada empat kriteria pemilihan lokasi KEK. Pertama, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Kedua, didukung oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ketiga, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak di wilayah yang memiliki sumberdaya unggulan. Keempat, mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK dapat diusulkan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun badan usaha. Usulan pemerintah provinsi langsung disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha disampaikan melalui pemerintah provinsi. Baik usulan provinsi maupun badan usaha, harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memfokuskan pada peningkatan ekspor dan investasi pada beberapa kawasan khusus yang memang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki provinsi ini yang dapat menjadi peluang dalam menarik investasi, diantaranya letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat ideal bagi pengembangan pusat logistik dan distribusi karena dilewati oleh jalur maritim internasional dan posisi Indonesia terletak di tengah pasar yang sangat besar, yaitu pasar ASEAN.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdapat dua kawasan

yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung dan Kawasan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut telah diusulkan kepada yang ditunjukkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Bangka Belitung.

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah (Ayu Prima Yesuari, 2011).

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2017 tidak terjadi konflik berbasis sara dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, telah terjadi bentrok atau perkelahian massal di beberapa tempat, yakni bentrok antar kelompok, sebanyak 1 kali. Sedangkan bentrok warga dengan aparat keamanan, perkelahian antara warga antar desa/kelurahan,

dan perkelahian antar suku, tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara keseluruhan jumlah perkelahian massal yang terjadi tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015. Pada tahun 2016 terjadi 3 kali perkelahian massal, sedangkan pada tahun 2015 terjadi 6 kali perkelahian massal.

Tabel VI.4
Jumlah Perkelahian Massal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Jenis Perkelahian Massal Tahun 2017

No.	Jenis Perkelahian Massal	Jumlah	Keterangan
1	Antar Kelompok Warga	1	- Bentrok antara warga Desa Air Lintang Tempilang dengan kelompok Penambang Ilegal (warga Selapan) di Tempilang, tanggal 10 Desember 2017. Permasalahan: Awal cekcok mulut, pengeroyokan yang mengakibatkan saudara Peki tewas (warga Tempilang). Oleh karena itu, warga Tempilang marah, mencari pelaku dan merusak fasilitas tambang. Sebagian warga mengungsi ke Polesek Tempilang.
2	Warga Antar Desa/Kelurahan	-	-
3	Antar Suku	-	-
4	Antar Pelajar/Mahasiswa	-	-
5	Warga dengan Aparat Keamanan	-	-
	Jumlah	1	

Sumber: Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum
Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, OPD yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasal (4) dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan sub Kebakaran dan Penyelamatan).

3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Secara umum jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2017 sebanyak 82 orang, yang terdiri 76 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, pangkat golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IV c), dan terendah adalah Pengatur Muda (II a). Sementara itu pangkat dan golongan yang paling banyak adalah Pengatur (II c) sebanyak 19 orang, kemudian diikuti Penata Muda (III a) sebanyak 15 orang dan Penata Muda Tk. I (III b) sebanyak 14 orang.

Adapun jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2017 yang bertugas di lapangan (selain Sekretariat) sebanyak 62 orang, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Berdasarkan eselonering, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, eselonering tertinggi adalah II a yang diduduki oleh Kasat Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian eselon III a yang merupakan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) orang, eselon IV a yang merupakan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, sebanyak 11 (sebelas) orang, dan selebihnya non eselon.

Berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, tingkat pendidikan tertinggi pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pasca sarjana/ S-2 sebanyak 6 orang, sedangkan terendah adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 35 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana S1 sebanyak 40 orang.

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pangkat Golongan, serta Jenis Kelamin Per Desember 2017

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/ IV c	1	0	1
2	Pembina Tk. I/ IV b	1	0	1
3	Pembina/ IV a	3	1	4
4	Penata Tk. I/ III d	1	2	3
5	Penata/ III c	8	2	10
6	Penata Muda Tk. I/ III b	14	0	14
7	Penata Muda/ III a	15	0	15
8	Pengatur Tk. I/ II d	2	0	2
9	Pengatur/ II c	18	1	19
10	Pengatur Muda Tk. I/ II b	1	0	1
11	Pengatur Muda/ II a	12	1	13
	Jumlah	76	7	83

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per Desember 2017 Yang Bertugas Di Lapangan
(Selain Sekretariat)

No.	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan
1	ARDIANTO, SH.,M.Si	19710802 199703 1 004	IV b	Kabid Peningkatan Personil
2	MASHUN, S.Sos	19660911 198906 1 001	IV a	Kabid Keterlibatan Umum & Ketentraman Masyarakat
3	CIPTO NUGROHO, SH	19670518 198909 1 001	IV a	Kabid Penegakkan PerUU Daerah
4	YURINALIKA, SH	19680708 200212 2 001	III d	Kabid Pelindungan Masyarakat
5	MUSTARIH	19631005 198503 1 009	IV a	Kasi Pengembangan
6	SURYANTO, S.AP	19630103 198809 1 001	III D	Kasi Diteksi Dini
7	TUGIMO,S.AP	19640808 198503 1 005	III c	Kasi Pengawasan, Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga
8	R. SANDYAJI, S.STP.,M.AP	19851230 200412 1 001	III c	Kasi Penertiban, Operasi dan Pengendalian
9	MOHAMAD ANWAR,SH	19730219 200804 1001	III c	Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan
10	SURAYA, SH	19750910 200212 1 002	III c	Kasi Pembinaan
11	ISDARTO, S.Sos	19710517 200604 1 008	III c	Kasi Sat Linmas
12	LIO NINDRA HANDIKA, SH.,MH	19820211 200701 1 003	III c	Kasi Bina Potensi Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
13	RUSMIN NURYADIN,SH	19710203 200604 1 006	III b	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
14	ISMEI JUPANDI, S.AP	19780521 200801 1 009	III b	Analisis Keamanan
15	SARMADI, S.AP	19740627 200604 1 011	III b	Pengelola Data Satuab Pengawas Internal
16	DUMEIRYDIANSYAH,SH	19770517 200701 1 006	III b	Analisis Keamanan
17	ACHMAD BENY SUMARMAN,S.AP	19781124 200801 1011	III b	Analisis Keamanan
18	SAHRUL, S.AP	19790816 200801 1 008	III b	Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan
19	JUNIARDI, S.AP	19800602 200701 1 004	III b	Analisis Masalah Sosial
20	SUMARNO,S.AP	19810814 200701 1 005	III b	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatue
21	FEMI ARDIANSYAH, S.AP	19840214 200801 1 002	III b	Pengelola Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
22	MARYO SUPITRA,SH	19880513 201402 1 001	III a	Analisis Hukum
23	EDI DAHRUL, S.AP	19760323 200212 1 004	III a	Analisis Bencana
24	ZUHRI ARIFFIYANTO PUTRA, S.IP	19760312 200604 1 004	III a	Pengelola Data Satuan Pengawas Internal
25	ISNANTO, S.AP	19731228 200604 1 009	III a	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah

26	DODY CHANDRA, S.AP	19810129 200801 1 005	III a	Analisis Keamanan
27	DAVID CASIDY, S.AP	19830426 200801 1 009	III a	Analisis Sumber Daya Manusia
28	MAULID, S.AP	19780719 200701 1 003	III a	Analisis Keamanan
29	DARMAWI, S.AP	19790312 200701 1 007	III a	Analisis Keamanan
30	HENDRA, S.IP	19771103 200701 1 009	III a	Analisis Bencana
31	MUHAMAD RIDWAN, SH	19770411 200801 1 006	III a	Analisis Keamanan
32	BIJI MUHAMMAD GUNTORO, SH	19881025 201502 1 004	III a	Calon Polisi Pamong Praja Pertama
33	DEKKY JAYA SAPUTRA, SH	19890114 201502 1 002	III a	Calon Polisi Pamong Praja Pertama
34	MAUREN	19681212 200604 1 013	II c	Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
35	ACHYAR	19710302 200604 1 010	II c	Petugas Keamanan
36	RACHMAD SURYAWAN	19710531 200604 1 005	II c	Petugas Keamanan
37	ARWIN JULIANDI	19710726 200604 1 003	II c	Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
38	ANDIKA	19710926 200604 1 004	II c	Petugas Keamanan
39	AGUS MULYANA	19720819 200604 1 010	II c	Petugas Keamanan
40	ALBI ABDULLAH	19721002 200604 1 008	II c	Petugas Keamanan
41	YULIMAN ANDRE	19740727 200604 1 010	II c	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan
42	ADERI	19780405 200212 1 005	II c	Petugas Keamanan
43	KARIMAN	19670703 200701 1 009	II c	Petugas Keamanan
44	NURUL IKHSAN	19790407 200701 1 007	II c	Petugas Keamanan
45	SUDHARMANTO	19790624 200701 1 004	II c	Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
46	WAHYU ANDARI	19800707 200701 1 003	II c	Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
47	ARIYANTO	19810308 200701 1 002	II c	Pengadministrasi Hukum
48	HERMANTO	19700511 200801 1 011	II c	Petugas Pengejaran
49	MUSTAGHFIRI	19790506 200801 1 012	II c	Petugas Keamanan
50	M. HENDRI	19751201 200801 1 011	II b	Petugas Keamanan
51	AFRIANTO	19650418 200701 1 005	II a	Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
52	ATIN MUMPRAYITNO	19800216 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula

53	ARISKA WIJAYANTO	19850417 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
54	JONI BUDI SANTOSA	19880617 201502 1 004	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
55	HARIS SAPUTRA	19890919 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
56	RICARD OBERTWO	19901015 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
57	IRVIANDY PRATAMA	19910605 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
58	ZULPHAN MUGHNI BAKAR GANI	19911109 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
59	MUHAMMAD IRSAN BASKARA	19930928 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
60	BERRY YOLANDA	19940105 201502 1 002	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
61	MUHAMMAD CACA RASKY	19940822 201502 1 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
62	EKA FITRIA NINGSIH	19950830 201502 2 001	II a	Calon Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2017

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II a	1	0	1
2	III a	3	2	5
3	IV a	10	1	11
4	Non Eselon	62	4	66
	Jumlah	76	7	83

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/ S2	5	1	6
2	Sarjana/ S-1	36	4	40
3	Diploma-III	1	1	2
4	SLTA	34	1	35
	Jumlah	76	7	83

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Penanggulangan dan kendalanya

Salah satu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP adalah dengan menggiatkan kegiatan patroli. Patroli merupakan kegiatan mengamati dan mengawasi terhadap suatu wilayah dengan tujuan menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di masyarakat. Secara umum kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah personil anggota Satpol PP dan minimnya sarana patroli itu sendiri, karena cakupan wilayah patroli harus mencapai seluruh wilayah kecamatan dan desa di masing-masing daerah.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan terutama POLRI dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan sangat diperlukan, terutama terhadap kejadian-kejadian yang menjurus anarkis. Selain pada saat kejadian, Polri juga dapat meminimalkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan juga melakukan patroli dan mengoptimalkan fungsi intelejennya serta penguasaan wilayah oleh anggota.

6. Sumber dan jumlah anggaran

Pada tahun 2017, anggaran Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibiayai melalui APBD. Total anggaran APBD sebesar Rp 21.560.297.604,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 9.545.424.054,- dan belanja langsung sebesar Rp 12.014.873.550,-.

BAB VII PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 masih terdapat kekurangan baik dalam penyajian data maupun teknis penyajiannya.

Walaupun segenap aparatatur pemerintahan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal, namun diakui masih ditemukan sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dicapai sesuai yang diinginkan. Berbagai keterbatasan baik sumber daya, sarana dan prasarana bahkan geografis dan iklim kehidupan bermasyarakat tentu saja memiliki dampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya pembangunan tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata, partisipasi pihak swasta dan masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang kita inginkan. Pembangunan adalah suatu proses yang berkelanjutan, sehingga hampir mustahil untuk mengharapkan suatu perubahan secara instant dalam kehidupan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Namun apa yang telah dijalani dan dilaksanakan selama rentang waktu tahun 2017 ini, kesemuanya itu adalah pengalaman berharga dan juga merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengabdian dari seluruh komponen pembangunan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada tahun anggaran 2017, semuanya itu merupakan hasil kerja keras bersama yang dilaksanakan secara harmonis dan saling pengertian antara pihak eksekutif dan legislatif, antara sesama pimpinan instansi pemerintah baik otonom maupun vertikal, dan tidak terlepas berkat bantuan dan partisipasi seluruh kekuatan sosial politik, serta dukungan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.

Dengan terbinanya kesamaan persepsi dan kesatuan pola tindak pihak eksekutif dan legislatif, pimpinan instansi pemerintah otonom maupun vertikal, seluruh kekuatan sosial politik, dan dukungan masyarakat, diharapkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”, dapat segera terlaksana sebagai refleksi dari cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Akhir kata, dengan disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya kami berharap arahan dan petunjuk demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak 7 daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih.	100%	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan , sebanyak 7 daerah. Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 daerah.	100%	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017= 82 orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 = 1.349.121 orang	3,04	Sumber data dari BKD 0,01% per 50.000 penduduk
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai Surat Pengantar Nomor : 045.2/192/I tanggal 23 Maret 2018.	Tepat	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai surat pengantar Nomor 940/0281/BAKUDA tanggal 29 Maret 2018	Tepat	Sumber data dari Bagian Keuangan

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
					- Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- --- tanggal ----- 2017		Normalisasi
	Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	1) Kota Pangkalpinang = 6 urusan. 2) Kab. Bangka = 6 urusan. 3) Kab. Belitung = 6 urusan. 4) Kab. Bangka Tengah = 6 urusan. 5) Kab. Bangka Barat = 6 urusan. 6) Kab. Bangka Selatan = 6 urusan. 7) Kab. Belitung Timur = 6 urusan. Jumlah = 42 urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 Kab/Kot.	42 urusan	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
	Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2017)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak 20 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI tentang kerjasama Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. 2) MOU dengan Pol PP Kabupaten/Kota tentang kerjasama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Dirapatkan di TTKSD tanggal 3 April 2017 3) MOU dengan Kemeterian Pariwisata tentang kerjasama Pengembangan Homestay Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tidak dirapatkan pada TTKSD) 4) Dst---	20 MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas pembangunan nasional</u> ¹	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 13 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 13 program 	100%	Sumber data dari BAPPEDA/ perangkat daerah yang bersangkutan
Kewenangan		9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%	<p>Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%</p> <p>Rata-rata= 23,85% urusan = 7 Kab/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kota Pangkalpinang = 24 urusan. 2) Kab. Bangka= 23 urusan. 3) Kab. Bangka Barat = 25 urusan. 4) Kab. Bangka Tengah = 26 urusan. 5) Kab. Bangka Selatan = 22 urusan. 6) Kab. Belitung = 23 urusan. 7) Kab. Belitung Timur = 24 urusan <p>Jumlah = 167 urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 7 Kab/Kot.</p>	23,86%		
Keuangan		10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2017 (31 Desember 2016)	<p>Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 19 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2016</p>	Tepat	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2017.	

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah Tanggal 27 Nop 2015	Ada	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
		12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	<p>Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017.</p> <p>1) Urusan Pendidikan Rp. 506.337.354.831,74</p> <p>2) Urusan Kesehatan Rp. 244.860.511.523,90</p> <p>3) Urusan Tata Ruang Rp. 2.926.943.000</p> <p>4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 403.000.000</p> <p>5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 31.167.383.631,11</p> <p>6) Urusan Sosial Rp. 34.275.727.872,92</p> <p>Total Belanja pelayanan dasar Rp. 797.970.920.859,67</p> <p>Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22</p>	30,70%	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017 1) Urusan Pendidikan Rp. 506.337.354.831,74 2) Urusan Kesehatan Rp. 244.860.511.523,90 Total Belanja Pend & Kes Rp. 729.197.866.355,64 Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	28,05%	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik ² sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, Pergub Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tanggal 8 Okt 2015	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum
	Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2017 sebanyak 5.388 orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2017 sebanyak 1.349.121 orang	0,40%	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
		16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: SIMADIK (Sistem Manajemen Data dan Informasi Kepegawaian (tentang kepegawaian)	Ada	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	17	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah OPD, sbb: 1) Biro (Setda) = 9 unit 2) Setwan = 1 unit 3) Inspektorat = 1 unit 4) Dinas = 23 unit 5) Badan = 5 unit 6) Kantor = - unit 7) Rumah Sakit = 2 unit 8) Lembaga Teknis lainnya = 0 unit Jumlah perangkat daerah = 41 unit	42 unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak 19 Perda (Daftar Perda terlampir)	19 Perda	Sumber data dari Bagian Hukum
		Raperda yang diajukan berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak 19 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak 19 PERDA.	100 %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 X 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak 42 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak 42 keputusan	100%	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2017 X 100%	- Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak 1.802 keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.802 keputusan.	100 %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
	LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindakan lanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 X 100%	- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak 93 Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak 93 Pergub.	100 %	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 3 Perda.	0%	Sumber data dari Bagian hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (konsultasi publik) Tanggal 28 Jan 2016	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya Babelprov.go.id dan. - Surat Sekda Nomor : 480/696/Diskominfo Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Nama Domain	Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. 1.539.960.002.502 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.619.104.922.550,00	95,11%	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp. 1.179.885.725.235,26 - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. 987.556.919.550	119,47 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp. 1.179.885.725.235,26 Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	45,40 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	- PAD APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 709.832.181.818,48 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16	30,89 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP	Opini tahun 2016 = WDP Opini tahun 2017= WTP	Opini.; WTP/ <i>unqualified opinion</i>); WDP/ <i>qualified opinion</i>); TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp. 109.638.515.332,07 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16	4,59 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. 709.832.181.818,48 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 2.386.297.015.485,16	29,75 %	
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp 2.359.078.163.818,47 - Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,b 22	90,76 %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 930 temuan 930 rekomendasi - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 566 rekomendasi	566 ----- 930 = 60,86%	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti (364 masih dalam proses)
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ³	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. 709.832.181.818,48 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2017, sebesar Rp.	131,45%	Sumber data dari BPKAD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% atau (PAD 2017-PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	539.995.060.971,20 - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.574.716.721.884,25	28,27%	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak 4 yang terdiri dari 1) Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Energi 2) Halal Award 2017 3) Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4) Piagam Penghargaan atas Seleksi CPNS menggunakan metode CAT BKN secara Cepat, Akuntabel dan Transparan	4 Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E-procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan Mei tahun 2010	Ada	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak 1.014 ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp. 170.710.000.000,-	1.014 ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: LINGKUNGAN HIDUP

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional, sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program 	80 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Rekomendasi Lisensi Kabupaten/Kota 2. SOP Penerbitan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. SOP tentang proses pengelolaan sampel 4. SOP Penerbitan SK Izin Lingkungan untuk AMDAL 5. SOP Penerbitan SK Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL 6. SOP Tentang Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan 	Ada 7 SOP, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Rekomendasi Lisensi Kabupaten/Kota 2. SOP Penerbitan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. SOP tentang proses pengelolaan sampel 4. SOP Penerbitan SK Izin Lingkungan untuk AMDAL 5. SOP Penerbitan SK Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL 6. SOP Tentang Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan 	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup 7. SOP Pengaduan Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	7. SOP Pengaduan Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seahatusnya, sebanyak 2 	$2/2 \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - PERDA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Dalam Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung - PERDA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Dalam Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung 	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18 	$18/18 \times 100\% = 100\%$	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	Ada 7 Orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) 	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah, Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 63 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	1,16%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org. 	18/18 x 100% = 100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt. 	18/18 x 100% = 100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada 3 jenis dokumen yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program 	$4/4 \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan RENJA- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program. 	$4/4 \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan RENJA- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program. 	$4/4 \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Realisasi Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 11.687.787.790; - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.2.598.989.042.215,22 	0,44%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 313.129.000; - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 11.687.787.790;	2,68 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 188.672.228; - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.344.823.295;	5,64 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 188.672.228; - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 11.687.787.790;	1,61 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CALK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat	18	Adanya inventarisasi barang atau asset	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada, yaitu Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Buku Inventaris Barang	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah		Perangkat Daerah	Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi Asset	minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.026.720.933,00	0 % Surat Pernyataan	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan / dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 jenis 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang : Survei Kepuasan Pelanggan Atas Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Ada, Survei Kepuasan Pelanggan Atas Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN , RSUD, RUMAH SAKIT JIWA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN KESEHATAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 36 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 24 program	$36 / 24 * 100 = 150\%$	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir. 1. Dinas Kesehatan :12/9 2. RSUD Provinsi :12/13 3. <u>RSJ Provinsi : 12/2</u> Jumlah = 36 / 24
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 25 yang terdiri dari: A. DINAS KESEHATAN : 1. SOP ttg Pemeriksaan Alkali Photasae 2. SOP ttg Pemeriksaan Malaria 3. SOP ttg Pemeriksaan rapid test 4. SOP ttg Pemeriksaan Toxoplasma 5. SOP ttg Pemeriksaan HBSAG Elisa 6. SOP ttg Pemeriksaan HIV Elisa 7. SOP ttg anti Hbs Elisa 8. SOP ttg urine carik celup 9. SOP ttg Pemeriksaan Tinja	Ada 59 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. Dinas Kesehatan :25 SOP 2. RSUD Provinsi :31 SOP 3. <u>RSJ Provinsi : 3 SOP</u> Jumlah =49 SOP

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Mikroskopis 10. SOP ttg PMI Malaria 11. SOP ttg Prosedur menguji bahan control 12. SOP ttg PMI Hematoanalyzer 13. SOP ttg Pembuatan sediaan malaria 14. SOP ttg Pembuatan reagen ziehl nielsen 15. SOP ttg Pembuatan sediaan BTA 16. SOP ttg sediaan Sputum 17. SOP ttg pewarnaan giemsea sediaan malaria 18. SOP ttg Glucose 19. SOP ttg Pemeriksaan colestero 20. SOP ttg Pemeriksaan Hdl Cholesterol 21. SOP ttg Pemeriksaan Trilyceride GPO 22. SOP ttg Pemeriksaan albumin 23. SOP ttg pemeriksaan creatinine 24. SOP ttg pemeriksaan bilirubin 25. Sop ttg Pemeriksaan AST		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						B. RSUD : 1. SOP IGD (Instalasi Gawat Darurat) 2. SOP Bidang Pelayanan & Penunjang Medis 3. SOP Hemodialisa (HD) 4. SOP Kamar Operasi 5. SOP Poliklinik 6. SOP Sarana 7. SOP Kebidanan 8. SOP Keperawatan Umum 9. SOP ICU/ICCU 10. SOP PICU/NICU 11. SOP Kebidanan dan Penyakit Kandungan 12. SOP Bedah Urologi 13. SOP Akupunktur 14. SOP Penyakit Dalam 15. SOP Bedah Saraf 16. SOP Rehabilitasi Medik 17. SOP Mata 18. SOP Bedah Umum 19. SOP Anestesi 20. SOP Gigi dan Mulut 21. SOP Penyakit Anak 22. SOP Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah 23. SOP Laboratorium Patologi Anatomi 24. SOP Ilmu Penyakit Saraf 25. SOP Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 26. SOP Radiologi 27. SOP Laboratorium Patologi Klinik 28. SOP Orthopedi dan Traumatology		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						29. SOP Pelayanan Farmasi 30. SOP Anak 31. SOP Cathlab C. RSJ : 1. SOP Pelayanan Medik 2. SOP Pelayanan Keperawatan 3. SOP Penunjang Pelayanan		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 7 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7	$7/7 * 100 = 100\%$	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 35 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 54	$35/54 * 100 = 64,81\%$	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah` 1. Dinas Kesehatan :25/25 2. RSUD Provinsi :13/14 3. RSJ Provinsi : 15/15 Jumlah =35/54
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - A. DINKES : 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat madya 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 3. Nutrisionis Ahli Madya 4. Apoteker pertama 5. Apoteker Muda 6. Pranata Labkes Penyelia 7. Pranata Laboratorium Kesehatan muda	Ada 46 jabatan fungsional	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017 1. Dinas Kesehatan :17 2. RSUD Provinsi :14 3. RSJ Provinsi : 15 Jumlah = 46

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						8. Perawat mahir 9. Pranata Humas Muda 10. calon sanitarian 11. Pranata labkes pelaksana lanjutan 12. Perawat Pelaksana Lanjutan 13. Asisten Apoteker Pelaksana lanjutan 14. Nutrisionis pelaksana 15. calon medik elektromedik 16. bidan pelaksana 17. calon pranata komputer pelaksana pemula. B. RSUD : 1. JFT Perawat : 99 orang 2. JFT Dokter : 21 orang 3. JFT Dokter Gigi : 4 orang 4. JFT Bidan : 29 orang 5. JFT Laboratorium Kesehatan : 5 orang 6. JFT Perekam Medik : 9 orang 7. JFT Apoteker : 2 orang 8. JFT Asisten Apoteker : 7 orang 9. JFT Fisioterapis : 3 orang 10. JFT Perawat Gigi : 4 orang 11. JFT Teknisi Gigi : 1 orang 12. JFT Radiografer : 4 orang 13. JFT Teknisi Elektromedis : 1 orang 14. JFT Nutrisionis : 6 orang D. RSJ : 1. Jabatan Fungsional Dokter (13 org) 2. Jabatan Fungsional Perawat (78 orang)		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						3. Jabatan Fungsional Rekam Medis (5 orang) 4. Jabatan fungsional terapi wicara (1 orang) 5. Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan (3 orang) 6. Jabatan Fungsional Perawat Gigi (6 orang) 7. Jabatan Fungsional Apoteker (4 orang) 8. Jabatan Fungsional Ass. Apoteker (5 orang) 9. Jabatan Fungsional Radiologi (3 orang) 10. Jabatan Fungsional Fisioterapi (4 orang) 11. Jabatan Fungsional Gizi (3 orang) 12. Jabatan Fungsional Pranata Humas (1 orang) 13. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis (2 orang) 14. Jabatan Fungsional Tekhnisi Elektromedik (1 orang) 15. Jabatan Fungsional Sanitarian (2 orang)		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 581 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	10,78%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD. 1. Dinas Kesehatan : 122 2. RSUD Provinsi : 248 3. RSJ Provinsi : 211 Jumlah =581

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklat/pim sesuai penjenjangan, sebanyak 50 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 53 org. 	94,33 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017. 1. Dinas Kesehatan :24/25 2. RSUD Provinsi :12/13 3. <u>RSJ Provinsi : 14/15</u> Jumlah =50/53
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 52 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 53 jbt. 	98,11 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017. 1. Dinas Kesehatan :24/25 2. RSUD Provinsi :13/13 3. <u>RSJ Provinsi : 15/15</u> Jumlah = 52 / 53
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	9 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan 1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :3 3. <u>RSJ Provinsi : 3</u> Jumlah =9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 21 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 22 	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs. 1. Dinas Kesehatan :9/9 2. RSUD Provinsi :6/6 3. <u>RSJ Provinsi : 6/7</u> Jumlah = 21 / 22
		Sinkronisasi program		Jumlah Program RENJA	Jumlah Program RENJA	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang		Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 21 program.	100 %	RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs. 1. Dinas Kesehatan :9/9 2. RSUD Provinsi :6/6 3. <u>RSJ Provinsi : 6/6</u> Jumlah = 21/ 21
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 21 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017. 1. Dinas Kesehatan :9/9 2. RSUD Provinsi :6/6 3. <u>RSJ Provinsi : 6/6</u> Jumlah = 21 / 21
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 244.860.511.523,90 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22	9,42%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran) 1. Dinas Kesehatan : 48.072.364.615 2. RSUD Provinsi : 141.599.617.570 3. RSJ Provinsi : 55.188.529.338,90 Jumlah = 244.860.511.523,90 / 2.598.989.042.215,22
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 82.756.793.226	37,13 %	Sumber data dari realisasi APBD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Daerah	belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.222.857.622.294,79		tahun 2017 1. Dinas Kesehatan : 362.664.889 / 362.664.889 2. RSUD Provinsi : 74.347.272.508,43 / 130.629.299.801,43 3. RSJ Provinsi : 8.046.855.828,77 / 49.146.057.388,36 Jumlah = 82.756.793.226 / 222.857.622.294,79
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.302.062.564 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 58.718.048.749,59	5,62%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir. 1. Dinas Kesehatan : 157.675.000 / 30.172.805.321 2. RSUD Provinsi : 2.400.120.564 / 18.924.605.240 3. RSJ Provinsi : 744.267.000 / 12.283.855.688,59 Jumlah = 3.302.062.564 / 58.718.048.749,59
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.302.062.564 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 222.857.622.294,79	1,48%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir. 1. Dinas Kesehatan : 157.675.000 / 43.082.265.105 2. RSUD Provinsi : 2.400.120.564 / 130.629.299.801,43

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								3. <u>RSJ Provinsi</u> : 744.267.000 / 49.146.057.388,36 Jumlah =3.302.062.564 / 222.857.622.294,79
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 9 jenis, sbb: A. DINKES : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk B. RSUD : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk C. RSJ : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 9 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK) 1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :3 3. <u>RSJ Provinsi</u> : 3 Jumlah =9
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada / Tidak Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) 1. Dinas Kesehatan :ADA 2. RSUD Provinsi :ADA 3. <u>RSJ Provinsi</u> : ADA Jumlah =ADA
		Penggunaan Asset	19	Jumlah asset yang tidak	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 2.115.613.850,00 - Asset yang dikuasai	0,46 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perangkat Daerah		digunakan oleh Perangkat Daerah	dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Perangkat Daerah, sebesar Rp. 455.126.142.027,75		2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan 1. Dinas Kesehatan : 0 / 24.900.342.594 2. RSUD Provinsi : 2.115.613.850,00 / 393.335.076.143 3. RSJ Provinsi : 0 / 36.890.723.290,75 Jumlah = 2.115.613.850,00 / 455.126.142.027,75
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya A.DINKES : 1. Leaflet 2. Mobil Keliling 3. Papan Pengumuman B. RSUD : 1. Leaflet 2. Baleho 3. Papan Pengumuman 4. Mobil Keliling 5. Kotak Pengaduan 6. Pengumuman di Mass Media C. RSJ : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Website 5. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 14 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan) 1. Dinas Kesehatan :3 2. RSUD Provinsi :6 3. <u>RSJ Provinsi : 5</u> Jumlah = 14

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- - A . DINKES : Tidak Ada B. RSUD : Tidak Ada C. RSJ Ada yaitu : 1. Survey Kepuasan Masyarakat dan 2. Survey Standar Pelayanan Minimal	Ada / tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda. 1. Dinas Kesehatan : tidak ada 2. RSUD Provinsi : tidak ada 3. RSJ Provinsi : Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Standar Pelayanan Minimal <u>ada</u> Jumlah = ADA

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program. - Daftar program Nasional : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi <p>3 ---- x 100% = 60 % 5</p>	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi 2. SOP Penyelenggaraan Pengawasan Koperasi 3. SOP Penyelenggaraan Penilaian Koperasi 4. SOP Pendataan Koperasi 5. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan 	Ada 12 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						UMKM 6. SOP Pengolahan Data CSR / PKBL 7. SOP Penerima Bansos Kementerian 8. SOP Pengolahan Data Bansos SKPD-SKPD 9. SOP Pengolahan Data KUR 10. SOP Calon Peserta Program Bantuan LPDB 11. SOP Pengolahan Data NRB 12. SOP Pengolahan Data Sarana Pemasaran		oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Pranata Humas	Ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS, sebanyak 50 Personil Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	$\frac{50}{5.388} \times 100\% = 0,93\%$	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen 100%	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program 	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program. 	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program. 	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp13.891.223.464 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp2.598.042.215,22 	$\frac{\text{Rp}13.891.223.464}{\text{Rp}2.598.042.215,22} \times 100\% = 0,535\%$	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp364.350.000 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp13.199.835.292	$\frac{\text{Rp364.350.000}}{\text{Rp13.199.835.292}} \times 100\% = 2,76\%$	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp206.270.800 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp5.531.559.506	$\frac{\text{Rp206.270.800}}{\text{Rp5.531.559.506}} \times 100\% = 3,73\%$	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp206.270.800 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp13.199.835.292	$\frac{\text{Rp206.270.800}}{\text{Rp13.199.835.292}} \times 100\% = 1,56\%$	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada sebanyak 5 Jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Sebutkan jenis dokumennya: 1. KIB 2. BA Rekonsiliasi Asset	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp15.674.042.252	$\frac{0}{\text{Rp15.674.042.252}} \times 100$ % = 0%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet (kantong belanja	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan: survey kepuasan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENDIDIKAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 8 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	$\frac{5}{8} \times 100\% = 62.50\%$	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru SMK 2. SOP ttg Pelaksanaan PIP tanpa KIP 3. SOP ttg Pelaksanaan Lomba Kesiswaan 4. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karater 5. SOP ttg Kurikulum 6. SOP ttg Permohonan	Ada 11 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Procedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Proposal bersumber dari hibah 7. SOP ttg kegiatan Bidang SMA 8. SOP ttg Persuratan Bidang SMA 9. SOP ttg penyelenggaraan ujian Nasional 10. SOP ttg pengajuan mutasi guru pada bidang GTK 11. SOP ttg pencairan dana BOS SMA		teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Pranata Humas 1 Orang 2. Penerjemah 1 Orang 3. Arsiparis Tingkat Terampil 1 Orang	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						4. Pranata Komputer 3 Orang 5. JFT Guru: 1.936		terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 2.041. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5388 personil	2.041 ----- x 100% = 37.88 % 5.388	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
	7		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	17 ----- x 100% = 80.95 % 21	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	21 ----- x 100% = 100 % 21	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program.	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program. 	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 477.363.389.104,63 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22 	$\frac{477.363.389.104,63}{2.598.989.042.215,22} \times 100\% = 18,37\%$	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 36.001.328.768 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.418.653.364.115 	$\frac{36.001.328.768}{418.653.364.115} \times 100\% = 8,60\%$	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.346.122.776 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.111.214.807.329	8.346.122.776 ----- x 100% = 7,50 % 111.214.807.329	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.346.122.776 - Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 418.653.364.115	8.346.122.776 ----- x 100% = 1,99 % 418.653.364.115	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Ada sebanyak 5 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada 1 Jenis Dokumen	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 697.854..154.455,12	0 ----- x 100% = 0 % 697.854..154.455,12	1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Asset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil keliling/Pintar 3. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pe langgan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : BADAN PENGHUBUNG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	20 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP tentang Sub Bagian Tata Usaha 2. SOP tentang Seksi Hubungan Antar Lembaga 3. SOP tentang Seksi Promosi dan Informasi Dst ----	Ada 21 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak ---- - PERDA yang seharusnya, sebanyak ---- %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5 	100%	Sumber data BKPSDMD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang / jabatan fungsional ada 6 jabatan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Arsiparis, 2. Calon Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, 3. Calon Jabatan Penyuluh Pajak, 4. Calon Jabatan Fungsional Pranata Humas, 5. Calon Jabatan Fungsional Pengendali Frekwensi Radio, 6. Jabatan Fungsional Auditor Muda 	Ada (8JFT)	Sumber data BKPSDMD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 34. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	0,63 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt. 	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-Perangkat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program. 	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OKPD, sebesar Rp. 12.668.156.000,00 - Total Realiasi APBD, sebesar Rp. 11.715.663.039,50	92,48 %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal OKPD, sebesar Rp.2.271.142.200,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp.11.715.663.039,50	19,39 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan OKPD, sebesar Rp.474.870.947,50 - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp.5.101.694.388,50	9,31%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.474.870.947,50 - Total belanja OPD, sebesar Rp.11.715.663.039,50	4,05 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5.LPE	Ada	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1.KIB 2.Buku Inventaris Gabungan 3.Daftar Mutasi Barang 4.Berita Acara Sensus Barang	Ada	Sumber data dari BAKUDAA, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai OPD, Rp.11.748.270.761,00	0	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman di Media Massa (Website) 2. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak Jenis 2 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pekerjaan Umum
2. Urusan Penataan Ruang

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	75%	100 %	Lihat Program Nasional untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP ttg Penggunaan dan Pemakaian Peralatan Kendaraan dan Alat-alat Berat	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ---- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Seksi Tata Ruang	Ada 2 SOP	Ada 1 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 15 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	88,24 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pranata Komputer.	tidak ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 150 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 10 Personil - Total PNS Provinsi,			Sumber data mengacu kondisi perangkat

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		relevan dengan urusan terkait				Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	sebanyak ----- personi			daerah terakhir/update tahun 2017/ BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim , sebanyak 9 org. Jabatan, sebanyak 15 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 org.	60 %	75 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA .	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam	Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.	Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 Program	- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program			dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										ybs tahun 2017
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Alokasi belanja SKPD, sebesar Rp. 290.553.136.064 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	- Total Alokasi belanja SKPD, sebesar Rp. 2.453.010.000, - - Total Belanja APBD, sebesar 2.598.989.042.215,22	11,17%	0,094%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 195.620.157.599,99 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.264.378.093.963,99	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.604.820.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.- 2.385.219.300	73,99 %	67,28%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 11.628.578.650 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 53.004.230.861	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.974.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 757.279.300	21,93 %	2,77%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 11.628.578.650 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 264.378.093.963,99	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.974.500 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.	4,4 %	0,88%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							2.385.219.300			
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1.Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak --3 jenis : Neraca, LRA, CALK	Ada sebanyak -3 jenis : Neraca, LRA, CALK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Inventaris Barang. - Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Apabila Ada, Inventaris Barang.	Ada	-	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak - ---- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----	0 %	-	Sumber data dari BPKAD , dokumennya

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						1.907.635.167.607,29.	asset.			a (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di LPSE (website) 3. Mobil Keliling	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di LPSE (website)	Jumlah sebanyak --3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (d foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang - ----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2. PERTANAHAN

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional, sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	100%	0 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 43 yang terdiri dari:	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ---- yang terdiri dari:	Ada 43 SOP	Ada ----- SOP / Tidak	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
		Kementerian / LPNK		(SOP)		1. SOP ttg Registrasi Perda Kabupaten/Kota 2. SOP ttg Pelaksanaan Pengajian Rutin di Kantor Gubernur 3. SOP ttg Penyelenggaraan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan 4. SOP ttg Penomoran SK Gub/SK Sekda/Pergub/MOU 5. Dst-----	1. SOP ttg ---- 2. SOP ttg ---- 3. SOP ttg ---- 4. Dst ----		Ada :	Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak ---- - PERDA yang seharusnya, sebanyak --- --	100% %	Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 122 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 122 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 2 	100%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencana Muda 2. Arsiparis 3. Pranata Komputer 4. Pranata Humas 5. Pustakawan 6. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan 7. Pengadaan Barang dan Jasa 	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah, Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/update d Tahun 2017	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 348 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	- PNS, sebanyak 5 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	6,45%	0,092%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 122 org. - Pejabat yang ada, sebanyak -122 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak -2 org.	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 122 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 122 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.	100%	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak --- -- jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPД	10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 28 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 28	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ---- -- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ---- --	100% %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPД tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
					Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 20 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 20 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak --- program.	100% %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 20 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 20 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak ---- program.	100% %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 131.541.471.614 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ---- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, ----	5,06% %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran)
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.102.194.970 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 121.655.731.537	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----	5,84% %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.948.817.300 -Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 49.219.419.301	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	24,27% %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----	9,82% %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
					100%	11.948.817.300 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 121.655.731.537	- Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----			terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Ada sebanyak 3 jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. Sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Ada	Ada/ Tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi)

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
					Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
									dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
	Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah}}{\text{dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp . 715.138.000 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 423.566.198.871	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0	0,17%	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Asset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Urusan (2) Pertanahan	
										Penyebut: Ase layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dim anfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Jumlah sebanyak 0 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
 1. Urusan Kebudayaan
 2. Urusan Pariwisata

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	75%	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Registrasi Cagar Budaya 2. SOP ttg Misi Kesenian 3. SOP ttg Pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda	---	ada	Tidak ada	Sesuai urusan.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Buah - PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah	100%	100%	Undang-undang tentang Kebudayaan belum disahkan oleh DPR RI sementara UU Cagar Budaya belum diturunkan PP kelengkapan hukum lainnya

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 21 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	-	100%	-	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan Fungsional teknis - Penterjemah - Pranata Humas	-	5 orang	-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 57 personil Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	-	1,057%	-	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	-	90%	-	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	-	100%	-	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RKA-SKPD 3. DPA 4. DPPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RIPPAPROV 2. RENSTRA 3. RKA-SKPD 4. DPA 5. DPPA	Ada 2 buah	Ada 3 buah	-

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program 	5	8	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 	100%	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. 	5	3	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 24.968.564.752,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.226.354.387.053,48 	-	0.9%		

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 568.373.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.19.413.317.324,-	-	2.9%		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 210.118.790,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 12.851229.370	-	2%		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 210.118.790,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 19.413.317.324,-		2%		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK 4. LO 5. LPE	ada		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset 2. Buku Inventaris Barang 3. Kartu Inventaris Barang		ada		
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 331.017.800 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 7.348.722.258,-	- Aset yang tidak digunakan, Rp.331.017.800 - Aset yang dikuasai	4.5%	4.5%	Aset rusak berat

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							SKPD, Rp. Rp. 7.348.722.258,-			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pengumuman di mass media 3. Website 4. Mobil keliling 5. Perpustakaan 6. Anjungan Informasi Mandiri 7. Tourist Information Centre 8. Baleho		5 bh	-	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pasar Pariwisata	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pasar Pariwisata	Tidak ada	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ... program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak program	$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$	Program Nasional (terlampir)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jika ada	Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel	Ada	Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel (Terlampir)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 perda	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 (Terlampir) • Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Terlampir)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak =17 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak =17 jabatan	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2017 (Terlampir)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas		SK Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas (Terlampir)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD sebanyak 62 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	$\frac{62}{5.388} \times 100\% = 1.15\%$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2017 (Terlampir)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2017 (Terlampir)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2017 (Terlampir)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir) • Renja Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir) • RKA Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3 program	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Mengacu dokumen RKP tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 21.560.297.604,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22	$\frac{21.560.297.604}{2.598.989.042.215,22} \times 100\% = 0.83\%$	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 727.116.352,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 20.317.929.959,00	$\frac{727.116.352}{20.317.929.959} \times 100\% = 3.58\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 360.527.300,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.862.920.229,00	$\frac{360.527.300}{4.862.920.229} \times 100\% = 7.41\%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 360.527.300,00 - Total belanja SKPD, sebesar	$\frac{360.527.300}{20.317.929.959} \times 100\% = 1.77\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp 20.317.929.959,00		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	Ada sebanyak 5 jenis : - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	- LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK (Terlampir)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2017	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2017	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2017 (Terlampir)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.332.574.634,00	0 %	• BA Semua asset digunakan SKPD (Terlampir) • Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Sem II per 31 Des 2017 (Terlampir)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 3 jenis. -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 3 Program. - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 Program	3 --- x 100% = 60,00 % 5	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan ada banyak 18 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pemetaan Data Korban Tindak Kekerasan Nomor 151/DINKESOS/2014 Tgl 17 September 2014 2. SOP ttg Pengidentifikasian dan Penganalisaan Data Korban Tindak Kekerasan Nomor : 150/DINKESOS/2014 Tgl 17 September 2014 3. SOP ttg Rehabilitasi Sosial Eks Korban Penyalahgunaan Nafza Nomor:149/DINKESOS/2014 Tgl 15 Agustus 2014	Ada 18 SOP	Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2014 Tgl 6 November 2014

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<p>4. SOP ttg Pengiriman Siswa/i ODK ke Balai/Panti Milik Kementerian Sosial Nomor:148/DINKESSOS/2014</p> <p>5. SOP ttg Pemberian Bantuan Bahan Makanan bagi ODK dan Lanjut Usia Nomor:147/DINKESSOS/2014</p> <p>6. SOP ttg Pengelolaan Logistik Nomor:146/DINKESSOS/2014 Tgl September 2014</p> <p>7. SOP ttg Pendistribusian Buffer Stock Nomor:145/DINKESSOS/2014 Tgl September 2014</p> <p>8. SOP ttg Pembuatan Usulan Izin Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Nomor:144/DINKESSOS/2014 Tgl 9 Oktober 2014</p> <p>9. SOP ttg Jaminan Kesejahteraan Sosial Nomor:143/DINKESSOS/2014 Tgl 9 Oktober 2014</p> <p>10. SOP ttg Penyusunan Administrasi Data Penerima Jaminan Sosial Nomor:142/DINKESSOS/2014</p> <p>11. SOP ttg Penyusunan, Pembuatan dan</p>		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Penyaluran Honor Tim Sekretariat UPPKH Provinsi Nomor:141/DINKESSOS/2014 Tgl 9 Oktober 2014 12.SOP ttg Penyusunan, Pembuatan dan Penyaluran Honor Tim TKPKH Provinsi Nomor:140/DINKESSOS/2014 13.SOP ttg Perencanaan, Pengumpulan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKH Tingkat Provinsi Nomor:139/DINKESSOS/2014 14.SOP ttg Penyusunan, Perencanaan dan Pencairan Dana Operasional Kabupaten/Kota Nomor:138/DINKESSOS/2014 15.SOP ttg Monitoring Pelaksanaan PKH Nomor:137/DINKESSOS/2014 16.SOP ttg Penyusunan, Pembuatan dan Penyaluran Honor Korwil Operator dan Pendamping PKH Nomor:136/DINKESSOS/2014 17.SOP ttg Perencanaan dan Pelaksanaan Bimbingan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Teknis Operator dan Pendamping PKH Nomor:135/DINKESSOS/2014 18.SOP ttg Perencanaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lokasi PKH Nomor:134/DINKESSOS/2014		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda	$2 \div 2 \times 100\% = 100\%$	1. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya 2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 24 Orang - Jabatan yang harus ada 25 Orang sebanyak	$24 \div 25 \times 100\% = 96\%$	SOTK terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur	Apabila Ada, sebutkan nama	Ada 6 Jenis	Data pendukung

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				organisasi SKPD	organisasi SKPD	bidang/jabatan fungsional tertentu bidang : 1. Pranata Komputer ahli pertama 2 Orang 2. Perawat 5 Orang 3. Fhisiotherapist 1 Orang 4. Pekerja sosial 8 Orang 5. Pranata humas 1 Orang 6. Arsiparis Terampil 1 Orang		terlampir
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 89 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	89 ----- x 100% = 1,65 % 5388	PNS berjumlah 89 Orang DUK terlampir
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	20 ---- x 100% = 91,67 % 24	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 25 Jbt.	24 ---- x 100% = 96 % 25	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Ada	Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 Program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program 	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program. 	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 Program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 Program. 	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi Anggaran SKPD terhadap total belanja/realiasi APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total belanja/realiasi APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Alokasi Anggaran SKPD, sebesar Rp 21.676.654.711,92 - Total Anggaran APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 	$\frac{\text{Rp. 21.676.654.711,92}}{\text{Rp 2.598.989.042.215,22}} \times 100\% = 0,83\%$	
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 758.676.000.00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 20.397.452.312 	$\frac{\text{Rp 758.676.000.00}}{\text{Rp 20.397.452.312}} \times 100\% = 3,72\%$	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 234.154.700,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 7.487.380.599.00	Rp 234.154.700,00 ----- x 100% = 3,13% Rp 7.487.380.599.00	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 234.154.700,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 20.397.452.312.00	Rp 234.154.700,00 ----- x 100% = 1.15% Rp 20.397.452.312.00	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CaLK	Ada	Terlampir
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : - Berita acara hasil Rekonsiliasi barang milik daerah	Ada	Terlampir
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp 10.564.071.640,00	0 %	•

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media (Website)	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Posko Bencana 2. Papan Pengumuman 3. Mobil Keliling (UPSK) 4. Leaflet / Stiker 5. Website	Jumlah sebanyak 5 jenis	Data pendukung terlampir
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan	Ada	Data Pendukung terlampir

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017
ASPEK TATANAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN

Urusan Yang Dilaksanakan : PERTANIAN

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan sebanyak 1 program	1 ---- x 100% 2 =50%	Data terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Bidang - Perkebunan - Hortikultura - Kesehatan Hewan - Balai Benih - Pengendalian Hama - Pengawas Mutu	Ada 6	Data Terlampir
2	KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERDA yang seharusnya sebanyak 1	1 ---- x 100% 1 =100%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak 33 Jabatan yang harus ada 33	33 --- x 100% 33 = 100 %	

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	KET
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apa bila ada sebutkan nama bidang/ jabatan Fungsional: 1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2. Pengawas Benih Tanaman 3. Penyuluh Pertanian 4. Pengawas Mutu Pakan 5. Pengawas Bibit Ternak 6. Paramedik Veteriner 7. Statistisi 8. Perencana Pertama	Ada, 41 orang sudah mendapat SK Gubernur, - 5 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian - 9 orang Pegawai Benih Tanaman - 12 orang Penyuluh Pertanian - 3 Pengawas Mutu Pakan - 7 Pengawas Bibit Ternak - 3 Paramedik Veteriner - 1 statistisi - 1 Perencana Pertama	Data Terlampir
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan perangkat daerah sebanyak 135 personil - Jumlah PNS di Provinsi 5.388	2,50 %	Data Terlampir
7			Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklat PIM sebanyak 30 orang - Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 33 orang	30 --- x 100% 33 = 90,90 %	Data Terlampir	

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	KET
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	JumlahPejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	- Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan30 orang - Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 33 orang	30 --- x 100% 33 = 90,90 %	Data Terlampir
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	Ada 4 (empat), yaitu: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	Ada 4 jenis dokumen	: dokTerlampir
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagijumlah program dalamRenjaPerangkatdaerah yang ditetapkandalam RPJMD x 100%	- Jumlah program RKPDP yang diakomodirdalam RENJA Perangkat Daerahsebanyak 10 Program - Jumlah program RENJA Perangkat Daerahyang ditetapkandalam RPJMD sebanyak 10 Program	10 --- x 100% 10 = 100% 10 --- x 100% 10 = 100%	Data Terlampir
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJAPerangkat Daerah yang diakomodirdalam RKA Perangkat Daerah yang ditetapkanpada RPJMD x 100%	Jumlah Program RENJAPerangkat Daerah yang diakomodirdalam RKA Perangkat Daerah yang ditetapkanpada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodirdalam RKA Perangkat Daerah sebanyak10 program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak10 program	100 %	

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	KET
		Jumlah Program RENJA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 10 program - Jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 10 program	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD	13	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.32.348.305.154,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	1,24%	
		Realisasi belanja modal terhadap total belanja Perangkat daerah	14	Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja modal Perangkat Daerah sebesar Rp.577.477.000,- - Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.32.348.305.154,-	1,78%	
		Besaran belanja pemeliharaan (Realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- Total Belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 39.998.000,- - Total Belanja barang dan jasa perangkat daerah sebesar Rp.17.232.774.907,-	0,232 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk, LO)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk, LO)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb: - LRA - Neraca - Calk - LO	Ada : - Neraca - CaLK - LRA - LO	Data Terlampir
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya	Ada, dokumen BA Hasil Rekonsiliasi Asset	Data Terlampir

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	KET
		Penggunaan aset oleh SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD terhadap total aset SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD dibagi total aset yang dikuasai PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Aset yang tidak digunakan sebesar Rp 0 - Aset yang dikuasai PD sebesar Rp. 25.405.341.441 	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya: <ul style="list-style-type: none"> - Papan Pengumuman - Leaflet - Mobil keliling 	Ada 3 jenis yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Leaflet 	Data Terlampir
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil survey kepuasan masyarakat	Apabila Ada sebutkan Hasil survey kepuasan masyarakat tentang Kegiatan Perluasan Sawah	Ada	

FORMAT LAMPIRAN I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Perpustakaan
2. Urusan Kearsipan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	50% (1 / 2 x 100%)	0% (0 / 0 x 100%)	Program Nasional RKP 2017
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Prosedur Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka 2. SOP ttg Prosedur Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pustakawan 3. SOP ttg Persiapan Bimtek bagi Pengelola Perpustakaan 4. SOP ttg Persiapan Lomba Pustakawan Terbaik 5. SOP ttg Pengembangan Kinerja SDM Perpustakaan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis 2. SOP ttg Layanan Arsip Statis	Ada	Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						6. SOP ttg Pelaksanaan Pendataan SDM Perpustakaan 7. SOP ttg Penerbitan Literatur Sekunder BID				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- Tidak ada	- Tidak ada	- Tidak ada	- Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 6 orang	100%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pustakawan Penerjemah Pranata Komputer	Arsiparis	Ada	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 28 personil - Total PNS Provinsi,	32/5.388	27/5.388	- Sumber data SKPD mengacu

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							sebanyak 5.388 personil			kondisi terakhir/update Tahun 2017
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org. 	100% (11 / 11 x 100%)	100% (6 / 6 x 100%)	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 11 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 6 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt. 	100% (11 / 11 x 100%)	100% (6 / 6 x 100%)	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja 	100% (1 / 1 x 100%)	66.66% (4 / 6 x 100%)	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERA NGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						sebanyak 1	SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6			dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100% (1 / 1 x 100%)	100% (4 / 4 x 100%)	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program.	100% (1 / 1 x 100%)	100% (4 / 4 x 100%)	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp 6.775.800.066,23 - Total Belanja APBD,	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 5.431.513,501,19	Rp 6.775.800.066,23 /2.598.989.0	Rp 5.431.513,501,19 /2.598.989.04	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						sebesar Rp.2.598.989.042.215,22	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	42.215,22= 0,26%	2.215,22=0,21%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 103.792.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.677.990.658	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 103.792.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.677.990.658	103.792.000 / 5.803.555.274,52 =0,97%	103.792.000 / 5.803.555.274,52 =0,97%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.179.521,5 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.2.734.176.200	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.179.521,5 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.734.176.200	100.179.521,5 / 2.734.176.200 = 3,66%	100.179.521,5 / 2.734.176.200 = 3,66%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.179.521,5 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.677.990.658	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.179.521,5 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.677.990.658	200.359.043 / 10.677.990.658 = 0,94%	200.359.043 / 10.677.990.658 = 0,94%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca	1. LPE 2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca			Laporan Keuangan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2017	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2017	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Ada	0	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website 3. Mobil perpustakaan keliling 4. Leaflet 5. Buku panduan	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website 3. Mobil masyarakat sadar arsip	5 Jenis	3 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0/5x100 %= 0%	Tidak Ada program yang dilaksanakan/melekat oleh BPBD dari Pemerintahan Pusat BNPB
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 18 SOP Terdiri dari : 1. MENYUSUN PETA RESIKO BENCANA; 2. KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TINGKAT DESA; 3. PENGORGANISASIAN RELAWAN PENCEGAHAN BENCANA; 4. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA;	Ada 18 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						5. PENGURANGAN RESIKO BENCANA; 6. PEMASANGAN RAMBU-RAMBU RAWAN BENCANA; 7. PEMINJAMAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA; 8. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA; 9. PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA; 10. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA; 11. PENGEMBANGAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI (PUSDALOP) PENANGGULANGAN BENCANA 12. TIM REAKSI CEPAT (TRC) DAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA (TIM PB); 13. MOBILISASI DAN PENERAHAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA; 14. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA;		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						15. LAPORAN DATA PASCA BENCANA; 16. PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA; 17. KEGIATAN KOORDINASI MITIGASI BENCANA; 18. REKONSTRUKSI PASCA BENCANA;		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah - Perda yang seharusnya sebanyak 1 buah	$1/1 \times 100\% = 100\%$	PERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 13 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 jbt	$13/14 \times 100\% = 92,85\%$	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Ada (1 Jabatan Fungsional)	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 33 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	$33/3.334 \times 100\% = 0,61\%$	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	$13/13 \times 100\% = 100\%$	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	$13/13 \times 100\% = 100\%$	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA/RKPA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA/RKPA SKPD	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	6/6x100% = 100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	6/6x100% = 100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	6/6x100% = 100 %	
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran (Realisasi)	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 12.559.073.161,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.084.047.215.107,72	0,48%	
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.452.407.853,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 12.559.073.161,-	Rp. 1.452.407.853,- / 12.559.073.161,- x100% = 11,57%		
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 244.203.150,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.324.772.215,-	Rp. 244.203.150,- / 3.324.772.215,-x100% = 7,34%		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.244.203.150,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 12.559.073.161,-	- Rp. 244.203.150,- / 12.559.073.161,- x100% = 1,94%		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, Jenis dokumennya sbb : 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah TA 2016 (sensus Asset)	+Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 15.940.040.707,-	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Baliho/Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Baliho/Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELEN GGARA AN URUSAN PEMERINTA HAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	JumlahProgram NasionalyangdilaksanakanolehPerangkat Daerah	JumlahprogramNasio nalyangdapatdilaksan akanolehPerangkat Daerahdibagijumlahpr ogramNasionalx100 %	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak2 program, yaitu : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak6 program..	$\frac{2}{6} \times 100\% = 33,33\%$	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	KeberadaanStandard OperatingProcedure (SOP)	Adaatautidakada	adaterdiridari 7 SOP, yaitu : 1. SOP Penertiban dan Pengawasan Angkutan Umum/ Barang di Terminal 2. SOP rekomendasipembuatanizini trayek ASDP 3. SOP Penertiban dan Pengawasan Angkutan Umum/Barang di Jalan Raya 4. SOP rekomendasiizin Usaha izin EMPU 5. SOP rekomendasi	Ada	

						Pemberian Izin Flight Approval tidak berjadwal dalam Provinsi dibawah 50 seat 6. SOP rekomendasiketinggian bangunan di daerah KKOP 7. SOP rekomendasilizn Usaha Perusahaan BongkarMuatBarang(SIUP BM)		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	JumlahPERDA pelaksana yang adaterhadapPERDAYang harusdilaksanakanmenurutPERMEN	JumlahPERDApelaksanaan PERMENyang adadibagi jumlahPERDAYang harus dilaksanakanmenurut PERMENx 100%	Belum adaPERDA, Tapi Terdapat Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebanyak 2 (dua) Peraturan Kepala Daerah, yaitu : 1. Peraturan Gubernur Kepulauan bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2014 Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Peraturan Gubernur Kepulauan bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Trayek.	Tidak Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasiostrukturjabatandane seloneringyang terisi	Jumlahjabatanyang ada (yangdiisi)dibagi jumlahjabatanyang adax 100%	- Jabatan yang adasebanyak 17 - Jabatan yang harusada, sebanyak 17	100 %	

			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	3. PNS SKPD, sebanyak 54 personil 4. Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	1%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklat/pim, sebanyak 17 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	1. Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 17 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA-PD TH 2017	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak 5 program. - Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	100 %	

		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program. 	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program. 	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja PD, sebesar Rp 31.200.055.852,26 - Total Anggaran APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 	$\frac{31.200.055.852,26}{2.598.989.042.215,22} \times 100\% = 1,20\%$	
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Modal PD sebesar Rp 17.390.582.977,77 - Total Realisasi Belanja PD, sebesar Rp 29.042.908.348,77 	$\frac{17.390.582.977,77}{29.042.908.348,77} \times 100\% = 60,10\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp 1.313.922.099,00 - Realisasi Belanja barang dan jasa PD, sebesar Rp 5.791.72220.493,00 	$\frac{1.313.922.099,00}{5.791.72220.493,00} \times 100\% = 22,69\%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dan total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp 1.313.922.099,00 - Total Realisasi Belanja PD, sebesar Rp 29.042.908.348,77 	$\frac{1.313.922.099,00}{29.042.908.348,77} \times 100\% = 4,52\%$	

		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	<ul style="list-style-type: none"> - Neraca - LRA - CaLK - LO - LPE 	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada, tertuang Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Tahunan Tahun 2017 BA Nomor : 550/03.1/DISHUB/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan KIB Tahun 2017	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan akan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 97.932.309.974,36 Sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 550/85/DISHUB tanggal 20 Februari 2018.	$\frac{0}{97.932.309.974,36} \times 100\% = 0\%$	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Ada 2 (dua) Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

FORMAT LAMPIRAN I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Ketenagakerjaan
2. Urusan Transmigrasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1).Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program 	100%	0%	Program Nasional RKP 2017
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan 2. SOP Kewirasusahaan bagi pemula 3. SOP pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja 4. SOP Pemeriksaan Lingkungan Kerja 5. SOP Pelatihan K3 6. SOP Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 7. SOP Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyiapan Lahan Transmigrasi 2. SOP Penerimaan Calon Transmigrasi 3. SOP Pelatihan di Kawasan Transmigrasi 4. SOP Kegiatan Identifikasi Potensi Sasaran Transmigrasi 	Ada 8 SOP	Ada 4 SOP	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						8. SOP Informasi Pasar Kerja				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	Ada Perda nomor 10 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum	- Tidak ada	ada	- Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 20 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 24 orang	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 1 orang	83,33%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. Pengantar Kerja 2. Instruktur 3. Mediator HI 4. Pengawas Ketenagakerjaan	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ada	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	2,19%	0,07%	- Sumber data SKPD mengacu kondisi terakhir/ update Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1).Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org. 	100%	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt. 	100%	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 	100%	100%	Mengacu dokumen RKPd tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp 23.161.074.887 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.598.989.042.215,22	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 470.487.500 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	1,06%	0,06%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 426.280.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 22.058.653.848	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 308.442.450	1,93%	0%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 762.362.775 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.536.919.846	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 269.353.500	8,93%	0%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 762.362.775 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.058.653.848	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 308.442.450	3,35%	0%	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
		17	Keberadaan laporan keuangan atau SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. LPE 2. LRA 3. CalK 4. LO 5. Neraca	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2017	BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TA. 2017	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan aset Perangkat Daerah
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 32.342.771.960	- Asset yang tidak digunakan Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 0	0%	0%	Tidak ada pemisahan aset Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						(1). Urusan Ketenagakerjaan	(2). Urusan Transmigrasi	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Website 2.	5 Jenis	1 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

FORMAT LAMPIRAN I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. URUSAN PERINDUSTRIAN
2. URUSAN PERDAGANGAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional , sebanyak 4 (empat) program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 (tiga) program	67 %	75 %	Program Nasional RKP 2017
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Prosedur Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka 2. SOP ttg Prosedur Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pustakawan 3. SOP ttg Persiapan Bimtek bagi Pengelola Perpustakaan 4. SOP ttg Persiapan Lomba Pustakawan Terbaik	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan SKA	Ada 1 (Satu) SOP	Ada 1 (SATU) SOP	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						5. SOP ttg Pengembangan Kinerja SDM Perpustakaan 6. SOP ttg Pelaksanaan Pendataan SDM Perpustakaan 7. SOP ttg Penerbitan Literatur Sekunder BID				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- Tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 1. PERDA NO 2 TAHUN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. PERDA NO 3 TAHUN 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	0 %	100%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pustakawan Penerjemah Pranata Komputer	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penguji Mutu Barang sebanyak 5 (lima) orang 2. Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang	Ada	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	- PNS, sebanyak 64 (enam puluh empat)-. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) personil	0,61%	1,19%	- Sumber data SKPD mengacu kondisi terakhir/update Tahun 2017
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	87,5 %	94,11%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							- Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2012-2017 2. Renja 2017 3. RKA 2017	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 3 (tiga) program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 (dua) program	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	83,33 %	100 %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP ttg UPL Diagnosis	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak --8	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 17.374.686.020 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp,	%	%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh Perindag (10 Orang)	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 982.080.575,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.19.653.708.827,00	4,99 %	4,99 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- PNS, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 (lima	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 163.534.000,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. - 5.905.516.357,00	2,76 %	2,76 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						ribu tiga ratus delapan puluh delapan) personil				
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak –8 org. 	<ul style="list-style-type: none"> -Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 163.534.000,00 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.653.708.827,00 	0.83 %	0.83 %	Tidak ada pemisahan Belanja Pemeliharaan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt. 	<p>Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. NERACA 5. CALK 	Ada sebanyak 5 jenis :	Ada sebanyak 5 jenis :	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2012-2017 2. Renja 2017 3. RKA 2017	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Berita Acara Rekonsiliasi data barang milik daerah tahunan	Ada	Ada	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -6 	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.732.798.304,50 	0 %	0 %	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 5 program. 	Sebutkan jenisnya 1. papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pos Layanan Pengaduan	Jumlah sebanyak 3 Jenis.	Jumlah sebanyak 3 Jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 5 program. 	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang --- --	tidak ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEMERINTAHAN UMUM

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing- masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian/Survey 2. SOP ttg Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, LSM dan Yayasan. 3. SOP ttg Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.	Ada 3 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ---- - PERDA yang seharusnya, sebanyak ---- %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 Jabatan	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama jabatan fungsional Pranta Humas dan Pranata Komputer.	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 39. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	0,72 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah yang relevan dengan urusan terkait	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA/DPA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA/DPA OPD	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14 Program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 14 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 14 program. 	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 9.607.086.027,11 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22 	0,37 %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.100.000,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.875.643.329,00 	0,18 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 107.139.006,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.989.961.213,00 	3,60 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 107.139.006,00- Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.875.643.329,00 	1,21 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, CALK, LPE, LO)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LPE 5. LO	Ada sebanyak 5 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, CaLK, LRA, LPE,LO)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris 2. Daftar Mutasi Barang 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi. 4. Rekapitulasi Asset Tetap.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp -----. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.420.220.710,00	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/ Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan /dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Web.site Kesbangpol	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		masyarakat		5.Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program: 1. Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program (Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa)	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)		Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 SOP, yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penitipan Server SKPD 2. SOP ttg Pemberian Remote Access 3. SOP ttg Pembuatan Sub Domain Website SKPD 4. SOP ttg Pembuatan Website SKPD 5. SOP ttg Pembuatan E-Mail Resmi Pemerintah 6. SOP ttg Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<p>Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum Wilayah Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Frekuensi Radio</p> <p>7. SOP ttg Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang</p> <p>8. SOP ttg Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Local Wireline Wilayah Provinsi</p> <p>9. SOP ttg Penyelenggaraan Konferensi Pers di Media Center Seksi Sarana Komunikasi</p> <p>10. SOP ttg Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Provinsi</p> <p>11. SOP ttg Penyelenggaraan Layanan Data Teknis Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Seksi Sarana Komunikasi</p> <p>12. SOP ttg Penyelenggaraan Pemutaran Film Media Center</p> <p>13. SOP ttg Penyelenggaraan Peliputan Berita.</p>		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 (satu): PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung No.03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Prov. Kep. Bangka Belitung. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 (satu) 	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16 	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pranata Humas Pranata Komputer Arsiparis	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS SKPD , sebanyak personil 48 orang Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 orang	$48/5.388 \times 100\% = 0,89\%$	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatim, sebanyak 16 org. Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	$16/16 \times 100\% = 100\%$	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.	$16/16 \times 100\% = 100\%$	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada	1.RENSTR A SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program.	$3/5 \times 100\% = 60\%$	Mengacu dokumen RKP tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 	3/3x100%=100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 	3/3x100%=100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pagu anggaran	13	Total Anggaran SKPD terhadap total APBD	Total anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 16.347.867.857,- - Total APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22 	16.347.867.857/2.598.989.042.215,22 x 100 % = 0,63 %	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.1.476.274.613,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.14.516.115.275,- 	1.476.274.613/14.516.115.275=10,17%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	$\frac{\text{total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD}}{\text{total belanja barang dan jasa SKPD}} \times 100\%$	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 361.833.438,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.5.284.362.688,-	361.833.438/ 5.284.362.688= 6,84%	
	16		Total SKPD	$\frac{\text{total belanja pemeliharaan}}{\text{total belanja SKPD}} \times 100\%$	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 361.833.438,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.516.115.275,-	361.833.438/ 14.516.115.275= 2,49%		
	17		Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{\text{Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD}}{\text{total aset yang dikuasai SKPD}} \times 100\%$	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 21.448.243.5262,-	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Pengumuman (Papan Pengumuman, Baleho, Roll Banner) 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman (Papan Pengumuman, Baleho, Roll Banner) 2. Mobil keliling (Mobil unit Media Center) 3. Leaflet	Ada	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		4. Pengumuman di Mass Media		terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada		Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENANAMAN MODAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program 2 -- x 100 % = 0 % 3	66.67 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada 2 Jenis yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Perizinan 2. SOP Penanganan Layanan Pengaduan	Ada 2 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100 %	1. Perda Nomor 8/2015 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Nomor 18/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kep. Babel 3. Perda Nomor 7/2017 tentang Penyelenggaraan PTSP 4. Perda Nomor 5/2017 tentang

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18 jabatan	100 %	
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, yaitu : 1. Fungsional Penerjemah dan 2. Fungsional Pranata Humas	Ada	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 49 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5388 personil	0,90%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD	4 (empat) Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total anggaran APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.505.730.909,- - Total anggaran APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	0,33 %	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 16.700.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.308.997.743,-	0,20 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.823.838.380,-	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.308.997.743,-	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Ada 5 Jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Semester II TA 2017	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 3.167.069.714,-	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman (banner, running text, spanduk, plang penunjuk arah) 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media (Website BPPTPM)	4 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Ada	Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat per responden dan per unsur pelayanan.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI :KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	60%	Programnya: 1) Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	SOP terdiri dari : 1. Jambore Pemuda Indonesia 2. Jambore Pemuda Daerah 3. PSP3 4. Pelatihan Paskibraka 5. Pertukaran Pemuda Antar Negara 6. Pengiriman Atlet 7. Pemusatan Latihan TC	Ada 7 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- Ada	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 14 Jabatan	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada	0%	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD, sebanyak 54 PNS personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5388 PNS personil	1,002%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jabatan	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD sebanyak 4 program - Program renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD sebanyak 4 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program	100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja SKPD/APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total belanja/realisasi APBD x 100%	- Total alokasi anggaran SKPD, sebesar Rp 17.813.686.859,69 - Total alokasi APBD, sebesar Rp.2.363.981.773.256,46,-	0,68%		
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp. 178.650.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 16.435.447.147,-	0,011 %		
		Besaran belanja pemeliharaan	Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.222.080.300,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.424.191.680,-	0,026%	
				16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 222.080.300,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 16.435.447.147,-	0,014%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Ada 5 Jenis		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	ada		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	DAERAH	Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	Rp. 0,- Rp. 108.998.494.811,-	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Baleho 3. Mass Media	Ada 3 JENIS	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %	Prioritas Nasional Bidang Energi Yaitu: Kegiatan Pemeliharaan PJU PLTS di Belitung dan Belitung Timur untuk 100 titik lampu.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 11 yang terdiri dari: 1. SOP Penerbitan Surat Persetujuan RKAB. 2. SOP Penerbitan Rekomendasi Ttg Perusahaan yg diberikan Pengakuan sbg ET-Timah. 3. SOP Penerbitan Surat Persetujuan rencana Reklamasi (RR) 4. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pengusahaan Air Tanah. 5. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pemakaian Air Tanah. 6. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis	Ada 15 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Perpanjangan surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah. 7. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Penggalian Air Tanah. 8. SOP Survey Lapangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk surat Izin Pengeboran Air Tanah. 9. SOP Penerbitan Surat Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang. 10. SOP Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 11. SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 12. SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian. 13. SOP Penerbitan Izin Operasional untuk Kelayakan Operasi Kapal Keruk Pertambangan dan Kapal Isap Pertambangan. 14. SOP Penerbitan Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 15. SOP tentang Ketenagalistrikan		(NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 PERDA - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 PERDA	100%	1. Perda Ketenagalistrikan. 2. Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian jabatan struktur	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	- Inspektur listrik - Penyelidik bumi - Arsiparis - Inspektur Tambang	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 108 PNS personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	2,00%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	95 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbtn.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	3 Jenis dokumen	Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program.	100%	Terlampir
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	Terlampir
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	Terlampir
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 21.381.828.983,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	0,82 %	Updated Tahun 2017.
		Besaran belanja modal (Realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 3.216.512.280,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 19.243.683.769,00	16,71 %	Updated Tahun 2017.
		Besaran belanja pemeliharaan (Realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 435,033,169,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.744.635.177,00	11,62 %	Updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 435.033.169,00. - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 19.243.683.769,00	2,26 %	Updated Tahun 2017.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LO 3. LRA 4. LPE 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LO, LRA, LPE, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1. Laporan Buku Inventaris Tahunan. 2. Laporan kartu inventaris barang (KIB) A,B,C,D , E dan F 3. Laporan rekapitulasi buku inventaris 4. Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah 5. Daftar Pengadaan Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.52.693.629.724,00		Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah yang ada sebanyak 1 jenis	Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak dilakukan survey kepuasan masyarakat.	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	- Jumlah program nasional (RKP) Sebanyak 2 Program - Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 Program	2 ----- x 100% = 100% 2
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD	Ada (SOP) Perizinan Kapal
2	KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	- Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2 - Perda yang seharusnya sebanyak 2	2 ----- x 100% = 100% 2
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	- Jabatan yang ada sebanyak 36 - Jabatan yang harus ada sebanyak 37	36 ----- x 100% =97,29% 37
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada yaitu : 1. Pengawas Perikanan 2. Pranata Humas 3. Pengendali Hama Penyakit Ikan	Ada (17 orang)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	- PNS SKPD, sebanyak 113 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	113 ----- x 100% =2,09 % 5.388
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 36 - Pejabat yang ada, sebanyak 36 orang	36 ----- x 100% =100% 36
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 36 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 36 jabatan	36 ----- x 100% =100% 36
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	- Renstra - Renja - RKA (3 jenis dokumen)
			10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	4 ----- x 100% = 100% 4
			11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program	4 ----- x 100% =100% 4

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program 	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Total anggaran SKPD sebesar Rp. 28.925.435.251 - Total APBD sebesar Rp. 2.598.986.042.215,22 	$\frac{28.925.435.251}{2.598.986.042.215,22} \times 100\% = 1,112\%$
		Besaran belanja modal (realisasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.538.149.200 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.520.492.392 	$\frac{1.538.149.200}{22.520.492.392} \times 100\% = 6,829\%$
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.152.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.079.315.630 	$\frac{196.152.000}{6.079.315.630} \times 100\% = 3,23\%$
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.152.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.520.492.392 	$\frac{196.152.000}{22.520.492.392} \times 100\% = 0,87\%$
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Laporan Keuangan (ada 5 jenis)	<ul style="list-style-type: none"> - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Jenis Data	Capaian Kinerja
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Daftar barang atau aset SKPD yang aktif	Ada (dalam berita acara rekonsiliasi aset)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 110.316.425.139,49 	$\frac{0}{110.316.425.139,49} \times 100\% = 0\%$
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 	Sebanyak 4 Jenis, yaitu <ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet Produk Perikanan 3. Mobil Pengawas Perikanan 4. Website 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet Produk Perikanan 3. Mobil Pengawas Perikanan 4. Website
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Dokumen kuesioner dan nama petugasnya	Tidak Ada

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program . <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan kapasitas Keuangan Daerah 	2/4* 100 % = 50 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Pembuatan Telaah/Kajian Huku 2. SOP ttg Draft Keputusan 3. SOP ttg Pembahasan Raperda 4. SOP ttg Pembahasan Raperda dari Eksekutif Pendamping Reses 5. SOP ttg Penyusunan Prolegda 6. SOP ttg Penangan Penyampaian Aspirasi masyarakat 7. SOP ttg Rapat Paripurna 	Ada 11 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						8. SOP ttg Penyusunan Risalah Rapat Alat kelengkapan 9. SOP ttg Penyusunan Risalah Rapat Pimpinan 10. SOP ttg Penyusunan Tim Pendamping Studi banding 11. SOP ttg Rapat Banmus		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak . - PERDA yang seharusnya, sebanyak		Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	9/10 X100% =90%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	- Arsiparis - Pustakawan - Pranata Humas - Perancang Peraturan Perundang-undang	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak personil 72 - Total PNS Provinsi, sebanyak personil 5388	72/5388x100% = 1,33%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2017
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak org.9	9/9x100% = 100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak jbt 10	9/10x100% = 90%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	100%	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100%	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi Anggaran SKPD terhadap total belanja/realiasi APBD	Realisasi anggaran SKPD dibagi total belanja/realiasi APBD x 100%	- Total realisasi anggaran SKPD, sebesar Rp 76.220.098.191,- - Total APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22	2,39%	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 2.283.361.900 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 77.732.343.133	2,94%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.845.836.307 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 64.066.818.641	2,88%	
	16		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.845.836.307 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 77.732.343.133	2,37%		
	Laporan keuangan SKPD		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 4. LO 2. CALK 5. LPE 3. LRA	Ada sebanyak 5 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB D 5. KIB E 6. KIB F	ada	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp 259.835.000 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp 30.474.410.392		Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Masa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di media masa	2	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	-	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	$2/2 \times 100 = 100\%$	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 10 yang terdiri dari: Ada, terdiri dari 1. SOP Survey dan Pengumpulan Data pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa 2. SOP Pelatihan Ketrampilan dasar Fasilitasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Dengan Sarana Prasarana 3. SOP Gelar TTG Tingkat Nasional 4. SOP Posyantek 5. SOP Bantuan	Ada 10 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						RASKINTIS 6. SOP Peningkatan Inovasi Masyarakat melalui Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi 7. SOP Prosedur pelaksanaan kegiatan PMTAS 8. SOP pengajuan cuti pegawai 9. SOP usulan kenaikan pangkat 10. Bintek Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada:: 1.JFT Pranata Humas 2.JFT Pranata Komputer	Ada:: 1.JFT Pranata Humas 2.JFT Pranata Komputer	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 51 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 Personil	0,94 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/update d Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir / updated Tahun 2017
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan.	100 %	Mengacu kondisi terakhir / updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	100%	Mengacu dokumen RKPd tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. 	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 25.808.334.607,00,- - Total Realiasi APBD, sebesar Rp. 2.666.123.454.944,12 	0,97%	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal (realiasi)	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.42.375.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.25.808.334.607,00 	0,18 %	
		Besaran belanja pemeliharaan (realisasi)	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 189.048.200,00,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, Sebesar Rp. 18.727.881,537,- 	1,14 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.218.390.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 25.808.334.607,00,- 	0,85 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	ada, sebanyak 3 jenis : - Neraca - CALK - LRA	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								(Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada, yaitu Sensus Barang	
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0- - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 179.645.465,-	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Aset yang tidak digunakan sudah diajukan untuk dihapus
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media	Jumlah 3 Jenis : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Tidak ada	Tidak ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	12,5%	33,3%	Lihat Program Nasional untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 1 jenis yang terdiri dari: - SOP Bidang Cipta Karya dan Permukiman	Ada, sebanyak 1 jenis yang terdiri dari: - SOP Bidang Perumahan Rakyat	Ada	Ada	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -- ---	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak ----	Tidak ada	Tidak ada	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	100%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada	Tidak ada	0%	0%	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 8 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil	0,65%	0,15%	Sumber data mengacu kondisi perangkat daerah terakhir/update tahun 2017/ BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	85,7%	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.	100%	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 dokumen	3 dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program SKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, 4 sebanyak program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program. 	100%	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017

LAMPIRAN 1.2 LPPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 13.369.783.508,5 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 331.719.369 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	0,51%	0,01%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.823.293.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.259.820.554,52	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 48.500.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.259.820.554,52	31,60%	0,31%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total realisasi belanja pemeliharaan dari total realisasi belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 29.344.600,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.170.696.778,50	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 29.344.600,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.170.696.778,50	0,70%	0,70%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 29.344.600,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.701.502.877,50	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 29.344.600,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.701.502.877,50	0,21%	0,21%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada, sebanyak 5 Jenis	Ada, sebanyak 5 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	Apabila Ada, Yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik daerah	-	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp.0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 4.871.793.000,00	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, Rp. 4.871.793.000,00	0%	0%	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada, yaitu : 1. Papan Pengumuman	Ada, yaitu : 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (d foto dilampirkan)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Perumahan	Pekerjaan Umum	Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pe langgan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	- Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi - jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 (satu) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ada 1 (satu) SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 	100%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 55 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 57 	96,49%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. JFT Pranata Humas 2. JFT Arsiparis 3. JFT Pranata Komp	3	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 279 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	5,17%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 59 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 55 org. 	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 55 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 57 jbt. 	96,49%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program. 	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program. 	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 70.623.844.349,45 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22	2,72%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.071.001.125,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 63.381.252.604,64	3,27%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 605.006.369,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.914.983.537,00	3,20 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 605.006.369,00 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 63.381.252.604,64	1,0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LPE 5. CaLK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp -----. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 45.934.529.958,00	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari BAKUDA (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/ Aset)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan /dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERENCANAAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program		Tidak ditetapkan jumlah program nasional pada RKP 2017.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 20 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perumusan Ranwal RKPD untuk penyusunan RKPD 2. SOP ttg Persiapan Musrenbang RKPD 3. SOP ttg Forum Konsultasi Publik 4. SOP ttg Forum Gabungan SKPD 5. SOP ttg Penyelenggaraan Musrenbang RKPD serta Trilateral Meeting 6. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Provinsi 7. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	Ada 20 SOP / Tidak Ada:	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Perencanaan Pembangunan Tahunan 8. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD 9. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 10. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD kabupaten/kota 11. SOP ttg Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan tahunan kabupaten/kota 12. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi 13. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi 14. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD Provinsi 15. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 16. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota 17. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten/Kota 18. SOP ttg Evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/Kota 19. SOP ttg Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program dan Konsolidasi Program dan APBN 20. SOP ttg Penyusunan LKPJ		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 (Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022fcd 	100%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 26 <ul style="list-style-type: none"> - Perencana Muda - Perencana Pertama - Statistisi Lanjutan - Stastisi Pertama - Penerjemah Pertama - Pranata Komputer Muda - Peneliti Pertama - Arsiparis Terampil Pelaksana - Calon Perencana - Calon Pranata Komputer - Calon Analis Kebijakan Pertama 	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS SKPD, sebanyak 75 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	$\frac{75}{5.388} \times 100\% = 1,39\%$	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklat/pim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. 	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. 	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> Ada - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD 	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%mk	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 Program 	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 11 program. 	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 11 program. 	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.211.747.172,08 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22 	0,99%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 889.450.918,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.230.671.938,65	4,63%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.175.320.000,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.10.593.334.532,65	1,66 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 175.320.000,00,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.211.747.172,08	0,79 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK	Tidak-Ada/ Ada sebanyak 5 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Buku Inventaris Gabungan.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.996.326.976,00 	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1 Papan Pengumuman 2 Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (Website http://bappeda.babelprov.go.id)	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I.2 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)	(10)	
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak --3-- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --3-- program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak --4-- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --1-- program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak -1- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --1-- program	100 %	25 %	50 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -3--- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A- 2. SOP ttg Workshop Kebijakan Kota Layak Anak- 3. SOP Sistem	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -0- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -3---- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Layanan data agregat dan informasi kependudukan 2. SOP ttg Permintaan dan pelaporan penyelenggaraan administrasi	Ada 3 SOP		Ada 3 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
						nilai-nilai kejuangan perempuan 4. Dst -----		3. SOP ttg Pemanfaatan data kependudukan 4. Ds				Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDApelaksana ansebanyak --1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak --1--	- PERDApelaksana ansebanyak2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	ada	ada	ada	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak - 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	- Jabatan yang adasebanyak4 - Jabatan yang harusada, sebanyak4	- Jabatan yang adasebanyak4 - Jabatan yang harusada, sebanyak4	100 %	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Pranata Komputer	Apabila Ada, sebutkannamabidang/ jabatanfungsional, PenyuluhKeluargaBerencanaPranataKomputer	Apabila Ada, sebutkannamabidang/ abatanfungsional, -.	Ada	Ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah, Mengacu kondisi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
				Daerah								Perangkat Daerah terakhir/update d Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 32. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5388 personil	- PNS yang menanganieurusan (2) SKPD ,sebanyak 9 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak5388 personil	- PNS yang menanganieurusan (3) SKPD ,sebanyak 8 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak5388 personi	0,59%	0,14%	0,14%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/update d Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim , sebanyak 13---- org. - Jabatan, yang ada sebanyak 13 org.	- Pejabat yang memenuhisyaratdi klatpim, sebanyak4 org. - Jabatanyang ada, sebanyak -4org.	- Pejabat yang memenuhisyaratdik latpim, sebanyak4 org. - Jabatanyang ada, sebanyak4-org.	.100. %	100. %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updat ed Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	- Pejabat yang memenuhikepangan, sebanyak4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak4jbt.	- Pejabat yang memenuhikepangan, sebanyak4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak4- jbt.	100 %	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updat ed Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
					ada x 100%							
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak --4-- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak --4-- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak --4-- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang	- Program SKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang	100. %	100 %	100. %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
				Daerah	Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	RPJMD, sebanyak 3	ditetapkandalam RPJMD, sebanyak ..0	ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 1				n RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak -3---- program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak --1- program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ---1-- program.	100. %	100. %	100. %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak --3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak --1--- program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak1 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ---1-- program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak --1--- program.	100 %	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
												Perangkat Daerah tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, Rp 3.454.950.879 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.598.989.042.215,22	- Total belanjabelanjaSKPD, sebesar Rp567.372.000 - Total Belanja APBD, sebesarRp 2.598.989.042.215,22	- Total belanjabelanja SKPD, sebesarRp. 1.283.713.183 - Total Belanja APBD, sebesarRp 2.598.989.042.215,22	0,13 %	0,021 %	0,049 %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 28.950.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 10.715.396.710	- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 28.950.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp10.715.396.710	- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 28.950.000 Total Belanjasebesar Rp10.715.396.710	0,27 %	0 %	0,27 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 50.502.883 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp50.502.883 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 3.812.541.062	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp50.502.883 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar	1,1 %	1,1 %	1,1 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
						Rp 3.812.541.062		Rp 3.812.541.06				
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Rp 50.502.883 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. Rp 10.715.396.710	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. Rp50.502.883 - Total belanja SKPD, sebesarRp. Rp10.715.396.710	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. Rp50.502.883 Total belanja SKPD, sebesarRp. Rp10.715.396.710	0,47 %	..0,47.. %	0,47.. %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak5jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 jenis :	Ada sebanyak 5jenis :	Ada sebanyak k5jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris 4. Kartu Inventaris Ruangan	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris 4. Kartu Inventaris Ruangan	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1. Hasil Sensus 2. Hasil Rekon 3. Buku Inventaris 4. Kartu Inventaris Ruangan		Ada/	Ada/	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak --0-- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.541.456.192aset.	- Asset yang tidakdigunakan, sebanyak --0asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ---- asset.	- Asset yang tidakdigunakan, sebanyak ----0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyakRp.541.456.192 asset.	.0.... %	...0.. %	...0.. %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan /dimanfaat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (1) --- ---	Urusan (2) ----- -----	Urusan (3) ----- -----	
												kan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/di manfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak --- 5-- jenis.	Jumlah sebanyak --5--- - jenis.	Jumlah sebanyak --5- - jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---0--	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- 0	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang 0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat /pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KETAHANAN PANGAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Analisis Pengujian Sampel Pangan Segar; 2. SOP ttg Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA) 3. SOP ttg Pengujian Sampel Pangan Segar 4. SOP ttg Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH) Prov. Kep. Bangka Belitung 5. SOP ttg Sosialisasi, Kampanye dan Promosi	Ada 15 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						P2KP 6. SOP ttg Pengkajian Makanan Tradisional 7. SOP ttg Penyusunan Juklak Operasional Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 8. SOP ttg Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah melalui konsep KRPL 9. SOP ttg Petugas Pendamping Kabupaten, Petugas Pelaksana Provinsi, dan Kabupaten Operasional Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 10. SOP ttg Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Kegiatan 11. SOP ttg Proses Sertifikasi Prima 12. SOP ttg Proses Pendaftaran Nomor		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Registrasi PSAT 13. SOP ttg Penetapan Desa/Kawasan Mandiri Pangan 14. SOP ttg Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kawasan Mandiri Pangan 15. Panduan Mutu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 PERDA, yaitu : 1. PERDA No 12. th 2017 ttg Cadangan Pangan 2. PERDA No 16. Th 2017 ttg Penyelenggaraan Keamanan Pangan - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 PERDA	100 %	Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, <ul style="list-style-type: none"> - Fungsional Perencana 1 org - Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 3 org - Fungsional Analis Ketahanan Pangan 2 org 	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 38 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	0,70%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		dengan urusan terkait	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. 	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RPJMD 2012 – 2017 Perubahan 2. RKPD 2017 3. RENSTRA Dinas Pangan 2012 – 2017 (Perubahan ke lima) 4. RENJA Dinas Pangan 2017 5. DPA	5 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Perangkat Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> sebanyak 1 program. Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 1 program program. 		Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 1 program. 	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 9.622.983.712,14 Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22 	0,037%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir.
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 220.140.000 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.9.164.107.512,00 	2,4 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						4.531.932.899,00		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 104.258.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.164.107.512,00	1,13 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk, Laporan Operasional)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. LPE	Ada sebanyakjenis : 5 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset 2. Buku Inventaris	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 104.258.000,00 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.	5,17 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah x 100 %	2.013.113.860,00		Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1.Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEHUTANAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi diatas 2.000 m3/tahun s.d 6.000 m3/tahun. 2. Penyadaran Masyarakat Terhadap Hukum bidang Kehutanan. 3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 4. Perlindungan Hutan Terhadap Tindak Pidana Kehutanan.	Ada 4 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERDA, yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Pelaksanaan atas PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 PERDA 	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Polisi Hutan (31) 2. Penyuluh Kehutanan (31) 3. Pengendali Ekosiste, Hutan (9)	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 153 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil 	2,83%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt. 	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah	5 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program program. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah, Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program. 	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 27.047.738.721 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.598.989.042.215,22 	1,040%	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 42.050.000 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.23.871.131.145	0,17 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 574.200.000,00,- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.470.533.645,00,-	6,78%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 574.200.000,00,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.871.131.145	2,40%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk, Laporan Operasional)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. LPE	Ada sebanyak : 5 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, 1. Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.309.446.903.70,-	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media 4. Mobil keliling 5. Website http://dinhut.babelprov.go.id	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Pemda.

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MIX 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	220 -----x100 = 99,95% 221	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	161 -----x100=99,38% 162	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MAX 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	136 -----x100 = 99,27% 137	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C x 100 % Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun	42.523 -----x100 = 58,72% 72.406	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil
		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya	14.723 -----x100 = 99,95% 14.730	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA x 100% Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya	508 -----x100= 1% 50.978	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

		7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	18.871 -----x100 = 94,95% 19.874	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SD/MI	6.903 -----x100 = 81,54% 8.466	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		9	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMP/MTS	3.496 -----x100 = 87,01% 4.018	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		10	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA	3.153 -----x100 = 93,51% 3.372	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		11	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu Pendidikan	Ada	Sumber data dari Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	673 ----- = 96,14% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	652,98 ----- = 93,28% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	682,61 ----- = 97,51 % 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		15	Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapatkan perawatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	478,79 ----- = 68,39% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		18	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	437,2 ----- = 62,45% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		19	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	678,71 ----- = 96,95% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
3	Lingkungan Hidup	20	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan Kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	7 ----- = 100% 7	Sumber data dari Dinas LH
		21	Kebersihan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	584,12 ----- = 83,44% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	195.249 ----- = 27,89% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		23	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- = 100% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jalan orovinsi	453,49 (hasil klarifikasi 791,42) -----x100%=93% 850,99	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang

		25	Rumah tangga persanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	582,4 ----- 7 = 83,2%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		26	Kawasan kumuh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	1.758 ----- 7 = 0,25%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	222,74 ----- 7 = 31,82%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
5	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	595,99 ----- 7 = 85,14%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Rumah layak huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	610,75 ----- 7 = 87,25%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
6	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelandang/balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	38.2544 ----- 7 = 5,46%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Lapangan Olahraga	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	5.452 ----- 7 = 0,78%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2017 – Realisasi PMDN thn 2016 ----- Realisasi PMDN 2016	1.734,73– 2.201,96 ----- 2.201,96 x100 % =(- 21,22%)	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal
8	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	506,24 ----- 7 = 72,32%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		34	Usaha Makro dan Kecil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	696,41 ----- = 99,49% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
9	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	35	Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Sumber data dari Dukcapil/ Perangkat Daerah yg menangani
10	Tenaga Kerja	36	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	600,5 ----- = 85,78% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	173,9 ----- = 24,84% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Sumber data dari Dinas Pangan / Perangkat Daerah yg menangani
		39	Ketersediaan pangan utama	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	811,38 ----- = 115,91% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
12	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan ----- 100 % Jumlah pekerja perempuan	17.596 ----- = 18,79% 93.616	Sumber data dari Dinas PP & PA/ Perangkat Daerah yg menangani
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	264,11 ----- = 37,73% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	543,3 ----- = 77,61% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		43	Rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB) di setiap Desa/Kalurahan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	536,55 ----- = 76,65% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
14	Perhubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	99,9739 ----- = 14,28% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	Komunikasi & Informatika	45	Web site milik pemda	Ada	Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo / Perangkat Daerah yg menangani
		46	Pameran/ Expo	Menunjukkan jumlah pameran/Expo yang dilaksanakan per tahun	9 kali	Sumber data dari Dinas Kominfo
16	Pertanahan	47	Luas lahan bersertifikat	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	252,21 ----- = 36,03% 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48	PKK aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	700 ----- x100 = 100 % 7	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
18	Sosial	49	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi dll yang terdapat di suatu daerah	2 buah	Sumber data dari Dinas Sosial/ Perangkat Daerah yg menangani
		50	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- X 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	50.955 Orang -----x100% 394.681 Orang = 12,91%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
19	Kebudayaan	51	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	30 kegiatan	Sumber data dari Dinas Budpar/ Perangkat Daerah yg menangani

		52	Sarana penyelenggaraan seni & budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	Sumber data dari Dinas Budpar/Perangkat Daerah yg menangani
20	Statistik	53	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/Perangkat Daerah yg menangani
		54	Buku "PDRB provinsi"	Ada	Ada	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/Perangkat Daerah yg menangani
21	Kearsipan	55	Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku ----- X 100 % Jumlah Perangkat Daerah	42/42x100%= 100%	Sumber data dari Dinas Arsip/Perangkat Daerah yg menangani
		56	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Arsip	1 kegiatan	Sumber data dari Dinas Kearsipan/Perangkat Daerah yg menangani
22	Perpustakaan	57	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	11.554 -----x100% =52,35% 22.071	Sumber data dari Dinas Perpustakaan/Perangkat Daerah yg menangani
		58	Pengunjung Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun -----X 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	15.058 -----x100% = 9,76 154.320	Sumber data dari Perpustakaan/Perangkat Daerah yg menangani

URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi Perikanan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{656.14}{7} = 93.73$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		2	Exspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (kg pertahun) Target daerah X 100 %	$\frac{3.539.840}{13.669.708,71} \times 100\% = 25,90$	Sumber data dari Dinas Kelautan & Perikanan
		3	Konsumsi ikan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{356,11 \text{ kg/thn}}{7} = 50,87 \text{ kg/thn/kab/kota}$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
2	Pertanian	4	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	$\frac{23.14}{7} = 3.30$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian Jumlah total PDRB X 100 %	$\frac{13.121,4}{65.125,1} \times 100\% = 20,14\%$	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan kritis X 100 %	$\frac{10.318,24 \text{ H}}{216,109 \text{ H}} \times 100\% = 4,77\%$	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		7	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kerusakan kawasan hutan Luas kawasan hutan X 100 %	$\frac{41.769,55}{657.378,26} \times 100\% = 6,35\%$	Sumber data dari Dinas Kehutanan

4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas penambangan liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan liar}} \times 100 \%$	$\frac{82,5 \text{ H}}{82,5 \text{ H}} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Dinas ESDM
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$	$\frac{7.740,5}{65.125,3} \times 100\% = 11,88\%$	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertambangan
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	1.722.017 orang/tahun	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$	$\frac{1.735.578,86}{69.973.232,48} \times 100\% = 2,48\%$	Sumber data dari buku PDRB, sektor jasa, hotel, restoran, (harga berlaku)
6	Perindustrian	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$	$\frac{14.276.471,09}{69.973.232,48} \times 100\% = 20,40\%$	Sumber data dari buku PDRB, sektor industri, (harga berlaku)
		13	Pertumbuhan industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	$\frac{141,56}{7} = 20,22\%$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100 \%$	$\frac{10.890.854,91}{69.973.232,48} \times 100\% = 15,56\%$	Sumber data dari buku PDRB, sektor perdagangan, (harga berlaku)
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih= nilai ekspor – nilai impor 1.624.971.663,03 – 69.389.481,40	US\$. 1.555.582.181,63	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigrasi swakarsa	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	$\frac{1}{1} = 100\%$	Normalisasi

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMADIK 2. e-MONEV 3. SIPKAD 4. SIAK 5. e-PROC 6. siBahsos 7. E-Planing 8. E-Musrenbang 9. SIMDA 	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Tapalbatas	<p>Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/ Kota yg diselesaikan</p> <p>----- X 100</p> <p>%</p> <p>Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten dan Kota yg dilaporkan</p>	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Biro Pemerintahan/ Perangkat Daerah yg menangani
		3	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		6	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	<p>Penjabaran program RPJMD dalam RKPD</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan</p>	$\frac{206 \text{ program}}{206 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$	Sumber data Bappeda

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	2 kegiatan	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/Perangkat Daerah yg menangani
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	0 kegiatan (Ada surat Pernyataan)	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/Perangkat Daerah yg menangani